



PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI BARAT

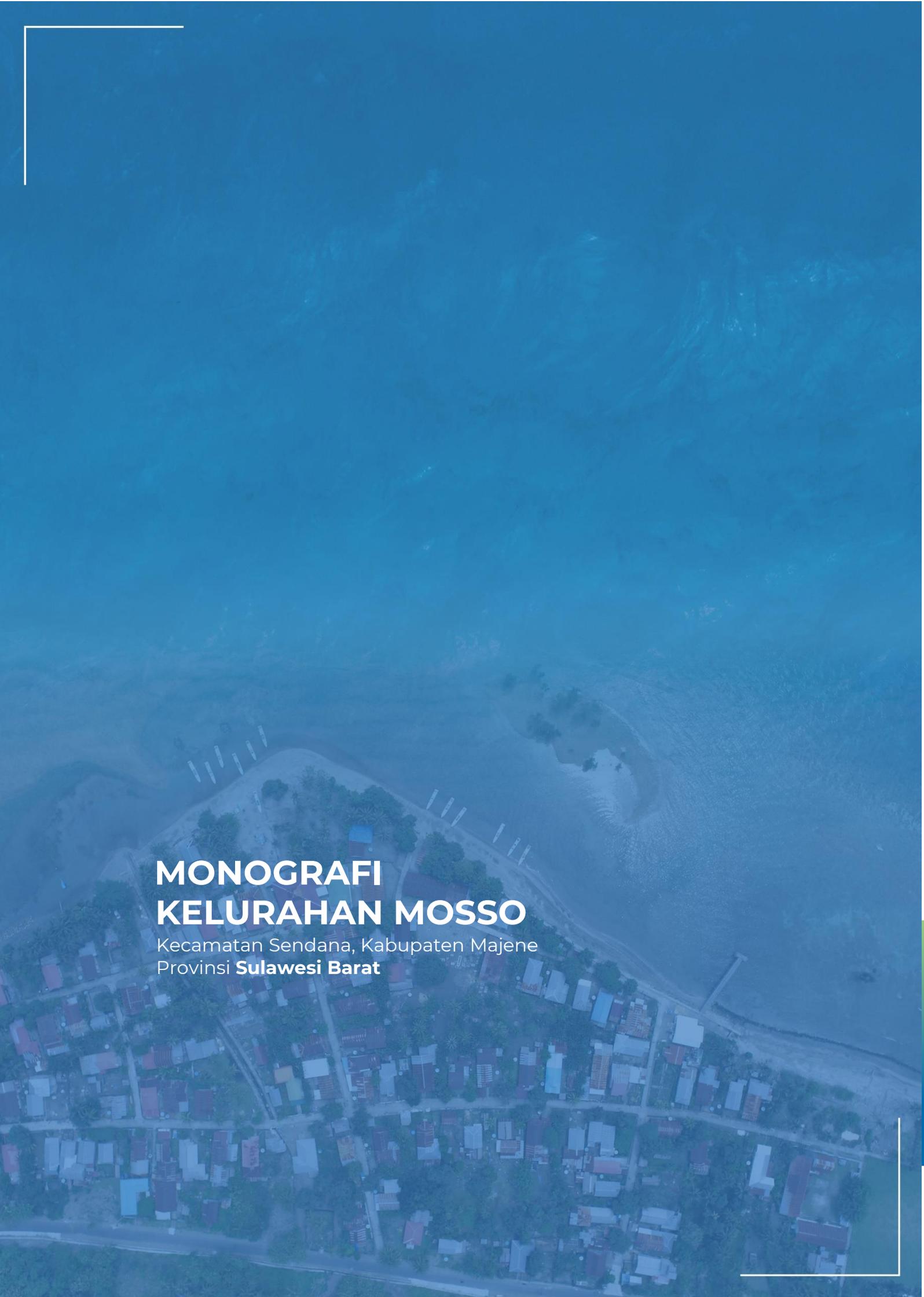


IPB University
Bogor Indonesia

DATA DESA PRESISI

MONOGRAFI KELURAHAN MOSSO

Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene
Provinsi Sulawesi Barat

An aerial photograph of a coastal village, likely Mossó, with a blue overlay. The image shows a cluster of buildings with various colored roofs (red, blue, white) and green trees. The village is situated near a body of water, with a sandy beach and some structures extending into the water. The overall scene is captured from a high angle, providing a clear view of the settlement's layout and its proximity to the sea.

MONOGRAFI KELURAHAN MOSSO

Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene
Provinsi **Sulawesi Barat**

MONOGRAFI KELURAHAN MOSSO

Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene
Provinsi Sulawesi Barat

Penulis:

Dr. Sofyan Sjaf
La Elson, M.Si.
Lukman Hakim, M.Si.
Muhammad Rifky Rangkuti, A.M.d
Afan Ray Mahardika, M.Si
Ostaf al Mustafa
Hanan Anisa Saniyah S.Si
Mila Nadia Choeriah, S.Hut

Desain Sampul & Penata Letak:

Badar Muhammad, S.I.Kom.
Ayubi Aziz, A.Md.

Jumlah Halaman:

135 Hal + 11 Hal Romawi

Penerbit:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat - IPB University
© 2022. HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.

DATA DESA
P R E S I S I

KATA PENGANTAR

Data Desa Presisi (DDP) adalah gagasan Dr. Sofyan Sjaf, dkk. yang dirintis sejak tahun 2014 pasca lahirnya Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa. Pada tahun 2014, kami membidani lahirnya inovasi kelembagaan Sekolah *Drone* Desa (SDD) sebagai pendekatan untuk membangun data spasial desa secara partisipatif. Beberapa daerah dan yang telah mengadopsi pendekatan ini adalah Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Konawe dan Kabupaten Konawe Selatan. Lanjut pada tahun 2017, Dr. Sofyan Sjaf, dkk. mulai mengawinkan pendekatan spasial dengan pendekatan sensus dan partisipasi warga, pendekatan yang mengawinkan dimensi spasial, sensus dan partisipatif dinamakan *Drone Participatory Mapping* (DPM). Pendekatan DPM ini diimplementasikan pada tahun 2017 di Desa Sukadamai, Kabupaten Bogor. Hanya saja sensus dilakukan secara manual dengan instrumen kuesioner. Pada tahun 2019, dimulai pengembangan pendekatan DPM dengan memanfaatkan teknologi digital dalam proses sensus keluarga di pedesaan, yaitu MERDESA Aplikasi yang diinisiasi oleh Tim Unit Desa Presisi. Saat ini bersamaan dengan monografi ini terbit jumlah desa yang telah diimplementasikan DDP adalah sebanyak 93 Desa yang tersebar di 11 Provinsi di Indonesia.

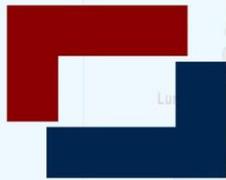
Buku Monografi Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Mejene. ini adalah bukti bahwa dengan partisipasi warga, DDP bisa dibangun dari desa. Kemajuan teknologi dan semakin berkembangnya pengetahuan, adalah suatu keniscayaan untuk menghasilkan pembangunan presisi yang dimulai dari desa, sehingga terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi warga di pedesaan. DDP yang menyintesis 3 pendekatan (spasial, sensus, dan partisipatif) adalah bukti bahwa kita bisa menghasilkan *big data* desa ke depan.

Terakhir, buku monografi desa ini ditulis berdasarkan enam aspek kesejahteraan rakyat (kesra) sebagai wujud amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Keenam aspek kesra yang dimaksud, yaitu: demografi; sandang pangan dan papan; pendidikan dan kebudayaan; kesehatan, pekerjaan dan jaminan sosial; sosial, hukum dan HAM; infrastruktur dan lingkungan hidup. Semoga buku ini bermanfaat untuk dijadikan sebagai basis perencanaan dan implementasi pembangunan di Kelurahan Mosso.

Tim Penulis

**DATA DESA
PRESISI**

S E L A T M A K A S S A R



DATA DESA PRESISI

LPPM IPB University

KAB. MAMUJU

KAB. MAJENE

KAB. MAMASA

KAB. POLEWALI MANDAR

MAJENE

POLEWALI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
PENDAHULUAN	2
RUMUSAN MASALAH	4
TUJUAN PENDATAAN	7
METODOLOGI	8
Penggunaan Metode DDP	9
TINJAUAN PUSTAKA	17
Diskursus Metodologi Pendataan Pedesaan	17
DDP Sebagai Metode dan Pendekatan Baru Pendataan Pedesaan	18
GEOGRAFI DESA	22
A. Sejarah Desa	22
B. Peta <i>orthophoto</i> Kelurahan Mosso	24
C. Peta Administrasi	26
D. Peta Sarana dan Prasarana	26
E. Peta Penggunaan Lahan	28
F. Peta Topografi	30
DEMOGRAFI DESA	32
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	40
INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP	46
KEHIDUPAN SOSIAL, PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAM	54
KESEHATAN, PEKERJAAN DAN JAMINAN SOSIAL	62
SANDANG, PANGAN DAN PAPAN	74
DATA SOSIAL	88
A. Kelembagaan Desa (Diagram <i>Venn</i>)	88
B. Pohon Masalah	89
C. Kalender Musim	91
D. Stratifikasi Sosial	93
KESIMPULAN	96
DAFTAR PUSTAKA	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Tahapan implementasi DDP	10
Gambar 2 Peta orthophoto Kelurahan Mosso.....	25
Gambar 3 Peta administrasi Kelurahan Mosso	26
Gambar 4 Peta sarana dan prasarana Kelurahan Mosso.....	27
Gambar 5 Peta Penggunaan Lahan Kelurahan Mosso	29
Gambar 6 Peta Topografi Kelurahan Mosso	30
Gambar 7 Jumlah kepala keluarga dan penduduk di setiap dusun di Kelurahan Mosso	32
Gambar 8 Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kelurahan Mosso	32
Gambar 9 Jumlah anggota keluarga berdasarkan jenis kelamin di Kelurahan Mosso.....	33
Gambar 10 Sebaran penduduk laki-laki dan perempuan berdasarkan usia (piramida penduduk) Kelurahan Mosso	33
Gambar 11 Piramida penduduk Dusun Somba Utara	34
Gambar 12 Piramida penduduk Dusun Somba Timur.....	34
Gambar 13 Piramida penduduk Dusun Somba Selatan	35
Gambar 14 Piramida penduduk Dusun Somba Tenggara	35
Gambar 15 Piramida Penduduk Dusun Labuang Utara	36
Gambar 16 Piramida Penduduk Dusun Labuang.....	36
Gambar 17 Piramida Penduduk Dusun Labuang Selatan.....	37
Gambar 18 Jumlah penduduk berdasarkan kepemilikan ktp di Kelurahan Mosso.....	37
Gambar 19 Jumlah penduduk berdasarkan kepemilikan akta kelahiran di Kelurahan Mosso.....	37
Gambar 20 Jumlah penduduk berdasarkan status kawin penduduk di Kelurahan Mosso	38
Gambar 21 Jumlah keluarga berdasarkan lama tinggal di Kelurahan Mosso.....	38
Gambar 22 Peta sebaran penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Kelurahan Mosso.....	40
Gambar 23 Jumlah penduduk berdasarkan ijazah sekolah terakhir yang dimiliki di Kelurahan Mosso.....	41
Gambar 24 Jumlah penduduk berdasarkan ijazah sekolah terakhir yang dimiliki dan jenis kelamin di Kelurahan Mosso.....	41
Gambar 25 Jumlah penduduk berdasarkan partisipasi sekolah di Kelurahan Mosso	42
Gambar 26 Jumlah keluarga berdasarkan bantuan pendidikan yang diterima di Kelurahan Mosso	42
Gambar 27 Jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut di Kelurahan Mosso.....	43
Gambar 28 Jumlah penduduk berdasarkan bahasa yang digunakan di Kelurahan Mosso.....	44
Gambar 29 Peta sebaran keluarga berdasarkan tempat membuang sampah di Kelurahan Mosso	47
Gambar 30 Jumlah keluarga berdasarkan tempat membuang sampah di Kelurahan Mosso	47
Gambar 31 Jumlah keluarga berdasarkan kepemilikan <i>handphone</i> di Kelurahan Mosso.....	48
Gambar 32 Jumlah penduduk berdasarkan merek <i>provider</i> yang digunakan di Kelurahan Mosso	49
Gambar 33 Jumlah keluarga berdasarkan kepemilikan pekarangan di Kelurahan Mosso	49
Gambar 34 Jumlah keluarga berdasarkan sumber air pekarangan di Kelurahan Mosso	49
Gambar 35 Jumlah keluarga berdasarkan strata tanaman pekarangan di Kelurahan Mosso.....	50
Gambar 36 Jumlah keluarga berdasarkan ragam jenis tanaman di pekarangan pada Kelurahan Mosso.....	51
Gambar 37 Jumlah penduduk berdasarkan status tinggal di Kelurahan Mosso.....	54
Gambar 38 Peta sebaran kepala keluarga berdasarkan penerima bantuan di Kelurahan Mosso	55
Gambar 39 Jumlah keluarga berdasarkan kepemilikan kulkas di rumah di Kelurahan Mosso	56
Gambar 40 Jumlah penduduk berdasarkan pengalaman menjadi korban kejahatan di Kelurahan Mosso.....	56
Gambar 41 Jumlah keluarga berdasarkan merek sepeda motor yang dimiliki Di Kelurahan Mosso	57
Gambar 42 Jumlah keluarga berdasarkan frekuensi <i>refreshing</i> di Kelurahan Mosso.....	58
Gambar 43 Jumlah keluarga berdasarkan sumber pinjaman di Kelurahan Mosso.....	58
Gambar 44 Jumlah keluarga berdasarkan akses media informasi di Kelurahan Mosso.....	59

Gambar 45 Jumlah keluarga berdasarkan anggota keluarga penyandang disabilitas di Kelurahan Mosso.....	59
Gambar 46 Jumlah keluarga berdasarkan pengguna kb di Kelurahan Mosso.....	63
Gambar 47 Peta sebaran kepala keluarga berdasarkan penerima bantuan JKN-KIS/BPJS di Kelurahan Mosso.....	63
Gambar 48 Jumlah keluarga berdasarkan keikutsertaan BPJS ketenagakerjaan di Kelurahan Mosso.....	64
Gambar 49 Jumlah keluarga berdasarkan anggota keluarga menjadi TKI di Kelurahan Mosso	64
Gambar 50 Jumlah keluarga berdasarkan penyakit berat yang diderita di Kelurahan Mosso.....	65
Gambar 51 Jumlah keluarga berdasarkan jumlah penyakit berat di Kelurahan Mosso.....	65
Gambar 52 Jumlah keluarga berdasarkan tempat menabung di Kelurahan Mosso	65
Gambar 53 Jumlah penduduk berdasarkan lokasi usaha di Kelurahan Mosso.....	67
Gambar 54 Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan sampingan di Kelurahan Mosso	68
Gambar 55 Jumlah keluarga berdasarkan akses lahan pertanian di Kelurahan Mosso.....	68
Gambar 56 Jumlah keluarga berdasarkan pemanfaatan lahan pertanian di Kelurahan Mosso.....	69
Gambar 57 Jumlah keluarga berdasarkan status dan lokasi lahan pertanian di Kelurahan Mosso.....	69
Gambar 58 Jumlah keluarga berdasarkan bukti kepemilikan lahan yang di Kelurahan Mosso.....	70
Gambar 59 Jumlah keluarga berdasarkan ternak yang dimiliki di Kelurahan Mosso.....	70
Gambar 60 Jumlah balita penerima asi eksklusif di Kelurahan Mosso.....	71
Gambar 61 Jumlah keluarga berdasarkan frekuensi pemeriksaan kesehatan balita di Kelurahan Mosso.....	71
Gambar 62 Jumlah keluarga berdasarkan frekuensi beli pakaian per tahun di Kelurahan Mosso	75
Gambar 63 Jumlah keluarga berdasarkan sumber air keluarga di Kelurahan Mosso	76
Gambar 64 Peta sebaran kepala keluarga berdasarkan sumber air minum	77
Gambar 65 Jumlah keluarga berdasarkan frekuensi makan per hari di Kelurahan Mosso	78
Gambar 66 Jumlah keluarga berdasarkan kelengkapan menu makanan Di Kelurahan Mosso	79
Gambar 67 Jumlah keluarga berdasarkan tempat belanja kebutuhan pokok di Kelurahan Mosso.....	79
Gambar 68 Jumlah keluarga berdasarkan penggunaan daya listrik (PLN) di Kelurahan Mosso	82
Gambar 69 Jumlah keluarga berdasarkan jenis lantai rumah yang ditinggali di Kelurahan Mosso.....	83
Gambar 70 Jumlah Keluarga Berdasarkan Jenis Dinding Rumah Yang Ditinggali Di Kelurahan Mosso.....	84
Gambar 71 Jumlah keluarga berdasarkan jenis atap rumah yang ditinggali di Kelurahan Mosso.....	84
Gambar 72 Jumlah keluarga berdasarkan kepemilikan jamban di dalam rumah di Kelurahan Mosso.....	85
Gambar 73 Jumlah keluarga berdasarkan jumlah kamar tidur di rumah di Kelurahan Mosso	85
Gambar 74 Jumlah keluarga berdasarkan status kepemilikan rumah yang ditinggali di Kelurahan Mosso.....	86
Gambar 75 Diagram <i>venn</i> kelembagaan Kelurahan Mosso.....	88
Gambar 76 Pohon Masalah Perikanan Kelurahan Mosso.....	90
Gambar 77 Pohon Masalah Pertanian Kelurahan Mosso.....	91
Gambar 78 Stratifikasi Sosial Kelurahan Mosso	94
Gambar 79 Stratifikasi Sosial Kelurahan Mosso	95

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tujuh isu strategis desa yang membutuhkan Data Desa Presisi.....	5
Tabel 2 Parameter sensus dengan Merdesa Sensus Aplikasi	13
Tabel 3 Sejarah Desa.....	22
Tabel 4 Jumlah fasilitas umum setiap pada 7 lingkungan yang terletak di Kelurahan Mosso.....	28
Tabel 5 Titik Koordinat lokasi jalan rusak yang terdapat di Kelurahan Mosso	28
Tabel 6 Luas Penggunaan Lahan di Kelurahan Mosso.....	29
Tabel 7 Jumlah penduduk berdasarkan status kawin penduduk di Kelurahan Mosso	38
Tabel 8 Jumlah penduduk berdasarkan ijazah sekolah terakhir yang dimiliki di Kelurahan Mosso	41
Tabel 9 Jumlah penduduk berdasarkan partisipasi sekolah di Kelurahan Mosso.....	42
Tabel 10 Jumlah penduduk berdasarkan etnisitas di Kelurahan Mosso	43
Tabel 11 Jumlah penduduk berdasarkan bahasa daerah yang digunakan di Kelurahan Mosso.....	44
Tabel 12 Jumlah keluarga berdasarkan tempat membuang sampah di Kelurahan Mosso	48
Tabel 13 Jumlah keluarga berdasarkan aset ekonomi yang dimiliki di Kelurahan Mosso.....	48
Tabel 14 Jumlah keluarga berdasarkan sumber air pekarangan di Kelurahan Mosso	50
Tabel 15 Jumlah keluarga berdasarkan strata tanaman pekarangan di Kelurahan Mosso	50
Tabel 16 Jumlah keluarga berdasarkan ragam jenis tanaman di Pekarangan pada Kelurahan Mosso.....	51
Tabel 17 Jumlah keluarga berdasarkan penerima program bantuan sosial di Kelurahan Mosso.....	55
Tabel 18 Jumlah keluarga berdasarkan kepemilikan sarana transportasi di Kelurahan Mosso	56
Tabel 19 Jumlah keluarga berdasarkan merek mobil yang dimiliki di Kelurahan Mosso	57
Tabel 20 Jumlah keluarga berdasarkan partisipasi organisasi di Kelurahan Mosso.....	57
Tabel 21 Jumlah keluarga berdasarkan keikutsertaan JKN-KIS/BPJS di Kelurahan Mosso	64
Tabel 22 Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan	66
Tabel 23 Jumlah penduduk berdasarkan status pekerjaan di Kelurahan Mosso	66
Tabel 24 Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan sampingan di Kelurahan Mosso.....	67
Tabel 25 Jumlah keluarga berdasarkan ternak yang dimiliki di Kelurahan Mosso.....	70
Tabel 26 Jumlah ternak yang dimiliki penduduk di Kelurahan Mosso.....	71
Tabel 27 Jumlah Keluarga Berdasarkan Frekuensi Beli Pakaian Per Tahun di Kelurahan Mosso	75
Tabel 28 Jumlah Keluarga Berdasarkan Sumber Air Keluarga di Kelurahan Mosso.....	76
Tabel 29 Jumlah Keluarga Berdasarkan Sumber Air Minum Keluarga Di Kelurahan Mosso.....	77
Tabel 30 Jumlah keluarga berdasarkan bahan bakar masak di Kelurahan Mosso.....	78
Tabel 31 Jumlah keluarga berdasarkan frekuensi makan per hari di Kelurahan Mosso	78
Tabel 32 Jumlah keluarga berdasarkan kelengkapan menu makanan di Kelurahan Mosso.....	79
Tabel 33 Jumlah keluarga berdasarkan kelengkapan menu makanan di Kelurahan Mosso.....	80
Tabel 34 konsumsi karbohidrat per bulan di Kelurahan Mosso.....	80
Tabel 35 Jumlah konsumsi lauk hewani per bulan di Kelurahan Mosso	80
Tabel 36 Jumlah konsumsi lauk nabati per bulan di Kelurahan Mosso	81
Tabel 37 Jumlah konsumsi sayuran per bulan di Kelurahan Mosso.....	81
Tabel 38 Jumlah konsumsi buah-buahan per bulan di Kelurahan Mosso.....	81
Tabel 39 Jumlah konsumsi bumbu per bulan di Kelurahan Mosso.....	81
Tabel 40 Jumlah konsumsi bahan masak per bulan di Kelurahan Mosso	82
Tabel 41 Jumlah konsumsi bahan pelengkap per bulan di Kelurahan Mosso.....	82
Tabel 42 Jumlah keluarga berdasarkan penggunaan daya listrik (PLN) di Kelurahan Mosso	83
Tabel 43 Jumlah keluarga berdasarkan jenis lantai rumah yang ditinggali di Kelurahan Mosso.....	83
Tabel 44 Jumlah keluarga berdasarkan jenis dinding rumah yang ditinggali di Kelurahan Mosso.....	84
Tabel 45 Jumlah keluarga berdasarkan jenis atap rumah yang ditinggali di Kelurahan Mosso.....	85
Tabel 46 Jumlah keluarga berdasarkan jumlah kamar tidur di rumah di Kelurahan Mosso	86
Tabel 47 Jumlah keluarga berdasarkan status kepemilikan rumah yang ditinggali di Kelurahan Mosso.....	86
Tabel 48 Kalender Musim Kelurahan Mosso.....	93

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kelurahan Mosso secara administratif berada di Kecamatan Sendana yang berbatasan dengan Desa Limbua dan Desa Puttada di bagian utara, bagian timur berbatasan dengan Desa Paminggalan, bagian selatan berbatasan dengan Desa Bukit Samang, dan bagian barat berbatasan dengan Selat Makassar. Kelurahan ini terdiri dari tujuh dusun. Desa ini terletak di Kecamatan Sendana. Luas Kelurahan Mosso sebesar 610.103,018 hektare. Masing-masing dusun memiliki luasan wilayah: Dusun Somba Utara = 7.168,345 hektare; Dusun Somba Timur = 483.503 hektare; Dusun Somba Selatan = 7.370,994 hektare; Dusun Somba Tenggara = 219.872318 hektare; Dusun Labuang Utara = 93.680,196 hektare; Dusun Labuang = 100.180,361 hektare; Dusun Labuang Selatan = 133.513,942 hektare.

Jumlah keluarga di Kelurahan Mosso mencapai 967 keluarga. Dari 967 keluarga yang tinggal terdapat 3.790 jiwa. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 1.855 jiwa dan perempuan sebanyak 1.935 jiwa. Piramida penduduk Kelurahan Mosso menggambarkan bahwa terdapat 1.235 jiwa usia produktif. Sedangkan usia nonproduktif sebanyak 804 jiwa. Usia nonproduktif berkisar dari usia 0—14 tahun dan usia lebih dari 65 tahun.

Penduduk Kelurahan Mosso mayoritas makan dengan frekuensi tiga kali sehari, kemudian dua kali sehari dan frekuensi makan lebih dari tiga kali sehari relatif sedikit. Terdapat 787 KK dengan frekuensi makan tiga kali sehari, 108 KK dengan frekuensi makan dua kali sehari kemudian 68 KK dengan frekuensi makan lebih dari tiga kali sehari.

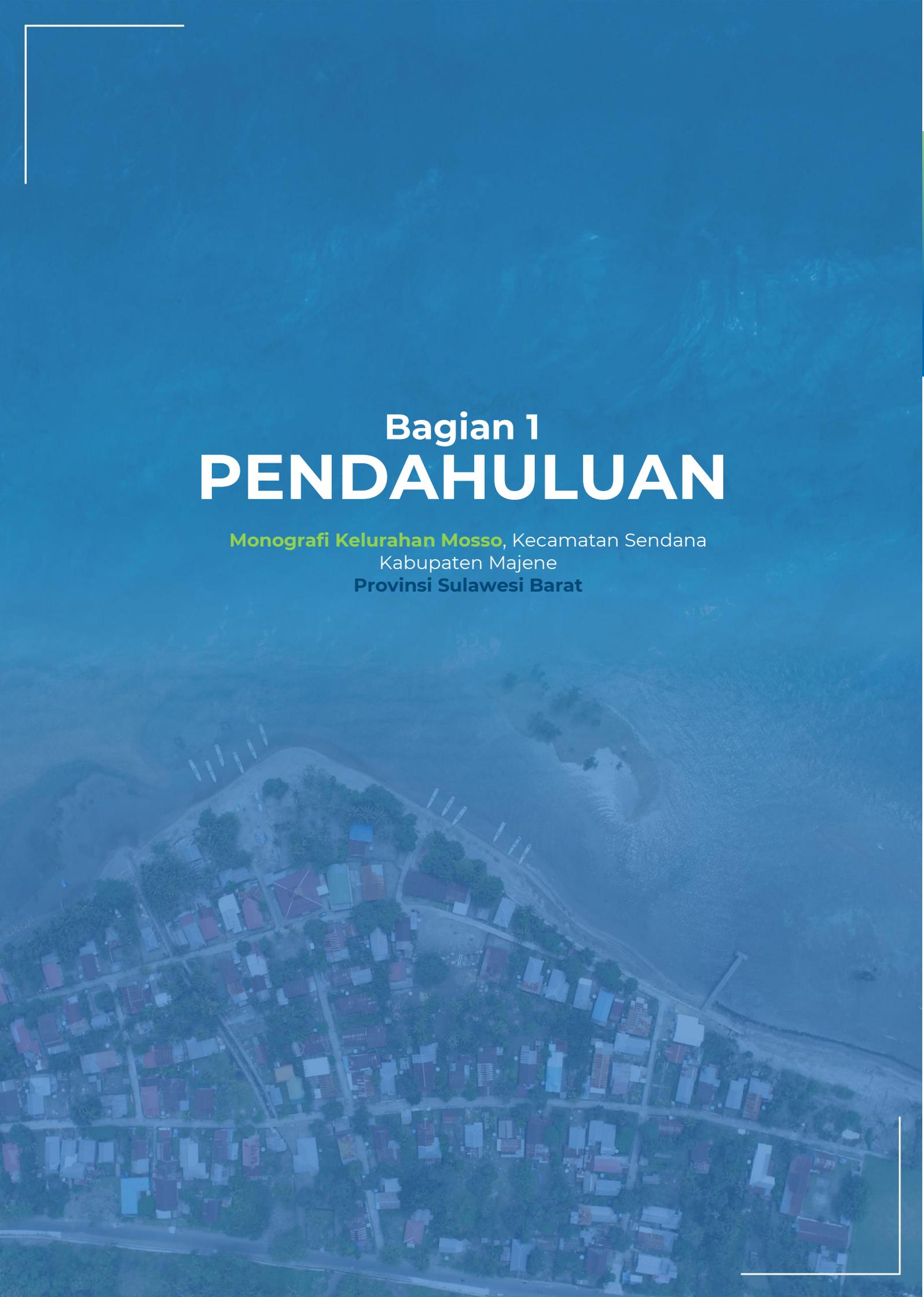
Jumlah penduduk berdasarkan ijazah sekolah terakhir yang dimiliki di Kelurahan Mosso terbagi dalam 8 (delapan) kategori, yakni tidak punya ijazah, SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ sederajat, D-1/D-2/D-3, D-4/S-1, dan S-2. Berdasarkan dari total jumlah penduduk di Kelurahan Mosso sebanyak 3.790 jiwa, mayoritas penduduk Mosso ini sebanyak 1.117 jiwa (29,47 persen) tidak memiliki ijazah, sedangkan paling sedikit hanya sebanyak 1 jiwa (0,03 persen) untuk kategori penduduk memiliki ijazah S-3. Sementara itu, untuk penduduk yang memiliki ijazah SD/ sederajat di Kelurahan Mosso terdapat 1.090 jiwa (28,76 persen), diikuti penduduk yang memiliki ijazah SMP/ederajat sebanyak 668 jiwa (17,63 persen), ijazah SMA/ sederajat 602 jiwa (15,88 persen), ijazah D-4/S-1 sebanyak 239 jiwa (6,31 persen) dan D-1/D-2/D-3 sebanyak 68 jiwa (6,31 persen), dan S-2 sebanyak 5 jiwa (0,13 persen).

Dari jumlah penduduk berdasarkan keikutsertaan JKN-KIS/BPJS Kesehatan, terdapat 1.707 jiwa yang tidak mengikuti keikutsertaan. 1.420 jiwa merupakan penerima bantuan iuran yang tersebar proporsional di setiap

dusun. Sebanyak 117 jiwa tercatat sebagai peserta mandiri, 541 jiwa sebagai PUIK Negara dan 5 jiwa sebagai PUIK Swasta.

Jumlah keluarga berdasarkan partisipasi organisasi di Kelurahan Mosso terbagi dalam 7 kategori keikutsertaan, yakni kelompok tani, kelompok nelayan/budidaya, kelompok buruh, ormas/ormas keagamaan, kelompok pengajian, kegiatan gotong royong, dan kelompok seni budaya. Berdasarkan dari total jumlah keluarga di Kelurahan Mosso yakni sebanyak 122 keluarga, di dalamnya terdapat keluarga yang memang mengikuti satu atau lebih organisasi sekaligus. Meskipun begitu, kategori kelompok nelayan/budidaya masih menjadi kategori terbanyak di antara kategori keikutsertaan organisasi lainnya. Adapun untuk jumlah keluarga yang termasuk anggota kelompok nelayan/budi daya di Kelurahan Mosso sebanyak 85 keluarga. Kemudian diikuti pada kelompok tani sebanyak 27 keluarga, kelompok ormas/ormas keagamaan sebanyak 5 keluarga. Pada kategori keikutsertaan kelompok buruh, Labuang Utara menjadi satu satunya dusun yang penduduknya menjadi anggota kelompok buruh yakni sebanyak 2 keluarga. Sementara itu, pada kategori keikutsertaan kelompok pengajian, Somba Selatan menjadi satu-satunya dusun yang penduduknya menjadi anggota kelompok buruh yakni sebanyak 1 keluarga. Selanjutnya, pada kategori keikutsertaan kegiatan gotong-royong, Labuang Selatan menjadi satu satunya dusun yang penduduknya mengikuti kegiatan gotong royong yakni sebanyak 1 keluarga. Berikutnya, pada kategori keikutsertaan kelompok seni/budaya, Labuang juga menjadi satu satunya dusun yang penduduknya menjadi anggota kelompok seni/budaya yakni sebanyak 1 keluarga.

Jumlah keluarga berdasarkan tempat membuang sampah di Kelurahan Moss dibagi menjadi 6 (enam) kategori, yakni sungai, jurang, bakar, kubur, laut dan pantai, dan tempat pembuangan sampah (TPS). Terdapat 685 keluarga yang membuang sampah di laut dan pantai, 133 keluarga yang membuang sampah dengan cara dibakar, 94 keluarga yang membuang sampah di sungai, 48 keluarga yang membuang sampah di tempat pembuangan sampah (TPS), 5 keluarga yang mengubur sampah, dan 2 keluarga yang membuang sampahnya ke jurang..

An aerial photograph of a coastal village with a blue overlay. The village features numerous houses with colorful roofs (red, blue, green) and is situated along a shoreline. The water is visible in the upper and right portions of the image. The text is centered over the image.

Bagian 1 PENDAHULUAN

Monografi Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana
Kabupaten Majene
Provinsi Sulawesi Barat

PENDAHULUAN

Dalam pembangunan pedesaan, permasalahan umum yang sering kali ditemukan adalah ketiadaan data presisi (Sjaf, 2019). Padahal data presisi sangat dibutuhkan dan penting untuk ketepatan dalam perencanaan dan implementasi pembangunan pertanian dan pedesaan. Ketidakakuratan dalam mengidentifikasi potensi desa dan kemauan untuk membangun data presisi membuat dokumen penting pembangunan desa, baik Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) hanya sekedar dokumen pembangunan pedesaan yang tidak memiliki makna bagi kesejatian pembangunan pedesaan. Inilah yang menyebabkan mengapa pembangunan pedesaan jauh dari pencapaian target yang diharapkan.

Menjawab persoalan data desa, gagasan Data Desa Presisi dengan metodologi *Drone Participatory Mapping* menjadi alternatif dalam membuka akses bagi desa untuk mampu berdaya membangun data desanya (Sjaf et al., 2020). *Drone Participatory Mapping* merupakan metodologi yang inklusif yang menempatkan pemerintah desa dan pemuda desa sebagai subjek membangun data. Pendekatan yang digunakan adalah sintesis dari pendekatan spasial, sensus, partisipasi dan teknologi digital.

Data Desa Presisi adalah jalan keluar dari kebuntuan desa dalam merencanakan pembangunan desa yang tepat sasaran dan tertarget. Serta data desa presisi menjadi ruang bagi desa untuk mampu dan berdaya dalam membangun datanya sendiri yang akurat, aktual dan kontekstual. Data Desa Presisi didedikasikan untuk Desa sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan berbagai pihak dan mengedepankan kerja-kerja kolaboratif antara perguruan tinggi, pemerintahan desa dan pemudanya, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, pihak swasta maupun NGO.

Data Desa Presisi merupakan gagasan yang dilahirkembangkan oleh Dr. Sofyan Sjaf dan kawan-kawan sejak tahun 2014 pasca lahirnya UU No 6 tahun 2014 tentang Desa dan terus disempurnakan hingga saat ini. Dalam proses membangun data desa presisi dilakukan dengan pendekatan *Drone Participatory Mapping* (DPM). DPM adalah pendekatan pengumpulan data desa presisi tinggi yang mempertimbangkan dimensi spasial, teknologi tinggi, digital, dan partisipasi. Penggunaan *drone* dengan pelibatan warga desa diperuntukkan menghasilkan citra resolusi tinggi untuk kepentingan data spasial yang selama ini belum dimiliki desa. Dengan sentuhan partisipasi warga, data spasial yang diperoleh digunakan untuk memperoleh data tematik persil (demografi, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lain-lain), peta desa

sesuai aturan yang berlaku (administrasi, batas desa, infrastruktur, topografi, penggunaan lahan, dan lain-lain), verifikasi data potensi desa, estimasi maupun proksi pembangunan desa berbasis lahan, daya dukung desa, pembangunan infrastruktur, dan lain-lain. Lebih dari itu, *database* yang diperoleh dari data spasial dapat dijadikan sebagai basis menyusun *artificial intelligence* Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes). Dengan demikian, ukuran-ukuran perencanaan dan pembangunan desa memiliki presisi tinggi yang dapat menghalau terjadinya manipulasi data dan anggaran yang bersumber dari aras desa maupun supra desa. Bahkan melalui Data Desa Presisi kebutuhan desa untuk mengukur capaian pembangunan berkelanjutan (SDGS) dapat dihasilkan secara presisi berbasis Rukun Warga (RW) dan dapat ditelusuri hingga aras keluarga, *by name*, *by address* dan *by coordinate* (Sjaf et al., 2021).

Dengan pendekatan DPM ini dihasilkan Data Desa Presisi yang diterjemahkan dalam sebuah buku Monografi Desa yang menyuguhkan informasi dan data yang komprehensif yang disajikan ke dalam beberapa bab yaitu: Bab 2. Geografis Desa yang menampilkan peta-peta utama desa (peta orthophoto, peta administrasi, peta *landuse*, peta sarana prasarana dan peta topografi); Bab 3. Demografi yang menampilkan data-data kependudukan termasuk di dalamnya analisis data terkait dengan piramida penduduk, kepadatan penduduk, serta rasio beban tanggungan; Bab 4. Sandang Pangan dan Papan yang menampilkan data terkait dengan aksesibilitas keluarga terhadap pemenuhan sandang, pangan dan papan; Bab 5. Pendidikan dan Kebudayaan yang menampilkan data-data terkait sebaran tingkat pendidikan penduduk desa, partisipasi sekolah serta sebaran penduduk berdasarkan agama yang dianut dan etnisitasnya; Bab 6. Kesehatan, Pekerjaan dan Jaminan Sosial menampilkan data-data tentang sebaran penduduk berdasarkan pekerjaan, pekerjaan sampingan keterampilan sampai dengan aksesibilitas penduduk terhadap jaminan sosial dan kesehatan; Bab 7. Sosial, Hukum dan HAM menyajikan data-data tentang partisipasi berorganisasi dan aksesibilitas atas kebutuhan akan hiburan (*refreshing*); dan terakhir Bab 8. Infrastruktur dan Lingkungan Hidup menyajikan data-data tentang aksesibilitas keluarga pada media informasi, alat telekomunikasi sampai dengan biodiversitas lahan pekarangan.

Dengan demikian data yang terjadi pada buku Monografi Desa ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi para akademisi, peneliti, pegiat desa, pemberdayaan masyarakat, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga pemerintah desa sendiri, untuk dapat dijadikan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan desa.

RUMUSAN MASALAH

Sjaf (2020) menyampaikan bahwa terdapat 4 masalah utama yang dihadapi desa terkait dengan pembangunan pedesaan yaitu (1) desa maupun kawasan pedesaan tidak memiliki peta visual yang menggambarkan secara utuh sumberdaya desa. Kondisi ini disebabkan keterbatasan dan minimnya akses desa terhadap data spasial. Alhasil, perencanaan pembangunan desa yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes) maupun program-program pembangunan dan bantuan tidak pernah sesuai dengan konteks kebutuhan dan tata ruang desa; (2) belum tuntasnya tapal batas dan akurasi luas desa-desa di Indonesia menyebabkan maraknya konflik vertikal ataupun horizontal; (3) lemahnya instrumen pendeteksian daya dukung desa menyebabkan desa tak mampu menolak dan melawan tekanan kapitalisasi desa; dan (4) tidak ditemukannya instrumen untuk perencanaan dan pengawasan pembangunan desa. Sjaf (2017); Sampean et al. (2019); Sjaf (2019) berpandangan bahwa dengan menjalankan amanat yang telah tertuang dalam UU No. 6/2014, maka dengan serta merta akan menjawab masalah yang dihadapi ketika membangun desa maupun desa membangun. Oleh karena itu, prasyarat penguatan kapasitas aparat dan warga desa merupakan agenda penting untuk menjalankan amanat sekaligus menyelesaikan persoalan yang dihadapi desa dan kawasan pedesaan.

Perkembangan teknologi yang pesat kini tentunya menjadi keuntungan bagi masyarakat tergantung bagaimana kita mengambil peran dalam pemanfaatan teknologi tersebut. Sjaf (2020) menyebutkan dalam rangka menjalankan amanat UU No. 6/2014 dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi pemangku desa tersebut, maka dibutuhkan suatu inovasi yang mampu mendorong terciptanya perubahan mendasar pembangunan desa dan kawasan pedesaan.

Berdasarkan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa, terdapat tujuh isu strategis yang membutuhkan data desa presisi. Berikut ini adalah ketujuh isu strategis desa, yaitu: (1) Penataan desa; (2) Perencanaan desa; (3) Kerja sama desa; (4) Investasi masuk desa; (5) BUMDes/BUMDes Bersama; (6) Kejadian luar biasa dan (7) Aset desa. Ketujuh isu strategis tersebut hanya dapat berjalan dengan baik jika berlandaskan data desa presisi (lihat **Tabel 1**). Berikut adalah peran data desa presisi untuk mewujudkan amanat undang-undang desa.

Tabel 1 Tujuh isu strategis desa yang membutuhkan Data Desa Presisi

No	Isu Strategis	Peran Data Desa Presisi
1	Penataan desa	Menyajikan peta tematik, dan menjamin transparansi serta akuntabilitas
2	Perencanaan desa	Memberikan akurasi data, membuka ruang partisipasi warga, mendorong RPJMDes dan RKPDes yang tepat kebutuhan desa
3	Kerja sama desa	Menyajikan potensi desa secara utuh: vegetasi, sebaran komoditi, potensi ekonomi kawasan, kelembagaan kawasan, pola kerjasama antar desa
4	Investasi masuk desa	Menjadi dasar model pengembangan bisnis, sistem informasi desa/kawasan perdesaan, dan promosi desa
5	BUMDes/BUMDes Bersama	Menjadi dasar model bisnis yang berbasis SDA lokal, sebaran unit usaha, manajemen pengelolaan, dan kerja sama
6	Kejadian luar biasa	Menyajikan potensi bencana desa, rob, kerusakan ekosistem/ekologis
7	Aset desa	Menyajikan data posisi dan potensi aset, jumlah luasan serta peta sebaran aset dan pemanfaatannya.

Sumber: (Sjaf *et al.* 2020; Sjaf *et al.* 2022)

Inovasi Data Desa Presisi diwujudkan melalui suatu pendekatan *drone participatory mapping*. Pendekatan ini mampu membuka ruang partisipasi seluas bagi pemangku desa dan warganya untuk bersama-sama mewujudkan “desa membangun” maupun “membangun desa” berbasis data yang presisi. *Drone Participatory Mapping* adalah pendekatan pengumpulan data desa presisi yang mempertimbangkan dimensi spasial, teknologi tinggi, digital, dan partisipasi. Penggunaan *drone* dengan melibatkan warga desa diperuntukkan menghasilkan citra resolusi tinggi untuk kepentingan data spasial yang selama ini belum dimiliki desa. Dengan sentuhan partisipasi warga, data spasial serta data sensus yang diperoleh digunakan untuk memperoleh data tematik persil (demografi, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lain-lain), peta desa sesuai aturan yang berlaku (administrasi, batas desa, infrastruktur, topografi, penggunaan lahan, dan lain-lain), verifikasi data potensi desa, estimasi maupun proksi pembangunan desa berbasis lahan, daya dukung desa, pembangunan infrastruktur, dan lain-lain. Lebih dari itu, *database* yang diperoleh dari data spasial dapat dijadikan sebagai basis menyusun *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)* dan *Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDes)*. Dengan demikian, ukuran-ukuran perencanaan dan pembangunan desa memiliki presisi tinggi yang dapat menghalau terjadinya manipulasi data dan anggaran yang bersumber dari aras desa maupun supradesa.

Sebagai upaya menyudahi permasalahan utama yang dihadapi desa dalam pembangunan pedesaan dibutuhkan basis data yang akurat dan presisi melalui inovasi Data Desa Presisi. Data Desa Presisi diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh atas permasalahan dan potensi desa yang selanjutnya dijadikan sebagai basis perencanaan pembangunan desa. Berikut adalah rumusan masalah yang perlu di jawab melalui Data Desa Presisi di Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat:

1. Bagaimana kondisi geografis Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat?
2. Bagaimana kondisi demografis Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat?
3. Bagaimana kondisi pemenuhan sandang, pangan dan papan masyarakat Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat?
4. Bagaimana kondisi pendidikan dan kebudayaan Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat?
5. Bagaimana kondisi kesehatan, pekerjaan dan jaminan sosial Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat?
6. Bagaimana kondisi kehidupan sosial, perlindungan hukum dan HAM Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat?
7. Bagaimana kondisi infrastruktur dan lingkungan hidup Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat?
8. Bagaimana dinamika di Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat?

TUJUAN PENDATAAN

Pembangunan Data Desa Presisi di Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat bertujuan untuk:

1. Mengetahui kondisi geografis Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat.
2. Mengetahui kondisi demografis Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat.
3. Mengetahui kondisi pemenuhan sandang, pangan, dan papan masyarakat Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat.
4. Mengetahui kondisi pendidikan dan kebudayaan Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat.
5. Mengetahui kondisi kesehatan, pekerjaan dan jaminan sosial Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat.
6. Mengetahui kondisi kehidupan sosial, perlindungan hukum dan HAM Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat.
7. Mengetahui kondisi infrastruktur dan lingkungan hidup Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat.
8. Mengetahui dinamika di Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat.



METODOLOGI

Pengukuran-pengukuran pembangunan diproduksi dan direproduksi pemerintah, seperti: Indeks Gini Rasio/IGR, Indeks Pembangunan Manusia/IPM, Indeks Pembangunan Desa/IPD, Indeks Desa Membangun/IDM, Indeks Pembangunan Pemuda/IPP dan lain-lain (Chambers 1995; Chambers 2006; Chambers 2008; Chambers 2013; Ruslan 2019), bertujuan untuk melihat pencapaian program pembangunan yang menyejahterakan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Sjaf 2017; Sampean *et al.* 2019; Sjaf 2019; Sampean dan Sjaf 2020; Sjaf *et al.* 2021). Namun demikian, pengukuran pembangunan tidak akan pernah mencapai tujuannya, apabila data yang dijadikan sebagai rujukan perhitungan tidak akurat. Alhasil, pseudo pembangunan akan terus berlanjut dan berdampak terhadap kegagalan pembangunan (Chambers 2008).

Ketidakakuratan pengukuran capaian pembangunan disebabkan karena pengumpulan data dasar yang tidak partisipatif dan dikumpulkan berdasarkan pengakuan pemerintah desa (Sjaf 2019). Ketidakakuratan data dasar Pemerintah Indonesia diperlihatkan dari Data Potensi Desa (Podes) tahun 2018 sekitar 10,4% pertanyaan tidak terisi dari 849 pertanyaan dan data Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) Tahun 2020 sekitar 62—65% pertanyaan tidak terisi dari 939 pertanyaan (Pitaloka 2022). Hal senada ditemukan ketidakakuratan data diperoleh dari hasil sensus *National Sample Survey Office* (NSSO) pemerintah India tingkat ketimpangan gender yang tidak merepresentasikan kondisi aktual pedesaan di India (Mehta 2021).

Dalam konteks pembangunan di Indonesia, pedesaan memainkan peran penting sebagai representatif kehidupan warga atau subyek pembangunan (Sampean *et al.* 2019; Sampean dan Sjaf 2020). Oleh karena itu, data yang akurat sangat penting dan menentukan masa depan pedesaan, serta perwujudan tujuan pembangunan. Dengan demikian, keakurasian data memegang peran penting dalam pengambilan keputusan, kebijakan dan program pembangunan (Sjaf 2019; Sjaf *et al.* 2022).

Saat ini, perencanaan dan pengukuran pembangunan pedesaan di Indonesia menggunakan basis data Podes yang bersumber pada BPS merujuk pada aturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik (UU No. 16/1997), Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pendataan Potensi Desa Tahun 2018 (Perka BPS 49/2018), Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 Tentang Badan Pusat Statistik (Perpres No. 86/2007) dan Prodeskel bersumber dari Kementerian Dalam Negeri yang merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Manajemen Pendataan Profil Desa dan Kelurahan (Permendagri

No. 12/2007)(Kemendagri 2012; BPS 2021; Pitaloka *et al.* 2022). Selanjutnya kedua sumber data ini, menggunakan pendekatan sensus dengan responden aparat pemerintah desa (kepala desa/sekretaris desa/kepala urusan data desa).

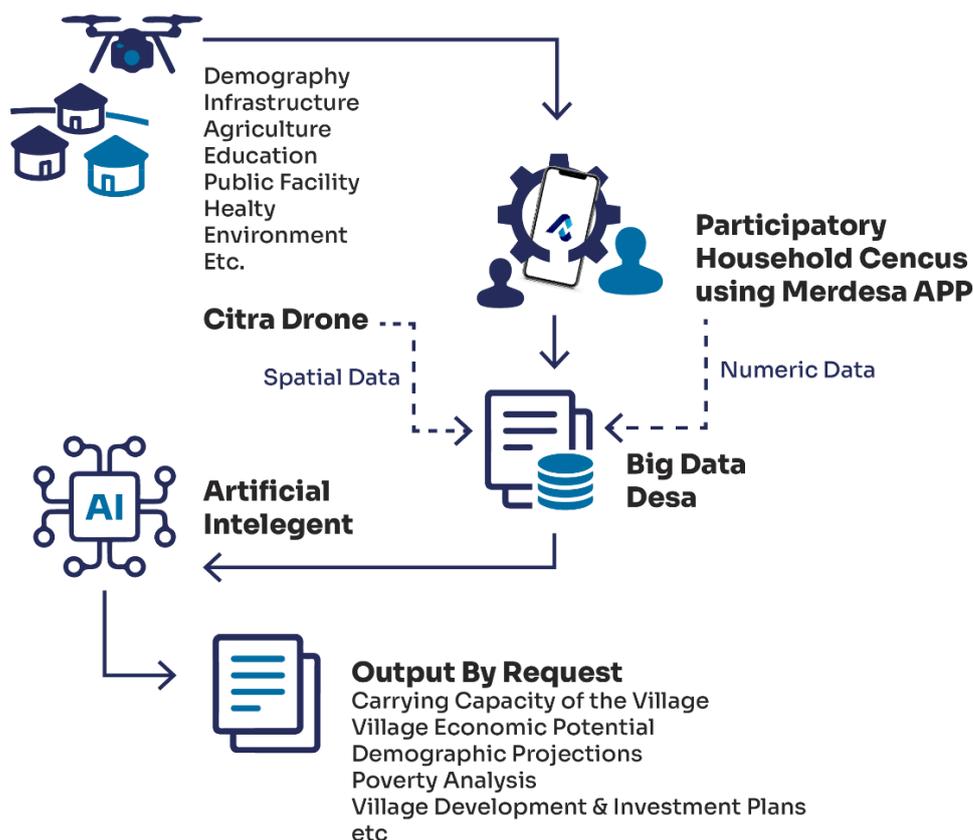
Berbeda dengan pendekatan Podes dan Prodeskel, DDP menggunakan pendekatan sensus berbasis digital yang dikawinkan dengan pendekatan spasial, serta memosisikan warga (pemuda) desa sebagai aktor pengumpul data di desa (enumerator). Selain itu, DDP menempatkan kepala keluarga sebagai responden dalam pengumpulan data.

Penggunaan Metode DDP

Penyusunan Monografi Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene menggunakan Metode DDP(Sjaf *et al.* 2022). Metode ini menitikberatkan pendekatan inklusif yang menempatkan relasi antara manusia dan teknologi untuk melakukan pengumpulan data pedesaan dengan mempertimbangkan dimensi spasial, teknologi digital, partisipasi warga dan sensus (Sjaf 2019; Sjaf *et al.* 2020; Sjaf *et al.* 2022).

Penggunaan metode DDP, untuk menggali beragam parameter yang dikategorikan ke dalam lima aspek kesejahteraan rakyat, meliputi: sandang, pangan dan papan (61 parameter); pendidikan dan kebudayaan (5 parameter); kesehatan, pekerjaan dan jaminan sosial (44 parameter); kehidupan sosial, perlindungan hukum dan HAM (22 parameter); serta infrastruktur dan lingkungan hidup (20 parameter). Selain itu, terdapat 24 parameter identitas keluarga yang berfungsi menerangkan informasi responden (Sjaf *et al.* 2020; Sjaf *et al.* 2022)

Untuk mengimplementasikan metode DDP, dilakukan melalui lima tahapan: (1) memproduksi citra resolusi tinggi. Instrumen yang digunakan pada tahap ini adalah teknologi *drone* untuk menghasilkan citra resolusi tinggi; (2) melakukan sensus rumah tangga berbasis partisipatif. Pada tahap ini, keterlibatan pemuda desa sangat penting. Sebelum pengambilan data, dilakukan rekrutmen pemuda desa di setiap Rukun Warga (RW). Mereka yang direkomendasikan pemerintah desa dilatih untuk menggunakan instrumen aplikasi Merdesa Sensus yang kami ciptakan; (3) penyimpanan data (numerik dan spasial). Tahap ini, semua data (numerik dan spasial) disimpan ke dalam server; (4) penyusunan algoritma ukuran pembangunan desa (Sjaf *et al.* 2022). Tahap ini diorientasikan untuk membangun *artificial intelligence* bagi pembangunan desa; dan (5) membangun aplikasi digital untuk menjawab kebutuhan desa.



Gambar 1 Tahapan implementasi DDP

Selanjutnya dari **5 tahapan** di atas, penggunaan metode DDP dikelompokkan ke dalam tiga aktivitas, yaitu: aktivitas pemetaan berbasis *drone* (spasial); aktivitas sensus partisipatif berbasis digital; dan aktivitas penyusunan *artificial intelligence* berbasis kebutuhan desa. Adapun uraian ketiga aktivitas yang dimaksud, sebagai berikut:

1. Aktivitas pemetaan berbasis drone dan citra satelit (spasial)

Aktivitas ini dimulai dari mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas pemetaan berbasis drone dan citra satelit yang dilakukan secara partisipatif, seperti: *review* dokumen laporan, penyediaan alat dan bahan survei lapangan, dan lanskap/satuan lahan (Arham *et al.* 2019). Penyusunan survei dalam riset ini bertujuan memperoleh gambaran wilayah secara keseluruhan melalui pengumpulan informasi dari data dan peta yang tersedia/relevan, sehingga dapat membantu analisis dan pelaksanaan survei di lapangan. Kedua, interpretasi bentang alam/satuan lahan dari data DEM dan citra penginderaan jauh. Satuan wilayah dan ruang yang digunakan sebagai dasar perencanaan lapangan dan penyusunan peta desa sebagai bahan kajian untuk mendukung terbentuknya DDP. Sebelum melakukan survei perlu

dipersiapkan bahan dan peralatan agar dalam pelaksanaan survei dapat berjalan dengan baik. Peralatan dan bahan yang digunakan antara lain:

- Peta lokasi kegiatan (sumber: BIG);
- Citra satelit landsat (sumber: SasPlanet);
- Peta desain rencana penerbangan *drone*;
- Komputer dan Laptop yang dilengkapi oleh *software* pendukung pemetaan spasial seperti *ArcGIS Desktop*, *Global Mapper*, *Google Earth*, dan *AgisoftPhotoscan*;
- *Drone Quad Copter DJI Mavic 2 Pro* dan perlengkapan pendukungnya;
- *Mobile Phone* yang dilengkapi oleh aplikasi seperti; DJIGO4, Pix4D capture, DJI+Ctrl, Avenza Mapps dan Merdesa Maps; dan
- Global Positioning System (GPS) Handle: GPSMap 64s Garmin.

1.1. Pelaksanaan Survei

Pelaksanaan survei merupakan proses pengumpulan data lapangan yang merupakan rangkaian kegiatan utama pengumpulan data spasial dalam membangun DDP. Tahapan pengumpulan data lapangan meliputi:

- 1) *Focus Group Discussion* (FGD) bersama perangkat dan masyarakat desa;
- 2) Pelacakan dan penitikan batas desa dan RW bersama masyarakat dan perangkat desa setempat dan perwakilan desa yang bertetangga;
- 3) Pemotretan udara wilayah desa menggunakan *drone*;
- 4) Pelacakan dan penitikan sarana dan prasarana umum di wilayah desa;
- 5) Identifikasi *biodiversity* kategori tanaman pohon, semai dan tanaman bawah;
- 6) FGD verifikasi data spasial desa; dan
- 7) Pembuatan peta kerja berbasis RW.

1.2. Pengolahan dan Analisis Data Spasial

Pengolahan dan analisis data spasial merupakan proses interpretasi data hasil survei lapangan dan data pendukung lainnya untuk menampilkan DDP secara geostatistik. Tahapan proses pengolahan dan analisis data spasial meliputi:

- 1) *Plotting* data tapal batas desa dan RW, identifikasi sarana dan prasarana serta *biodiversity* desa;
- 2) Mosaik foto udara;
- 3) Koreksi hasil citra *drone*;
- 4) Digitasi citra *drone* tegak dan citra satelit tegak; dan
- 5) Pembuatan peta desa.

Analisis data spasial disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan desa, misalnya analisis kebencanaan, tata ruang desa, potensi sumberdaya alam desa, analisis SDGs, dan lain-lain.

2. Aktivitas Sensus Partisipatif Berbasis Digital

Pendekatan sensus dalam membangun DDP adalah tindak lanjut dari pendekatan spasial. Peta kerja yang menjadi *output* pendekatan spasial dijadikan sebagai pedoman dalam pendekatan sensus. Hal ini menjadi upaya meminimalisir individu tahu setiap jiwa di desa yang terlewatkan untuk didata. Beberapa tahapan yang dilakukan oleh pendekatan sensus yaitu: persiapan, pelaksanaan sensus dan validasi data hasil sensus.

2.1 Persiapan Sensus dan Partisipatoris

Pada tahapan awal tim melakukan pelatihan kepada para pemuda desa perwakilan dari lingkup RW. Masing-masing RW akan direkrut 3-5 orang pemuda desa yang akan dilibatkan dalam proses sensus. Pelatihan dan peningkatan kapasitas dilakukan dengan memberikan orientasi tentang pentingnya DDP sebagai dasar perencanaan pembangunan, peningkatan kapasitas secara teknis dalam mengaplikasikan MERDESA Apps untuk melakukan sensus, penguatan pemahaman dalam membaca peta kerja di MERDESA Apps, dan peningkatan pemahaman *metadata*/definisi operasional parameter sensus. Pemuda desa ini nantinya akan dilibatkan dalam proses pengambilan data sensus ke setiap rumah tangga berbasis alamat, nama, dan titik koordinat di setiap RW.

Selain mempersiapkan sumber daya manusia dalam pelaksanaan sensus. Tim peneliti membangun koordinasi kepada pihak desa untuk mempersiapkan pelaksanaan FGD. Tahapan ini, FGD dipersiapkan untuk menggali atau mengumpulkan data kualitatif desa secara partisipatif. Data kualitatif terdiri dari sejarah lokal desa, kalender musim, stratifikasi sosial, potensi ekonomi desa, kelembagaan desa, dan pohon masalah (Barlan *et al.* 2020). Dalam proses pengumpulan data kualitatif melibatkan narasumber dari tokoh-tokoh masyarakat memahami kondisi historis dan aktual kondisi desa. Kepentingan pengumpulan data kualitatif untuk mengeksplorasi ingatan kolektif warga dalam memahami situasinya desanya (Talawanich *et al.* 2019).

2.2 Pelaksanaan Sensus dan Partisipatoris

Tahapan ini dilakukan oleh para pemuda desa (enumerator) perwakilan dari setiap RW untuk mendata setiap jiwa dalam rumah tangga (sensus) yang berada di wilayah masing-masing RW. Dalam proses sensus, enumerator dibekali dengan MERDESA Sensus yang dapat diakses melalui android milik enumerator. Masing-masing enumerator akan mendatangi

setiap rumah tangga dengan menanyakan berbagai pertanyaan tentang status bangunan, identitas responden, data kepemilikan lahan, partisipasi dalam kegiatan desa, etnis, tingkat konsumsi, pekerjaan, pekerjaan sampingan, jumlah anggota rumah tangga, usia anggota rumah tangga, jumlah KK dalam rumah tangga, penyakit yang diderita, aksesibilitas pada asuransi kesehatan, sanitasi, komunikasi, kondisi tempat tinggal, frekuensi makan, menu makan, bahan bakar masak, sumber air mencuci, riwayat komoditas yang diusahakan, pendapatan non pertanian, rata-rata pengeluaran rumah tangga, serat titik koordinat rumah warga yang teridentifikasi secara otomatis dalam MERDESA Sensus. Deskripsi parameter sensus dengan Merdesa Sensus Aplikasi ditampilkan pada Tabel 2.

Tabel 2 Parameter sensus dengan Merdesa Sensus Aplikasi

Sasaran Pertanyaan	Variabel	Jumlah parameter (pertanyaan)	Keterangan
Kepala Keluarga dan Keluarga secara Umum	Identitas Keluarga	22	Terkait identitas kepala keluarga, identitas keluarga
	Pendidikan dan Kebudayaan	5	Terkait pendidikan, etnis, agama, status pendidikan, dan biaya pendidikan
	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	9	Kondisi pekarangan rumah, aset ekonomi yang dimiliki, tempat pembuangan sampah, kepemilikan alat komunikasi
	Kehidupan Sosial, Perlindungan Hukum, dan HAM	22	Status tinggal, program bantuan dan jaminan, biaya-biaya bulanan, jumlah aset kendaraan, partisipasi organisasi, hiburan, keagamaan
	Kesehatan Pekerjaan dan Jaminan Sosial	36	Pekerjaan, jaminan sosial, penyakit, program kesehatan, akses dan komoditas lahan pertanian, kepemilikan ternak
	Sandang, Pangan, dan Papan	61	Jumlah pangan, tempat tinggal, sandang
	Pertanyaan Khusus Nelayan	19	Tipe nelayan, teknik budidaya dan tangkap, jenis alat tangkap, jenis ikan yang dibudidaya/ditangkap
Terkait Anggota Keluarga	Identitas Anggota Keluarga	8	Terkait identitas anggota keluarga, identitas keluarga
	Pendidikan dan Kebudayaan	5	Terkait pendidikan, etnis, agama, status pendidikan
	Kesehatan Pekerjaan dan Jaminan Sosial	17	Pekerjaan dan kesehatan. Titik tekan kepada pemberantasan <i>stunting</i> .
	Kehidupan Sosial, Perlindungan Hukum, dan HAM	1	Partisipasi organisasi

Selama proses sensus berlangsung, tim melakukan pengawasan dan evaluasi data yang ter-*input* dalam server, memastikan data yang ter-*input* sudah valid. Proses pengawasan dan evaluasi data sensus dilakukan oleh supervisi di dalam Aplikasi Merdesa Sensus dan secara berkala dilakukan pertemuan tatap muka dengan para enumerator desa untuk memastikan proses sensus berjalan baik.

3. Metode Validasi Data

Integrasi data spasial dan data numerik dalam metode DDP diawali dari penggunaan peta kerja yang dimasukkan ke dalam aplikasi Sensus MERDESA (peta kerja digital). Peta kerja digital tersebut berfungsi sebagai navigasi enumerator sosial dalam melakukan penelusuran setiap rumah dan bangunan yang ada di pedesaan. Peta kerja digital ini merupakan informasi spasial sebaran pemukiman dan bangunan lainnya dalam satuan RW/Dusun/Lingkungan di pedesaan. Data yang ditampilkan pada peta tersebut, meliputi: nama provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa, kode desa, kode pemukiman dan bangunan lainnya, dan titik koordinat (*longitude/latitude*).

Teknik penggunaan peta kerja digital berfungsi apabila enumerator sosial berada pada titik koordinat kode rumah dan bangunan lain yang sudah diberi *pin-point*. Informasi spasial dari data ini merupakan hasil digitasi persil bangunan melalui citra *drone* terkoreksi secara geometrik. Basis pemberian kode pada setiap bangunan adalah bentuk atap tegak lurus terhadap permukaan bumi. Dengan teknik ini, maka jumlah total bangunan teridentifikasi secara keseluruhan berdasarkan kode tersebut. Namun demikian, setiap kode rumah dan bangunan lain yang teridentifikasi tersebut belum dapat dipastikan dengan tepat, apakah basis atap yang digunakan sudah sesuai dengan jumlah bangunan per unit atau masih gabungan unit. Adapun validasi untuk memastikan hal tersebut, melalui hasil verifikasi dari enumerator sosial yang melakukan sensus untuk memastikan bahwa setiap kode sudah sesuai atau belum. Beberapa kemungkinan hasil verifikasi yang dilakukan, seperti: satu kode bangunan bisa jadi lebih dari satu bangunan. Atau sebaliknya, dua atau lebih kode bangunan yang ada bisa jadi satu kode bangunan.

Selanjutnya hasil verifikasi enumerator sosial terhadap peta kerja awal yang dibuat tim spasial, divalidasi kembali untuk memastikan bahwa setiap kode bangunan yang diberikan sudah sesuai dengan kondisi di lapangan. Validasi ini mempertegas identifikasi kode bangunan yang dihuni warga atau tidak dihuni warga. Setelah verifikasi dan validasi dilakukan, informasi hasil sensus disajikan secara geostatistik sesuai kategori tematik yang dibutuhkan.

Proses integrasi data spasial dan numerik ini, tidak lain untuk menghasilkan DDP berbasis keluarga di setiap RW/dusun/lingkungan di pedesaan.

Untuk metode validasi data sosial dilakukan melalui: pertama, sensus yang berpedoman peta kerja digital berbasis RW. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, peta kerja digital berfungsi sebagai navigasi enumerator sosial untuk melakukan sensus secara *door to door*. Peta kerja ini juga mampu memverifikasi dan memvalidasi bangunan dan rumah tangga yang tidak terdigitasi; kedua, perekrutan pemuda desa sebagai enumerator sosial berbasis RW. Tujuan rekrutmen enumerator sosial berbasis RW dari pemuda desa adalah pelibatan warga sebagai subyek yang memiliki pemahaman tata ruang desa, kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat desa, serta adanya transformasi pengetahuan dari perguruan tinggi ke warga; dan ketiga, pendampingan intensif oleh supervisor sensus. Pendampingan intensif dimulai dari proses pelatihan kepada enumerator sosial, mengorganisir enumerator sosial, perencanaan strategi penyelesaian sensus, *monitoring*, mengevaluasi, mengonfirmasi data-data yang kurang valid selama proses sensus, sampai dengan penyusunan *output* DDP.

4. Aktivitas Penyusunan *Artificial Intelligence*

4.1 Pengolahan dan Penyusunan Perencanaan Pembangunan

Pada makalah ini, implementasi DDP mengambil studi kasus di Kelurahan Mosso, Kecama. Adapun luaran dari pendekatan spasial adalah berupa peta tematik berbasis citra *drone* dan diverifikasi secara partisipatif oleh warga desa. Adapun luaran dari pendekatan Sensus dan partisipatif berupa kumpulan lembar data yang berisikan keterangan bangunan, identitas keluarga dan individu, serta data terkait parameter sensus yang telah ditetapkan. Data tersebut kemudian diolah dan dikumpulkan dalam bentuk monografi sebagai luaran yang dapat disajikan secara info grafik dalam bentuk peta dasar, dan peta tematik. Lembar data yang ada dapat dianalisis lebih lanjut untuk berbagai kepentingan.

Lembar data ini menjadi lebih unggul dibandingkan metode pendataan yang dilakukan BPS karena diambil langsung oleh penduduk, serta adanya prosedur yang membuat enumerator harus benar-benar mengambil data secara satu per satu berdasarkan nama, alamat, dan titik koordinat. Begitu pun peta yang dihasilkan dari pendekatan spasial menjadi lebih unggul dibandingkan luaran data spasial BIG dikarenakan penentuan batas desa, RW, bahkan hingga RT, diverifikasi langsung oleh penduduk desa sebagaimana ketetapan atau aturan yang sudah ada dalam kemasyarakatan mereka. Dua keunggulan ini menjadikan DDP dengan pendekatan yang mengintegrasikan

spasial, kuantitatif, maupun kualitatif dapat diandalkan sebagai *baseline* perencanaan pembangunan desa.

4.2 Integrasi Data Spasial dan Sosial

Pendataan DDP menghasilkan data terintegrasi antara data spasial dan data numerik. Pengintegrasian data tersebut memberikan gambaran kondisi aktual desa. Hasil analisis dan pengimplementasi DDP memberikan potret penggunaan lahan terbangun dan non terbangun dalam satuan analisis Rukun Warga (RW) atau satuan lingkungan masyarakat. Selain itu, integrasi data spasial dan sosial juga digambarkan dari hasil sensus berbasis rukun warga yang ditampilkan secara spasial dalam bentuk tematik pada setiap indikator kesejahteraan rakyat. Pada Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, disajikan dalam satuan dusun karena dusun menjadi satuan *sodality* dalam masyarakat karena merepresentasikan ikatan kekeluargaan dan kekerabatan (Tjondronegoro 1984). Dusun adalah sebuah lembaga tradisional di bawah desa yang menjadi ruang bertemunya kepentingan bersama atau ruang mediasi kultural di mana agroekologi budaya dilihat sebagai representasi dari agensi serta tindakan petani, persoalan partisipasi dalam pembangunan pedesaan dapat dilihat secara lebih luas.



TINJAUAN PUSTAKA

Diskursus Metodologi Pendataan Pedesaan

Tulisan ini berupaya menjawab pertanyaan artikel ini melalui diskursus perkembangan metodologi dalam ilmu-ilmu sosial. Secara garis besar metodologi riset penelitian dibagi menjadi tiga metode, kuantitatif, kualitatif, dan *mixed methods*. Pada dekade tahun 1920-1930-an pendekatan kualitatif menjadi metode paling dominan dalam mengkaji kehidupan kelompok manusia. Pada dekade penggunaan metode kualitatif oleh mazhab Chicago di sosiologi mempengaruhi ilmu sosial lainnya termasuk ilmu komunikasi, pendidikan, dan kerja sosial (Denzin dan Lincoln 2009).

Pada dekade 1970-1980-an metode kualitatif mendapatkan kritikan tajam dari berbagai ilmuwan sosial. Metode ini dikritik karena para ilmuwan sosial terjebak dalam subjektivisme dan relativisme *post-modern*. Metode ini sangat kontras dengan pendekatan kuantitatif yang mengedepankan pada objektivitas yang identik dengan ekonomi dan statistik sosial. Metode kuantitatif menjadi dasar dari demografi sejarah dan sosiologi sejarah. Pasca Perang Dunia Kedua, data numerik semakin dibutuhkan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial (Hudson dan Ishizu 2017).

Dekade dikotomi penggunaan metode antara kuantitatif dan kualitatif mengalami kemandekan. Gagasan penggabungan metode keduanya menjadi jalan terbaru dalam menutupi kekurangan masing-masing metode tersebut. Metode campuran (*mixed-methods*) yang menggabungkan metodologi kuantitatif dan kualitatif memberikan peluang saling melengkapi dan mempertemukan prinsip subjektivitas dan objektivitas dalam satuan penelitian yang utuh (Creswell 2016; Creswell dan Clark 2017). Pendekatan ini menjadi dasar pengembangan metode DDP sebagai pendekatan pendataan pedesaan.

Metode DDP sebagai pendekatan dalam *mixed methods* menghasilkan data yang memiliki tingkat akurasi dan ketepatan tinggi untuk memberikan gambaran kondisi aktual desa yang sesungguhnya. Data ini diambil, divalidasi, diverifikasi, dan dikonfirmasi oleh warga desa. Serta, dibantu pihak luar desa (misal Perguruan Tinggi). Membangun dan menghasilkan data yang akurat dan presisi hanya dapat dilakukan dengan *mixed-methods* yang menggabungkan tiga pendekatan yaitu sensus, spasial dan partisipatoris. Gabungan dari ketiga pendekatan tersebut diistilahkan sebagai pendekatan *Drone Participatory Mapping* (DPM) (Sjaf *et al.* 2020; Sjaf *et al.* 2022).

Pendekatan ini dikembangkan sejak tahun 2014 yang sudah mengalami transformasi signifikan dalam penyempurnaan metode dalam pendataan pedesaan. Pendekatan ini mengintegrasikan antara teknologi mutakhir, *drone* dan satelit dengan kualitas citra beresolusi tinggi untuk menghasilkan data spasial. Selain itu, secara teknis dalam pengumpulan dan analisis menggunakan instrumen teknologi digital. Dari pendekatan DPM, sensus dilakukan berbasis data spasial yang dihasilkan dari instrumen *drone* atau

citra satelit beresolusi tinggi, aplikasi *marking object* (untuk mengumpulkan titik koordinat pemukiman, lokasi usaha warga, sebaran biodiversitas desa, serta data kualitatif yang dilakukan dengan pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA)(Sjaf *et al.* 2020; Sjaf *et al.* 2022).

Pendekatan PRA digunakan untuk mengajak *stakeholders* untuk berpartisipasi dalam menilai dan memutuskan program atau kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Chambers 2008; Chambers 2013) Pendekatan PRA menjadikan masyarakat desa sebagai peneliti, perencana dan juga pelaksana program bukan hanya sebagai objek pada proses pelaksanaan pemberdayaan. Pendekatan ini digunakan dalam DDP untuk mengajak masyarakat untuk menilai pembangunan desa, menyusun sejarah desa, menilai kepentingan dan pengaruh kelembagaan desa, dan membuat kalender musim sesuai konteks wilayah masing-masing. Pendekatan PRA digunakan untuk melengkapi data-data kuantitatif (data numerik dan spasial) dalam menghitung IDM dan IPD di pedesaan.

Metode DDP sebagai pendekatan pendataan pedesaan merupakan penyempurnaan pendataan yang telah dilakukan pemerintah. Bahkan, metode DDP sebagai pendekatan baru dalam proses datafikasi dalam mengumpulkan data kependudukan. Hal ini juga berbeda dengan sistem *data mining* (penambangan data) di media sosial, data-data personal dikumpulkan melalui pelacakan algoritma pencarian dan identitas pengguna media sosial. Penambangan data di media masih memiliki ketidakakuratan yang tinggi (*volacity*)(Couldry 2004; Couldry dan Powell 2014; Couldry 2020). Oleh karena itu, metode DDP tidak mengandalkan sepenuhnya teknologi digital sebagai instrumen penelitian dalam membangun *big data*. Tapi, metode DDP tetap menggunakan instrumen manusia dalam pengumpulan, validasi, verifikasi, dan konfirmasi data.

DDP Sebagai Metode dan Pendekatan Baru Pendataan Pedesaan

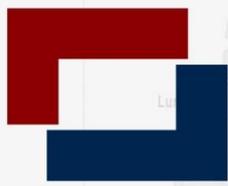
Metode DDP adalah pendekatan inklusif yang menempatkan relasi antara manusia dan teknologi untuk mengumpulkan data desa presisi yang meliputi dimensi spasial, teknologi digital, partisipasi warga dan sensus (Sjaf *et al.* 2020; Sjaf *et al.* 2022). Metode yang mensintesis tiga pendekatan yaitu teknologi drone yang menghasilkan data spasial, sensus menghasilkan data numerik dan *Participatory Rural Appraisal* (PRA) menghasilkan data kualitatif. Sintesis berbagai pendekatan tersebut bertujuan untuk saling menutupi kelemahan pendekatan yang ada. Hal ini sejalan dengan pernyataan Creswell, (2016) bahwa metodologi *mixed-method* dilakukan untuk menghasilkan data yang komprehensif.

DDP sebagai metode dan pendekatan baru dalam pendataan pedesaan menempatkan warga sebagai subjek pendataan, membuka akses warga terhadap data, dan transformasi pengetahuan pendataan dari perguruan

tinggi kepada warga desa. Selain itu, DDP mengutamakan pengorganisasian sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi digital mutakhir. Metode ini sudah selayaknya memberikan kontribusi terhadap perbaikan praktik pembangunan pedesaan dan pengembangan sistem pendataan di Indonesia. Atas dasar ini, metode menjadi salah satu praktik dekolonisasi pendataan pedesaan. Sebab, pendekatan berupaya mengangkat permasalahan-permasalahan lokalitas sebagai basis perencanaan pembangunan. Selain itu, DDP menjadi jalan meracik merumuskan pembangunan pedesaan berbasis kebutuhan dan permasalahan dari berbagai instrumen pengukuran pembangunan. Perumusan, pengukuran, dan analisis pembangunan dilakukan di level terbawah di pedesaan sebagai satuan *sodality* masyarakat yakni di level dukuh/kampung/dusun/rukun warga/satuan lingkungan setempat (Kolopaking *et al.* 2020). *Sodality* merupakan sebagai lingkungan pemenuhan kebutuhan hidup dan lingkungan yang tunduk pada kekuasaan.

Satuan *sodality* ini digunakan DDP dalam perencanaan pembangunan berbasis rumah tangga pedesaan. Perencanaan pembangunan tersebut langsung menysasar permasalahan pokok yang dihadapi dalam rumah tangga pedesaan. Permasalahan pokok tersebut meliputi aspek kesejahteraan rakyat yakni (1) sandang, pangan, papan; (1) pendidikan dan kebudayaan; (3) kesehatan, pekerjaan, dan jaminan sosial; (4) kehidupan sosial, perlindungan hukum dan HAM; (5) infrastruktur dan lingkungan hidup. Lima aspek tersebut menjadi skala prioritas dalam intervensi pembangunan. Oleh karena itu, pendekatan DDP diharapkan menghapus dosa para perencana pembangunan yang selalu bermain dengan angka-angka, mengabaikan kekuatan sumber daya manusia, pertumbuhan tanpa keadilan, dan berorientasi pada implementasi atau realisasi pembangunan dari pada tujuan utamanya (Haq 1976). Dosa-dosa perencana ini hanya bisa dilakukan melalui pendekatan inklusif yang dimulai dari reformasi pendekatan pendataan pedesaan. Pendekatan ini melanjutkan reformasi demokrasi substansial desa melalui DDP (Hakim 2022). Demokrasi substansial dalam pendataan pedesaan artinya membangun sistem pendataan yang inklusif menempatkan warga sebagai subjek pendataan dan pembangunan.

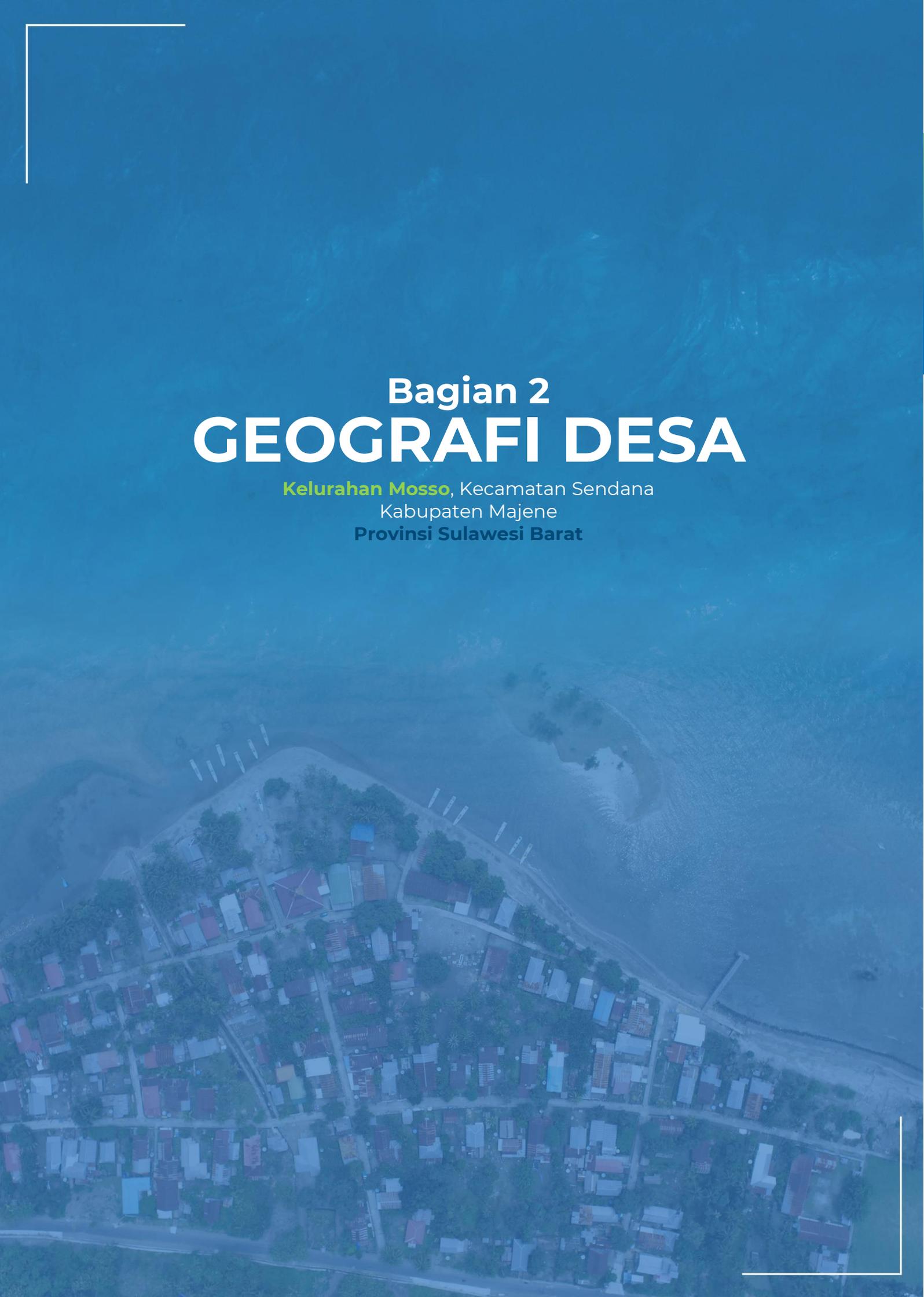
S E L A T
M A K A S S A R



DATA DESA P R E S I S I

— LPPM IPB University —



An aerial photograph of a coastal village with a blue overlay. The village features numerous small buildings with colorful roofs (red, blue, green) and is situated along a shoreline. The water is a deep blue, and the sky is a lighter blue. The text is centered over the image.

Bagian 2 GEOGRAFI DESA

Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana
Kabupaten Majene
Provinsi Sulawesi Barat

GEOGRAFI DESA

A. Sejarah Desa

Alur sejarah merupakan instrument partisipatif untuk menggali informasi kejadian atau peristiwa penting yang dialami oleh masyarakat Kelurahan Mosso serta mengidentifikasi dampak (sosial, ekonomi, dan politik). Alur sejarah atau kejadian penting Kelurahan Mosso disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3 Sejarah Desa

Tahun	Kejadian Penting	Dampak Sosial	Dampak Ekonomi	Dampak Politik
<1945	Jalan poros dibangun	Akses mobilisasi warga menjadi semakin mudah, tidak ada jalan berlubang dan berdebu		
1969	Gempa dan tsunami di Majene	Warga mengalami trauma paska kejadian. Banyak masyarakat yang harus mengungsi karena kerusakan akibat bencana alam, rusaknya infrastruktur desa dan akses jalan terhambat	Masyarakat banyak dirugikan karena banyak rumah hancur, mata pencaharian terhenti karena harus mengungsi selama tiga bulan	
1972-1973	Kemarau berkepanjangan yang terjadi selama satu tahun	Kesulitan untuk mencari nafkah akibat gagal panen sepanjang tahun	Pasokan makanan diambil dari luar wilayah desa sehingga pengeluaran lebih banyak	
1975	Listrik swasta masuk pertama kali	Hadirnya listrik pertama kali sangat membantu masyarakat sebagai sumber penerangan	Biaya listrik yang belum terjangkau untuk masyarakat	
1989	PLN masuk pertama kali	Semakin banyak masyarakat yang mampu menggunakan listrik karena biaya sudah lebih terjangkau	Harga lebih terjangkau untuk masyarakat	
1991	Pemekaran dari Desa Mosso menjadi Kelurahan Mosso	Pelayanan untuk masyarakat menjadi lebih terpusat		
2007	Pemekaran lingkungan Somba Timur dan Somba Utara	Terbentuknya tiga lingkungan baru yaitu Somba Selatan, Somba Tenggara, dan labuang. Pelayanan pada masyarakat menjadi lebih mudah	Pelayanan untuk masyarakat lebih teratur sehingga program pemerintah tersalurkan dengan baik ke masyarakat	
2010	Perubahan kantor kelurahan dari semipermanen ke permanen	Pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih nyaman dan mudah		

Tahun	Kejadian Penting	Dampak Sosial	Dampak Ekonomi	Dampak Politik
2011	Pemekaran Kelurahan Mosso dengan Desa Limbua	Pelayanan untuk masyarakat menjadi lebih terpusat		
2018	Gempa Palu	Banyak masyarakat yang terkena dampak psikis atau trauma saat kejadian serta mengungsi sehingga aktivitas sehari-hari banyak terganggu	Warga harus mengungsi ke gunung selama setengah bulan sehingga tidak bisa mencari nafkah	
2020	Menjadi 7 lingkungan: Pemekaran lingkungan labuang menjadi tiga yaitu Labuang, Labuang Selatan, Labuang Utara.	Pelayanan untuk masyarakat menjadi lebih terpusat		
2021	Penetapan hak milik tanah warga	Berkurangnya sengketa tanah antar warga karena sudah berlandaskan hukum	Warga memiliki sertifikat tanah yang semula kepemilikan tanah hanya berlandaskan psikis kini berubah menjadi berlandaskan hukum	

Desa Mosso mengalami pemekaran menjadi Kelurahan Mosso dengan memiliki dua lingkungan yaitu Lingkungan Somba Timur dan Somba Utara pada 1991. Kemudian pada 2007 terjadi pemekaran di lingkungan Kelurahan Mosso yang semula hanya dua kini menjadi 5 lingkungan karena sebagai salah satu syarat. Dengan tiga lingkungan baru yaitu Somba Selatan, Somba Tenggara, dan Labuang. Dengan hal ini maka pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih mudah karena masyarakat tidak perlu berjalan jauh ke kelurahan jika ada keluhan, cukup di lingkungan masing-masing. Pada 2011 terjadi lagi pemekaran yang cukup luas di beberapa wilayah di Sendana, terutama di Kelurahan Mosso dengan Desa Limbua. Pemekaran lingkungan terakhir terjadi pada 2020 di Lingkungan Labuang. Lingkungan di Kelurahan Mosso bertambah menjadi tiga yaitu Labuang, Labuang Selatan, dan Labuang Utara. Hingga saat ini terdapat 7 lingkungan yang ada di Kelurahan Mosso. Pada 2021 masyarakat di Kelurahan Mosso memiliki sertifikat tanah, yang semula hanya berlandaskan psikologis, kini sudah berlandaskan hukum. Hal ini sangat berdampak pada masyarakat Mosso yang sebelumnya sering terjadi konflik terkait sengketa tanah.

Selain pemekaran wilayah, banyak juga kejadian atau peristiwa yang terjadi di Kelurahan Mosso pada sepanjang sejarahnya, seperti pembangunan

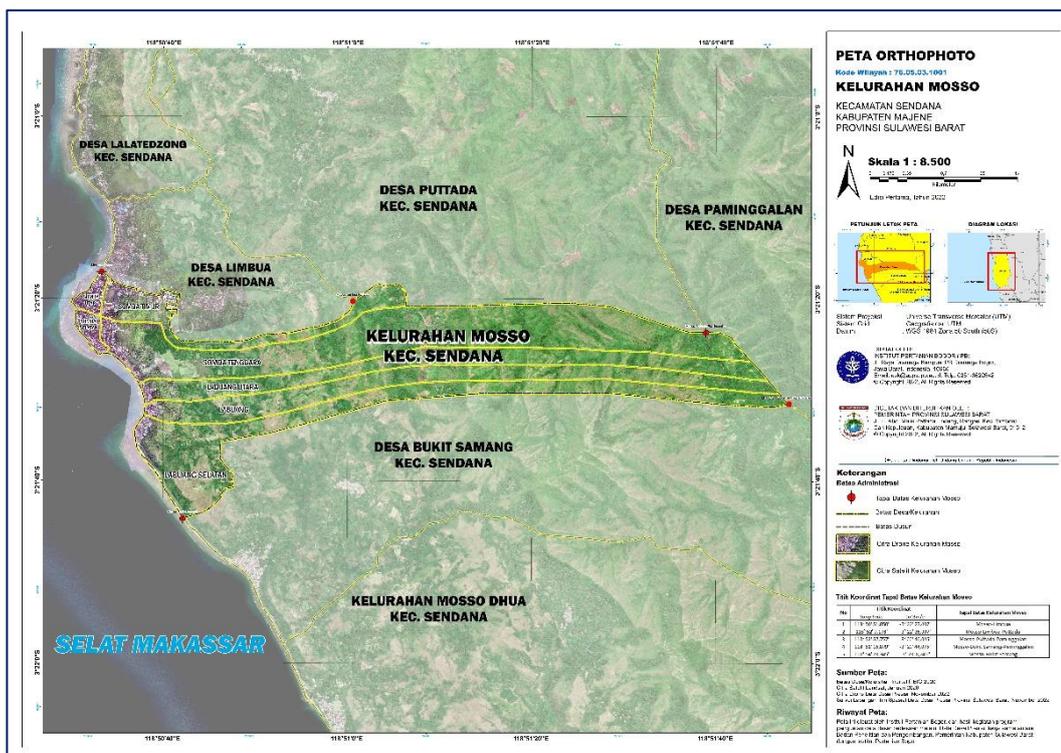
jalan poros yang dibentuk sebelum 1945. Jalan poros merupakan jalan raya yang menyambungkan antardesa, sehingga memberikan dampak sosial berupa kemudahan mobilitas masyarakat untuk menjalani kehidupan dan mencari nafkah. Setelah itu pada 1975 kemajuan teknologi mulai berkembang dengan masuknya listrik swasta pertama kali. Hal ini sangat berdampak kepada warga sebagai sumber penerangan pertama mereka, meskipun belum seluruh masyarakat yang bisa merasakannya karena biaya listrik yang belum terjangkau.

Kemudian pada 1989, PLN baru memasuki Kelurahan Mosso dengan harga yang lebih terjangkau, sehingga lebih banyak masyarakat yang dapat merasakannya. Selain kemajuan teknologi, Kelurahan Mosso juga mengalami perubahan dari segi infrastruktur, yaitu perubahan kantor kelurahan dari semipermanen menjadi permanen pada kurun waktu 2010. Sehingga proses pelayanan menjadi lebih nyaman baik dirasakan oleh masyarakat maupun dari pihak kelurahan.

Bencana alam yang membekas masyarakat di Kelurahan Mosso terjadi sebanyak dua kali. Tsunami dan gempa bumi pernah terjadi pada 1969. Dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat di Kelurahan Mosso karena harus mengungsi selama tiga bulan. Saat itu dilaporkan banyak rumah warga yang hancur. Selain itu rusaknya infrastruktur dan ruas jalan yang menghambat akses, hingga proses mobilisasi bantuan menjadi terhambat. Kemudian dampak psikologis juga dirasakan oleh warga karena trauma saat kejadian. Bencana alam terjadi lagi pada 2018 saat gempa menghentak Palu. Meskipun tidak terkena dampak fisik atau secara langsung, masyarakat mengaku mengalami dampak psikis saat kejadian dan harus siaga hingga mengungsi selama setengah bulan ke gunung.

B. Peta *orthophoto* Kelurahan Mosso

Peta tersebut dihasilkan dari foto udara yang diakuisisi menggunakan *drone* lalu digabungkan dengan citra satelit *Landsat* yang diunduh menggunakan perangkat lunak *SAS Planet* (Gambar 2). Penggabungan citra dan pengolahan peta *orthophoto* dilakukan menggunakan perangkat lunak *ArcGIS 10.8*. Hasil foto udara maupun citra menunjukkan 41,88% wilayah Kelurahan Mosso didominasi oleh kawasan hutan rimba, lalu 38,29% adalah wilayah hutan rakyat dan 8,33% adalah wilayah perkebunan. Garis berwarna kuning-hitam pada Gambar 1, menunjukkan batas antara desa, dan garis putus abu-abu merupakan batas antara dusun.



Gambar 2 Peta orthophoto Kelurahan Mosso

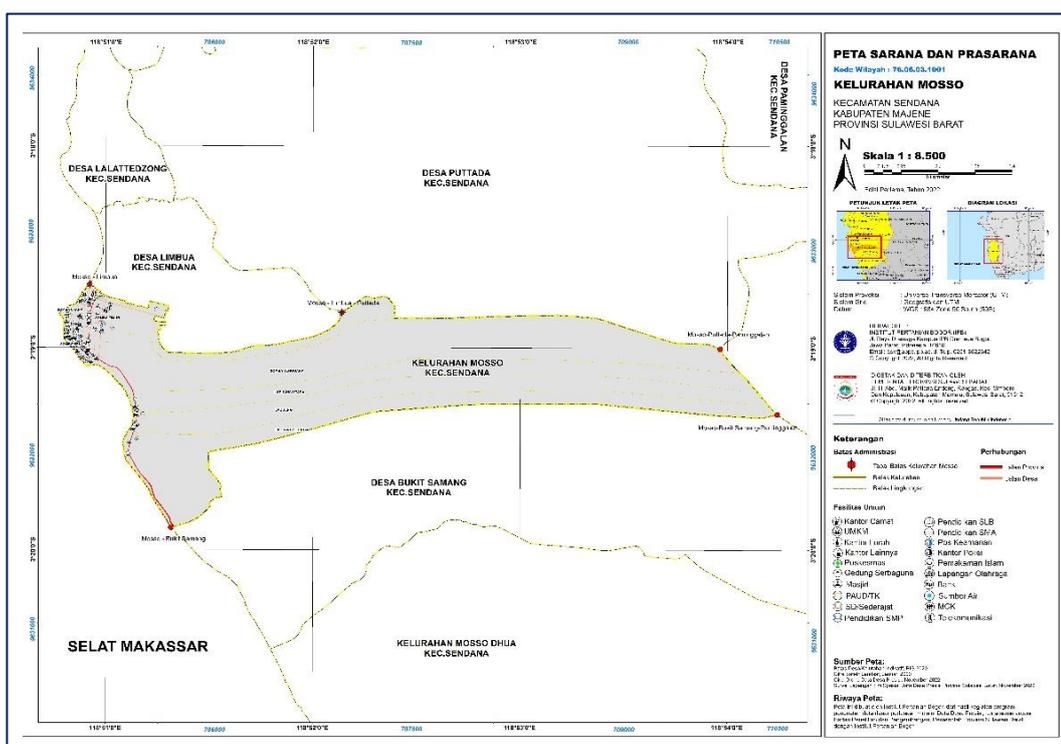
Adapun tapal batas desa atau titik perbatasan antara desa yang ditunjukkan dengan titik berwarna merah pada Gambar 1. Pada titik koordinat *longitude* 118° 50' 51.850" *latitude* -3° 22' 27.407" adalah batas Kelurahan Mosso dengan Desa Limbua, lalu titik koordinat *longitude* 118° 52' 9.405" *latitude* -3° 22' 36.159" adalah batas Kelurahan Mosso dengan Desa Puttada, kemudian *longitude* 118° 51' 16.879" *latitude* -3° 23' 44.075" adalah batas Kelurahan Mosso dengan Desa Bukit Samang, titik koordinat *longitude* 118° 54' 5.789" dan *latitude* -3° 22' 47.633" merupakan batas antara Kelurahan Mosso dengan Desa Puttada dan Paminggalan, serta tapal batas terakhir berada di titik koordinat *longitude* 118° 54' 23.345" *latitude* -3° 23' 8.245" adalah batas Kelurahan Mosso dengan Desa Bukit Samang dan Desa Paminggalan.

Wilayah timur Kelurahan Mosso menghadap langsung ke Selat Makassar. Kelurahan Mosso dibagi menjadi 7 lingkungan yaitu Somba Utara, Lingkungan Somba Timur, Somba Selatan, Somba Tenggara, Labuang Utara, Labuang, dan Labuang Selatan. Wilayah permukiman menyebar pada satu jalan utama yaitu jalan poros Mamuju—Makassar.

Sendana berada di Somba Timur, Kantor Kelurahan Mosso berada di Somba Utara, Kantor KUA Kecamatan Sendana yang terletak di Somba Timur, Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Sendana berada di Somba Utara, serta Kantor PDAM dan Kantor Balai Penyuluhan KB Kecamatan Sendana yang terletak di Somba Timur.

Fasilitas olahraga yaitu gedung serba guna yang terletak di Lingkungan Somba Utara dan lapangan badminton serta lapangan sepak bola yang berada di Lingkungan Somba Timur. Fasilitas Pemakaman Islam terletak di Lingkungan Somba Timur. Fasilitas kamar mandi umum berjumlah tujuh yang terletak di dua lingkungan yaitu Somba Utara dan Labuang Selatan. Fasilitas keamanan terdapat di Lingkungan Somba Utara yaitu Polsek Sendana. Fasilitas pendidikan yang berada di Kelurahan Mosso terdiri dari PAUD/TK berjumlah dua berada di Lingkungan Somba Utara dan Somba Timur.

Fasilitas pendidikan tersebar di beberapa lingkungan mulai tingkat dasar hingga menengah. SD/ sederajat berjumlah empat yang terletak di Somba Timur, Somba Selatan dan Labuang, tingkatan selanjutnya yaitu SMP/ sederajat yang berlokasi di Somba Timur, tingkatan menengah atau SMA/ sederajat yang berlokasi di Somba Timur, dan pendidikan lainnya atau Sekolah Luar Biasa (SLB) yang berlokasi di Somba Timur. Fasilitas selanjutnya yaitu jasa dan perdagangan pada Kelurahan Mosso yang berjumlah 156 (seratus lima puluh enam) usaha yang terdiri dari warung makan, bengkel motor, penjual/pembuat mebel/furnitur, milik masyarakat Kelurahan Mosso berlokasi secara menyebar pada tujuh lingkungan yang ada di Kelurahan Mosso. Tabel jumlah fasilitas umum setiap lingkungan dapat dilihat pada Tabel 4. serta titik lokasi jalan rusak yang dijumpai dapat dilihat pada Tabel 5.



Gambar 4 Peta sarana dan prasarana Kelurahan Mosso

Tabel 4 Jumlah fasilitas umum setiap pada 7 lingkungan yang terletak di Kelurahan Mosso.

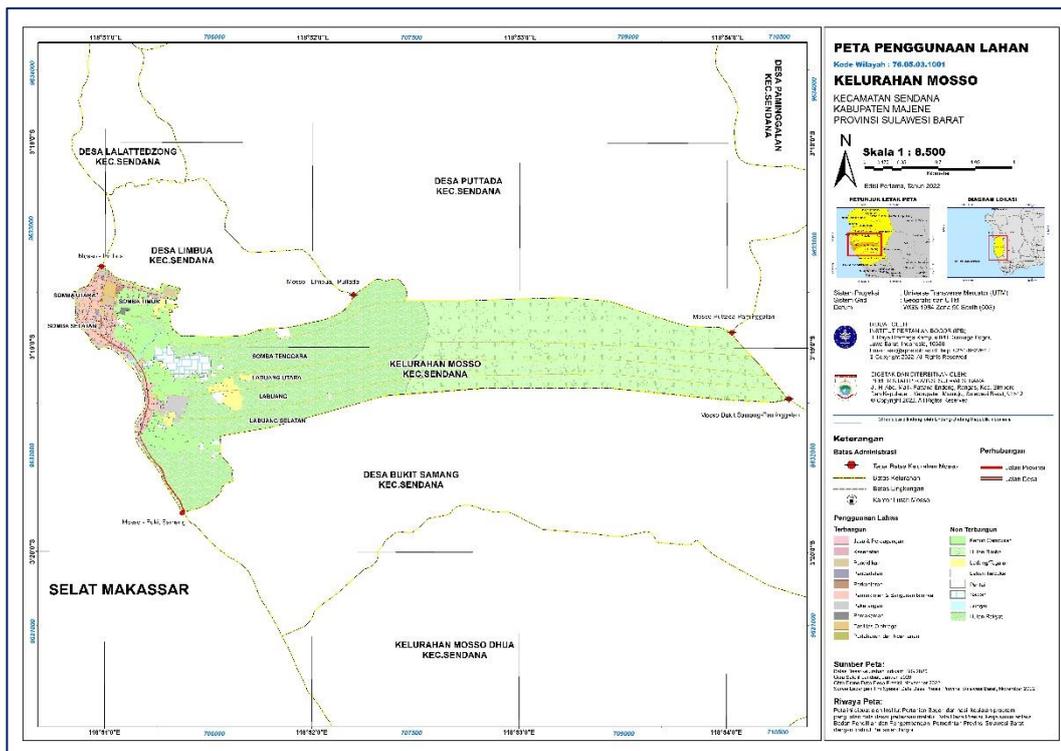
No	Infrastruktur	Lingkungan							TOTAL
		Somba Utara	Somba Timur	Somba Selatan	Somba Tenggara	Labuang Utara	Labuang	Labuang Selatan	
1.	Keamanan	1	2	-	-	-	-	-	3
2.	Kesehatan	-	1	-	-	-	-	1	2
3.	Olahraga	6	-	-	-	-	-	1	7
4.	Pendidikan	1	7	3	-	-	1	-	12
	Militer	-	1	-	-	-	-	-	1
	Pemakaman	-	1	-	-	-	-	-	1
5.	Peribadatan	1	1	1	1	-	1	-	5
6.	Perkantoran	3	4	-	-	-	-	-	7
7.	Sumber Air	4	1	7	2	-	-	-	14
8.	Telekomunikasi	-	-	1	-	-	-	-	1
9.	MCK	6	-	-	-	-	-	1	7
10.	Jasa dan Pedagangan	50	8	52	33	6	3	4	156
TOTAL		72	26	64	36	6	5	7	216

Tabel 5 Titik Koordinat lokasi jalan rusak yang terdapat di Kelurahan Mosso

No.	Titik Awal		Titik Akhir		Panjang (m)
	<i>longitude</i>	<i>latitude</i>	<i>longitude</i>	<i>latitude</i>	
1.	-3.37527	118.8474	-3.3753	118.8475	5
2.	-3.3755	118.8481	-3.37543	118.8479	3
3.	-3.37895	118.8472	-3.37892	118.8471	7
4.	-3.379	118.8476	-3.379	118.8475	6

E. Peta Penggunaan Lahan

Jenis penggunaan lahan di Kelurahan Mosso dibagi menjadi tiga kategori yaitu terbangun, nonterbangun, dan perhubungan yang terdiri dari 20 jenis (Gambar 5). Sebanyak 15 jenis lahan terbangun yang terdiri dari olahraga, perkantoran, pekarangan, pemakaman, permukiman, pendidikan, peribadatan, kesehatan, jasa dan perdagangan dengan luas total 24,07 ha, sedangkan pada jenis lahan nonterbangun terdiri dari pekarangan, hutan rimba, hutan rakyat, perkebunan, lahan kosong, pasir pasut, sungai, pantai, ladang, dengan luasan 582,52 ha. Perhubungan berupa jalan provinsi dan jalan desa memiliki luas 3,54 ha. Luas Penggunaan lahan yang ada di Kelurahan Mosso dapat dilihat pada Tabel 6.



Gambar 5 Peta Penggunaan Lahan Kelurahan Mosso

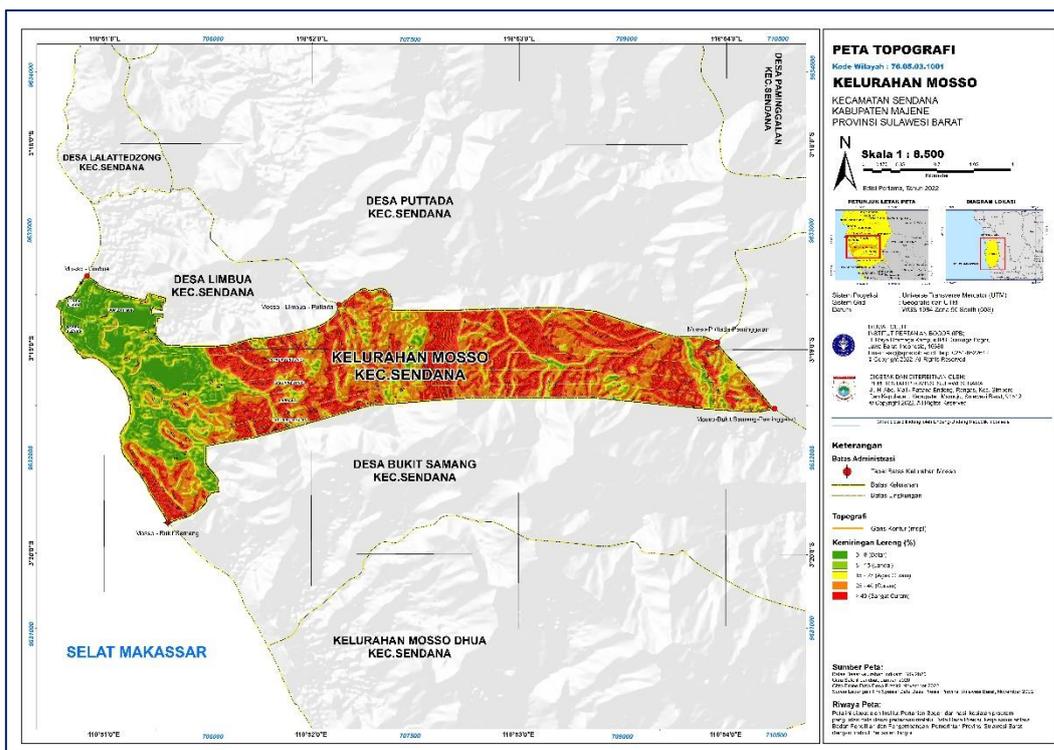
Tabel 6 Luas Penggunaan Lahan di Kelurahan Mosso

Jenis Penggunaan Lahan	Somba Utara	Somba Timur	Somba Selatan	Somba Tenggara	Labuang Utara	Labuang	Labuang Selatan	TOTAL
Jalan Desa	0.51	0.59	0.31	0.31	0.01	0.00	0.04	1.77
Pekarangan	1.93	1.11	2.28	1.94	0.32	0.00	5.74	13.32
Pemukiman	4.22	1.93	4.20	3.91	0.85	1.14	1.32	17.57
Perkantoran	0.10	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
Pertahanan dan Keamanan	0.07	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
Jalan Provinsi	0.23	0.00	0.00	0.48	0.20	0.00	0.86	1.77
Hutan Rimba	0.00	0.00	0.00	107.38	51.53	48.41	48.22	255.54
Hutan Rakyat	0.00	22.94	0.00	75.72	29.20	40.42	65.35	233.63
Ladang	0.00	2.00	0.00	0.55	3.55	3.48	0.66	10.24
Kebun Campuran	0.03	15.36	6.14	8.47	5.87	0.25	12.77	50.79
Tanah Kosong	0.00	1.09	0.00	0.84	0.22	0.93	1.12	4.23
Jasa dan Perdagangan	0.26	0.08	0.29	0.00	0.01	0.01	0.08	0.75
Sungai	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.08	0.08	0.87
Peribadatan	0.02	0.00	0.13	0.04	0.00	0.04	0.00	0.23
Pendidikan	0.04	2.33	0.13	0.00	0.00	0.10	0.00	2.61
Kesehatan	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.21

Jenis Penggunaan Lahan	Somba Utara	Somba Timur	Somba Selatan	Somba Tenggara	Labuang Utara	Labuang	Labuang Selatan	TOTAL
Fasilitas Olahraga	0.02	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49
Sawah	0.00	0.00	0.00	10.16	0.94	0.00	0.00	11.10
Pantai	0.00	0.00	0.00	0.92	0.27	0.14	1.49	2.82
Pemukaman	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
TOTAL	7,43	50,16	13,49	211,43	94,90	94,99	137,74	610,14

F. Peta Topografi

Peta Topografi Kelurahan Mosso dibentuk menggunakan data *Digital Elevation Model* (DEM). Data ini diperoleh dari Badan Informasi Geospasial (BIG) yang biasa dikenal dengan DEM Nasional (DEMNAS). Data DEMNAS memiliki resolusi spasial sebesar 8 meter. Berdasarkan hasil kemiringan yang diperoleh Kelurahan Mosso berada pada kemiringan antara 0—540 mdpl. Pada peta topografi terdapat warna hijau yang menunjukkan daerah tersebut memiliki tingkat kemiringan sangat rendah yang tergolong dalam kategori datar, kategori ini berada pada kisaran kemiringan 0—60 mdpl. Sehingga memiliki kemungkinan kecil untuk terjadinya fenomena erosi di sekitar daerah Kelurahan Mosso.



Gambar 6 Peta Topografi Kelurahan Mosso

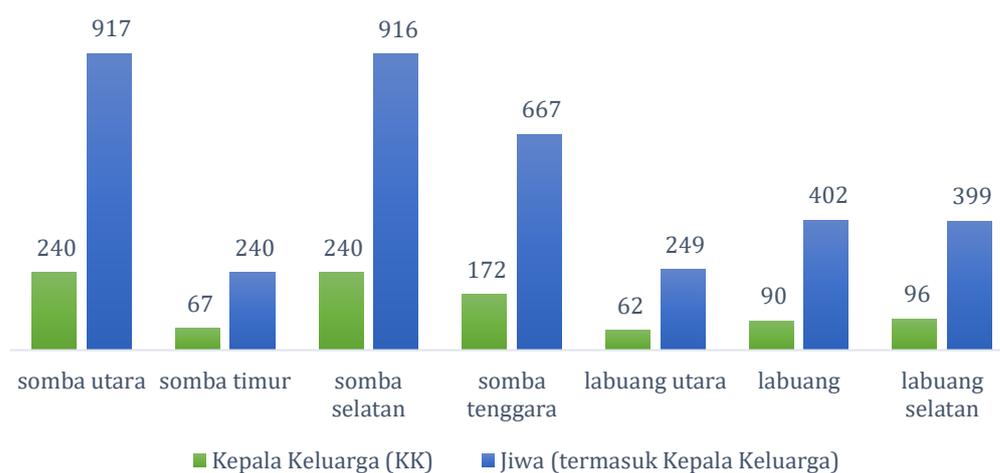
An aerial photograph of a coastal village with a blue overlay. The village features numerous houses with colorful roofs (red, blue, green) and is situated along a shoreline. The water is visible in the upper right portion of the image. The text is overlaid on the blue-tinted background.

Bagian 3 DEMOGRAFI DESA

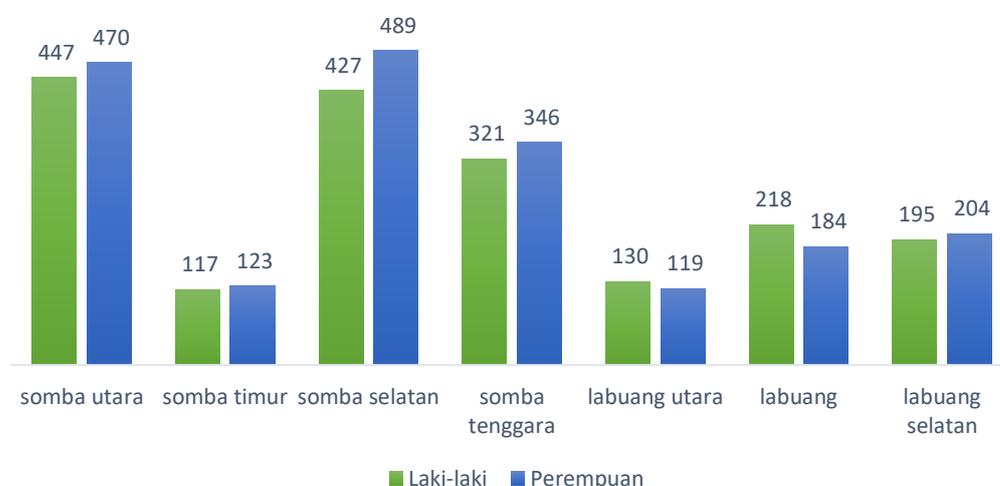
Kelurahan Mossso, Kecamatan Sendana
Kabupaten Majene
Provinsi Sulawesi Barat

DEMOGRAFI DESA

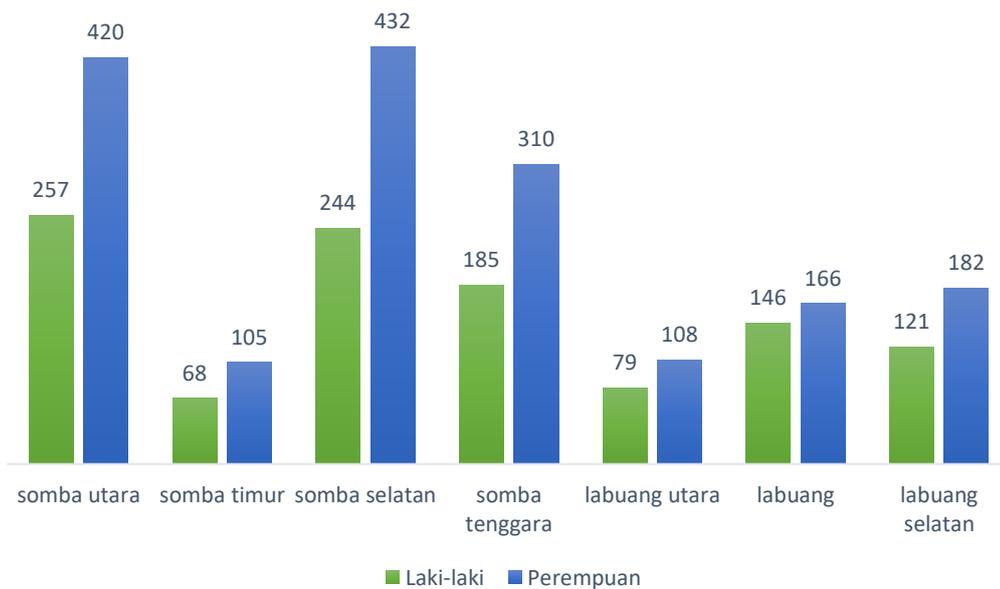
Hasil pendataan di Kelurahan Mosso pada 2022 menunjukkan bahwa terdapat 967 kepala keluarga. Dari jumlah kepala keluarga tersebut terdapat 3.790 penduduk yang tersebar di tujuh dusun. Berdasarkan jenis kelamin, lebih banyak penduduk yang berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 1.935 jiwa. Sedangkan penduduk dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 1.855 jiwa. Melihat dari rentang usia, penduduk Mosso yang berusia produktif (15—64 tahun) adalah sebanyak 1.235 jiwa. Sedangkan usia nonproduktif (0—14 tahun dan >65 tahun) di Mosso sebanyak 804 jiwa. Berikut data pendukung lebih rinci terkait dengan demografi di Kelurahan Mosso:



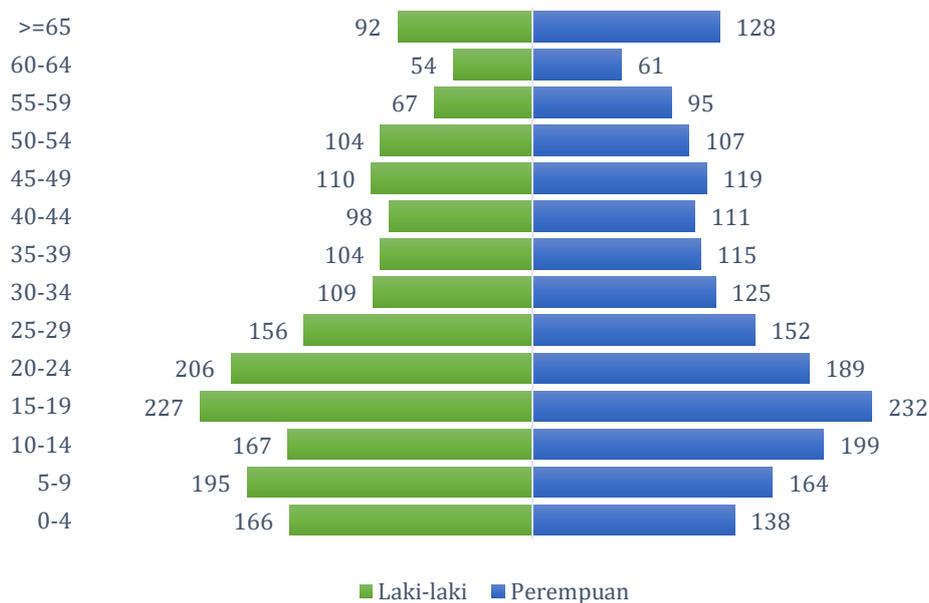
Gambar 7 Jumlah kepala keluarga dan penduduk di setiap dusun di Kelurahan Mosso



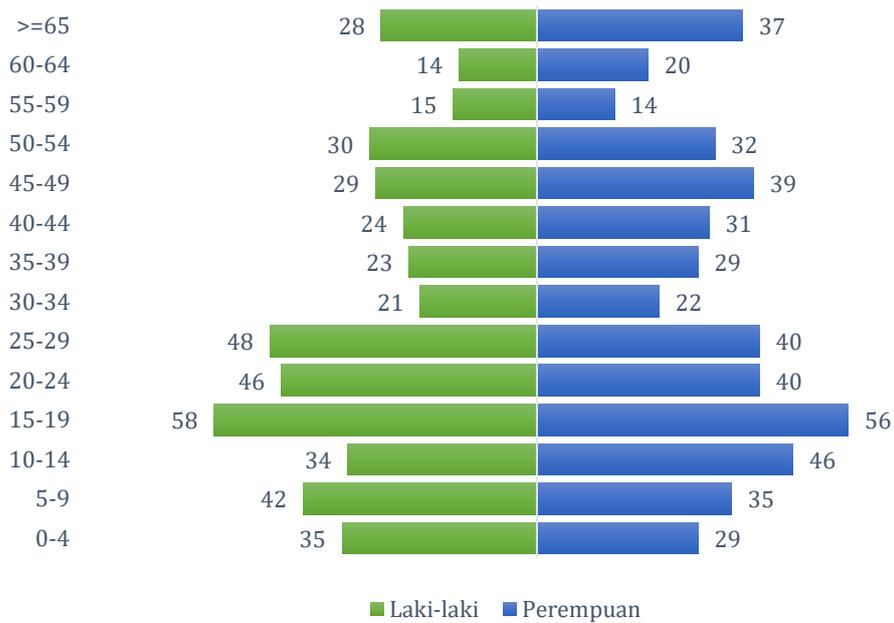
Gambar 8 Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kelurahan Mosso



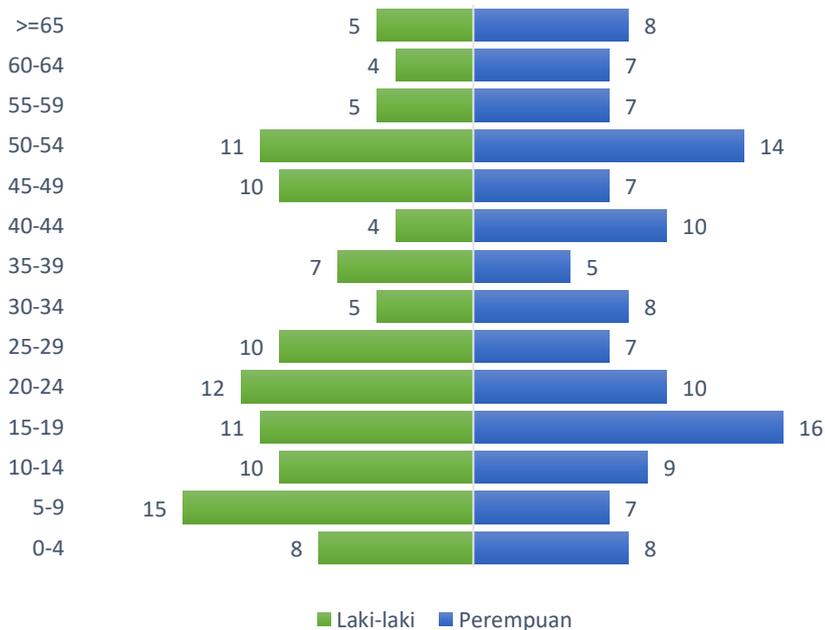
Gambar 9 Jumlah anggota keluarga berdasarkan jenis kelamin di Kelurahan Mosso



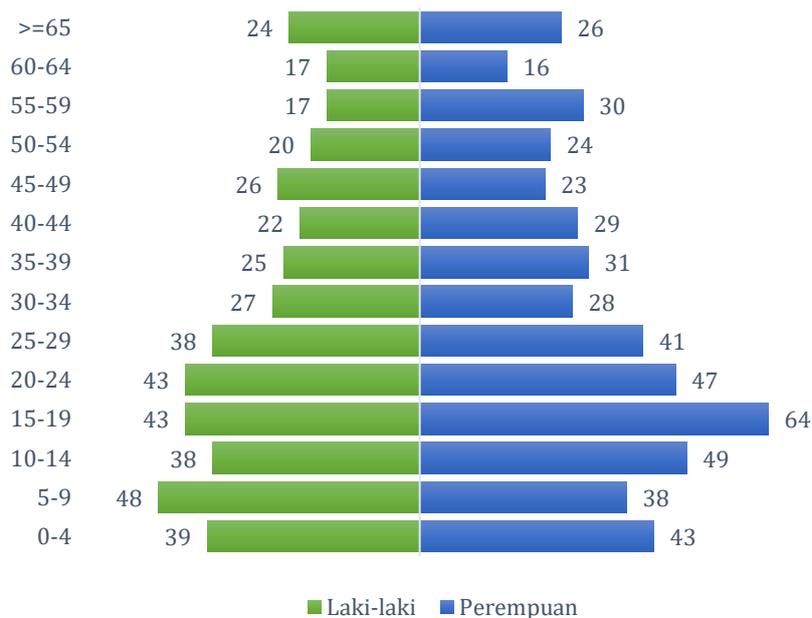
Gambar 10 Sebaran penduduk laki-laki dan perempuan berdasarkan usia (piramida penduduk) Kelurahan Mosso



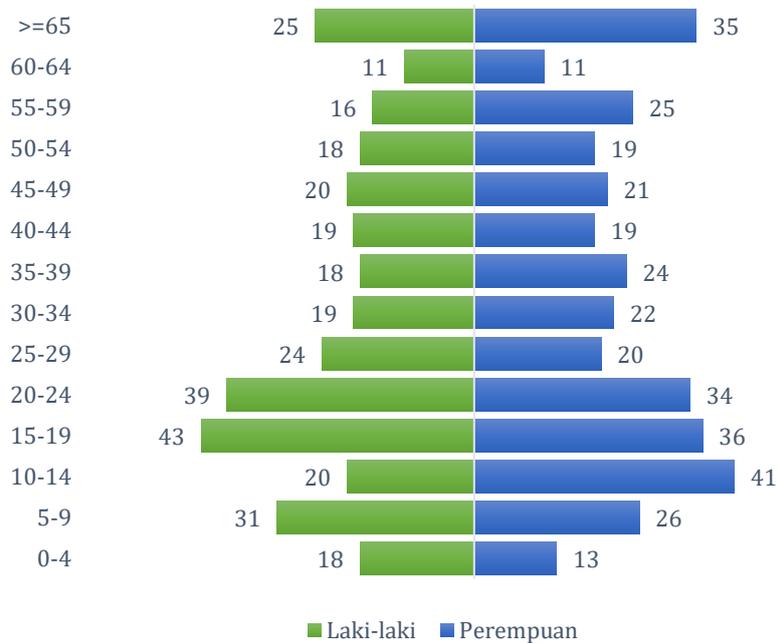
Gambar 11 Piramida penduduk Dusun Somba Utara



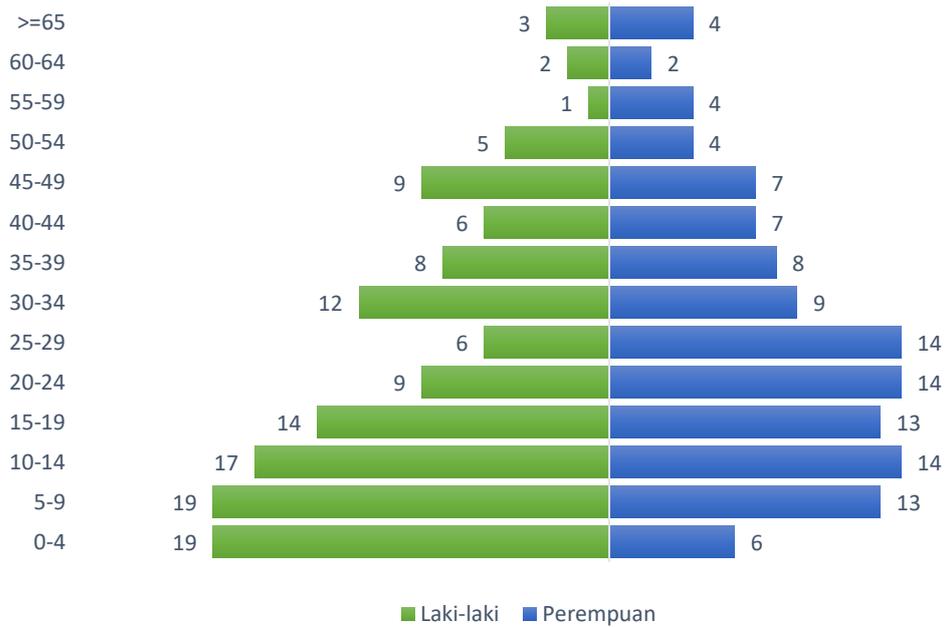
Gambar 12 Piramida penduduk Dusun Somba Timur



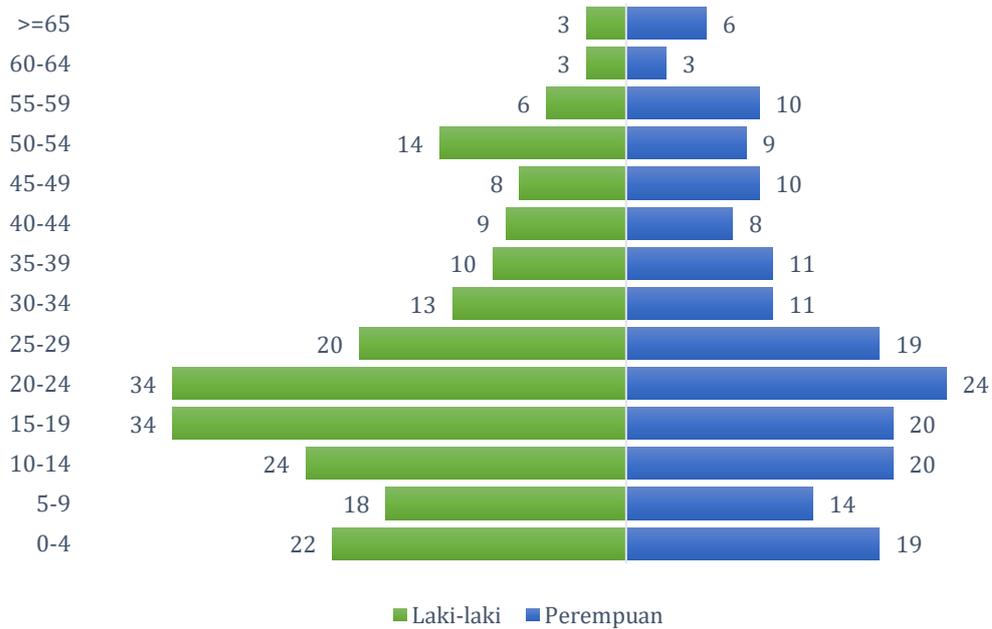
Gambar 13 Piramida penduduk Dusun Somba Selatan



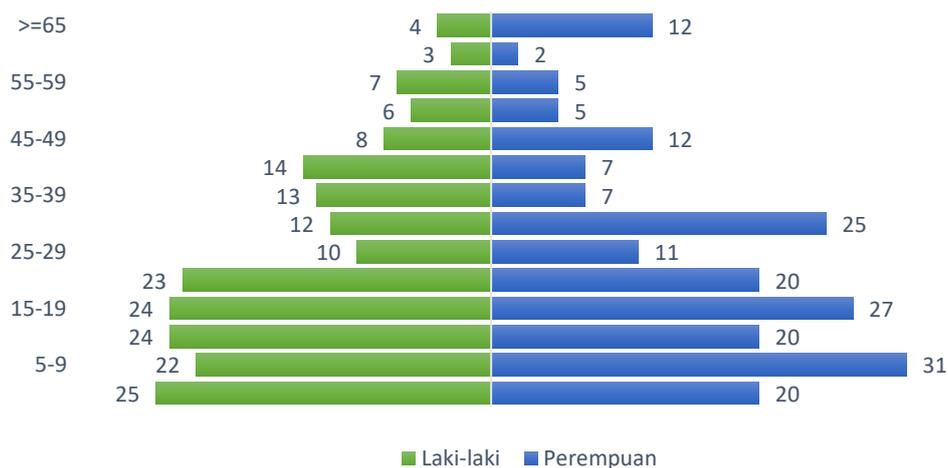
Gambar 14 Piramida penduduk Dusun Somba Tenggara



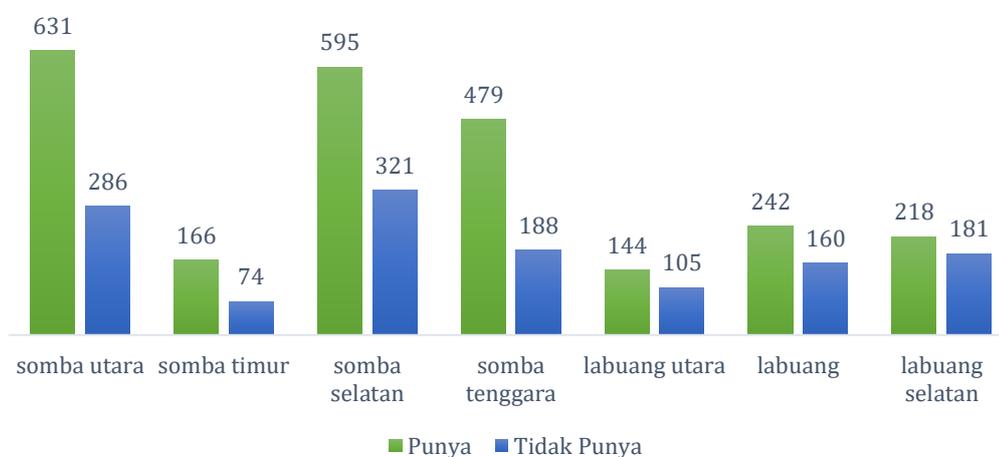
Gambar 15 Piramida Penduduk Dusun Labuang Utara



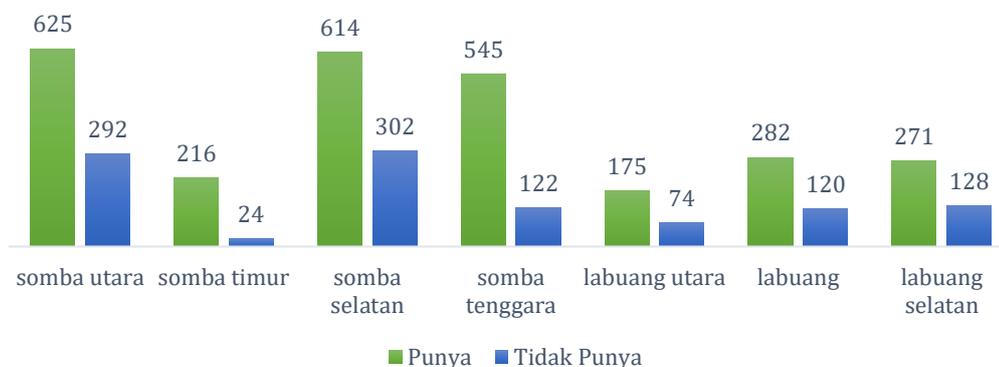
Gambar 16 Piramida Penduduk Dusun Labuang



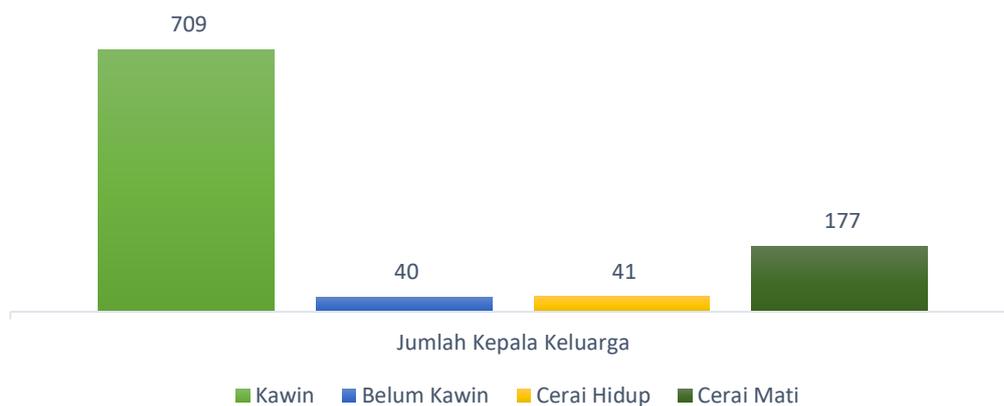
Gambar 17 Piramida Penduduk Dusun Labuang Selatan



Gambar 18 Jumlah penduduk berdasarkan kepemilikan ktp di Kelurahan Mosso



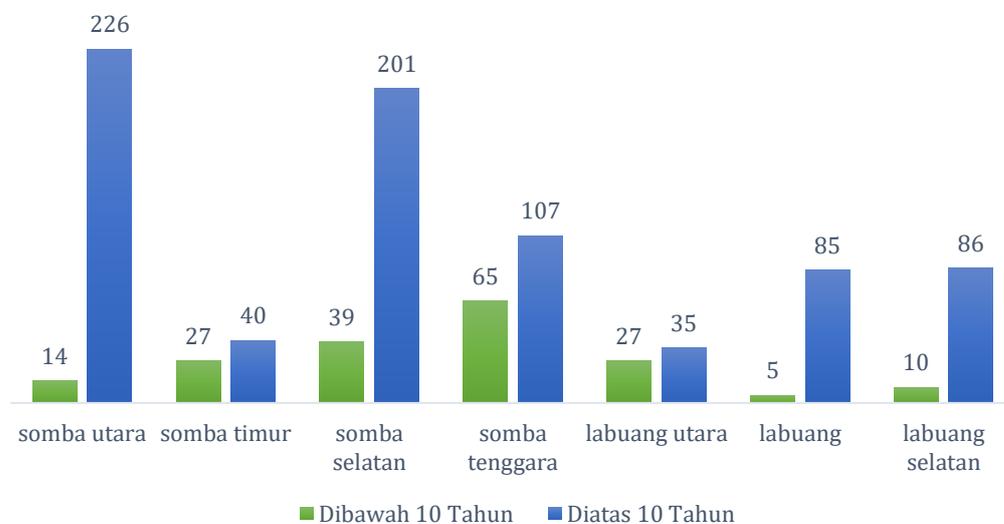
Gambar 19 Jumlah penduduk berdasarkan kepemilikan akta kelahiran di Kelurahan Mosso



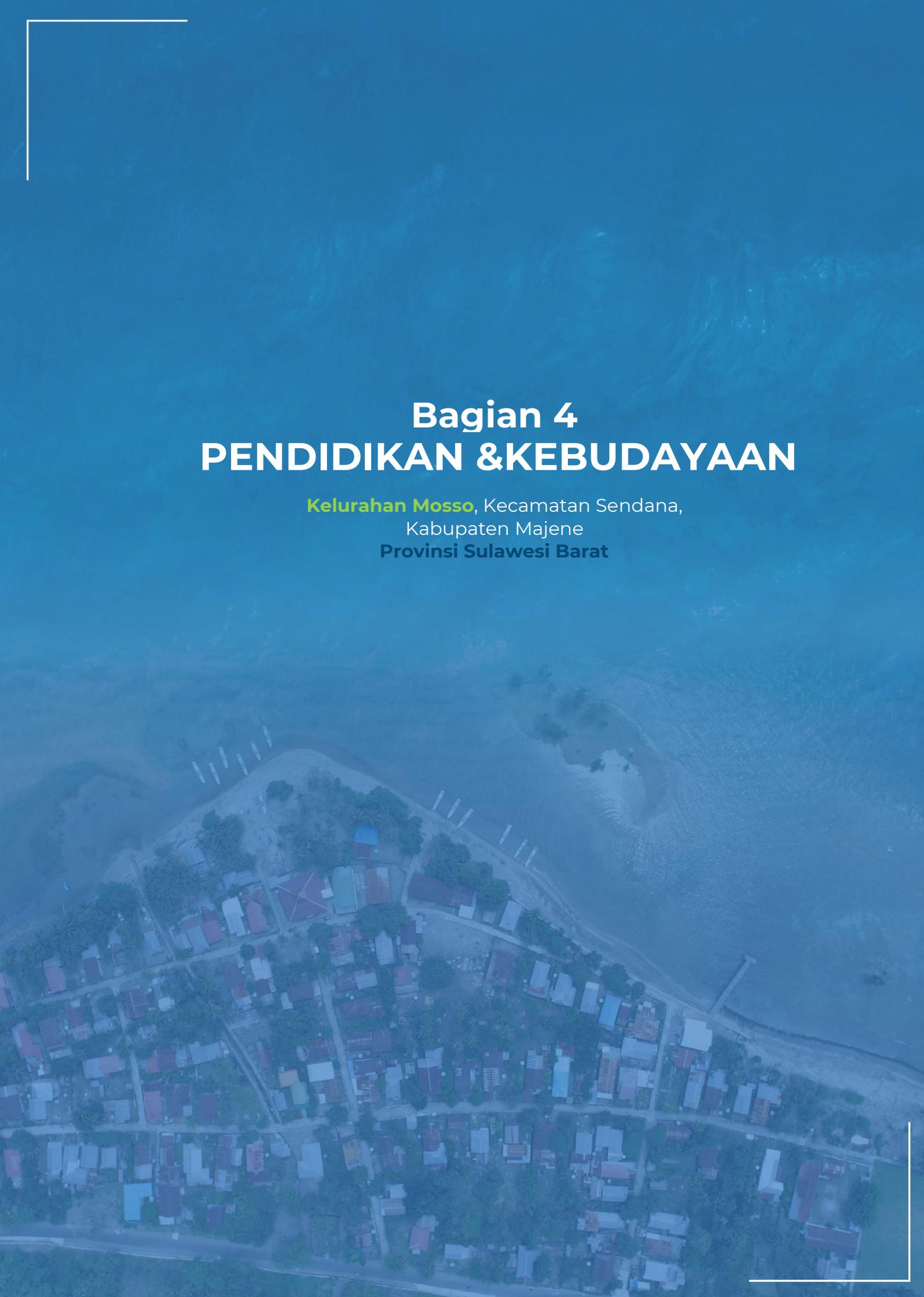
Gambar 20 Jumlah penduduk berdasarkan status kawin penduduk di Kelurahan Mosso

Tabel 7 Jumlah penduduk berdasarkan status kawin penduduk di Kelurahan Mosso

Dusun	Status Kawin Penduduk			
	Kawin	Belum Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati
Somba Utara	175	10	14	41
Somba Timur	46	4	3	14
Somba Selatan	172	10	8	50
Somba Tenggara	126	11	3	32
Labuang Utara	52	1	2	7
Labuang	69	1	4	16
Labuang Selatan	69	3	7	17
Total	709	40	41	177



Gambar 21 Jumlah keluarga berdasarkan lama tinggal di Kelurahan Mosso

An aerial photograph of a coastal village with a blue overlay. The village features numerous small buildings with colorful roofs, surrounded by lush greenery and palm trees. A sandy beach and a body of water are visible in the background. The text is centered over the image.

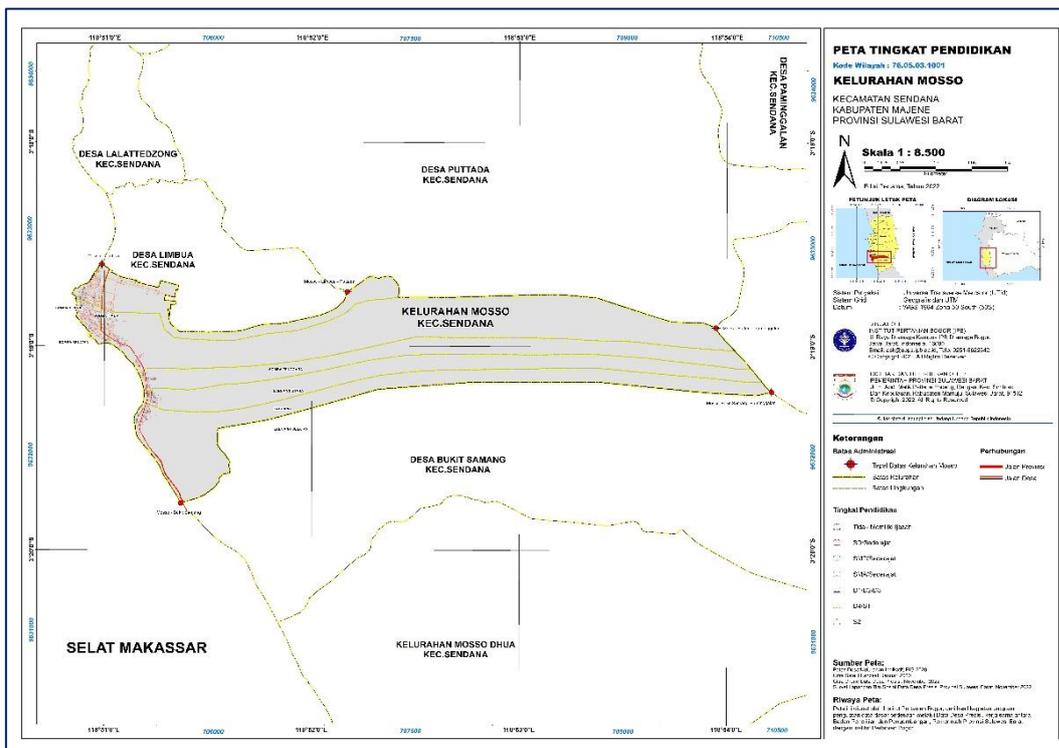
Bagian 4 PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN

Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana,
Kabupaten Majene
Provinsi Sulawesi Barat

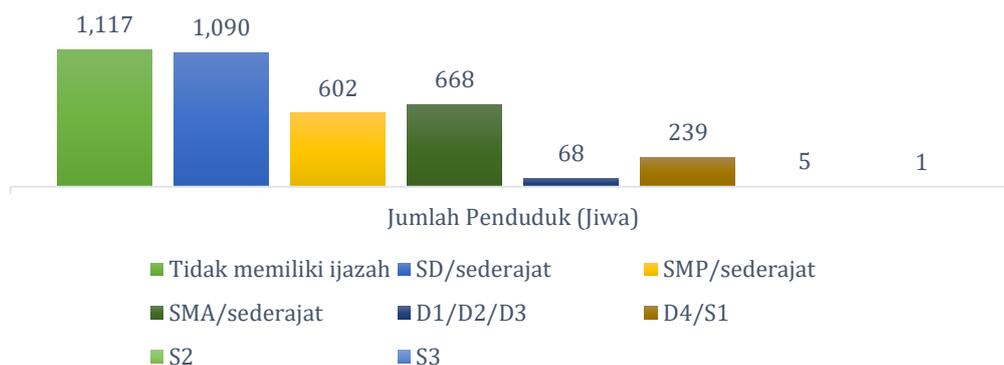
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Aspek pendidikan dan kebudayaan di Kelurahan Mosso menggambarkan ijazah terakhir, agama, etnis, dan bahasa daerah yang digunakan. Berdasarkan pendataan yang dilakukan menunjukkan bahwa paling banyak penduduk di Mosso tidak memiliki ijazah, yaitu sebanyak 1.117 jiwa (29.47%). Diikuti paling banyak kedua adalah lulusan SD/ sederajat sebanyak 1.090 jiwa (28.76%). Sedangkan paling sedikit (0.03%) penduduk yang memiliki ijazah S3, yaitu sebanyak satu jiwa. Berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki lebih banyak yang tidak memiliki ijazah yaitu sebanyak 602 jiwa. Sementara penduduk dengan jenis kelamin perempuan paling banyak memiliki ijazah SD/ sederajat yaitu 553 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa di Mosso, partisipasi sekolah lebih tinggi terlaksana pada perempuan.

Berdasarkan etnis, mayoritas penduduk di Mosso beretnis Mandar dengan jumlah 3.121 jiwa. Etnis lain yang terdapat di Kelurahan Mosso adalah Bajo, Bugis, Jawa, Kaili, Makasar, dan Papua. Kemudian mayoritas penduduk Mosso menggunakan bahasa daerah untuk berkomunikasi sehari-hari yaitu sebanyak 3.433 jiwa dengan paling banyak menggunakan bahasa Mandar. Dalam hal keagamaan, mayoritas penduduk Mosso menganut agama Islam dengan jumlah penduduk sebanyak 3.787 jiwa. Agama lain yang terdapat di Kelurahan Mosso adalah Kristen dengan jumlah tiga jiwa. Data lebih rinci terkait pada aspek pendidikan dan kebudayaan penduduk Kelurahan Mosso disajikan dalam gambar dan tabel di bawah ini:



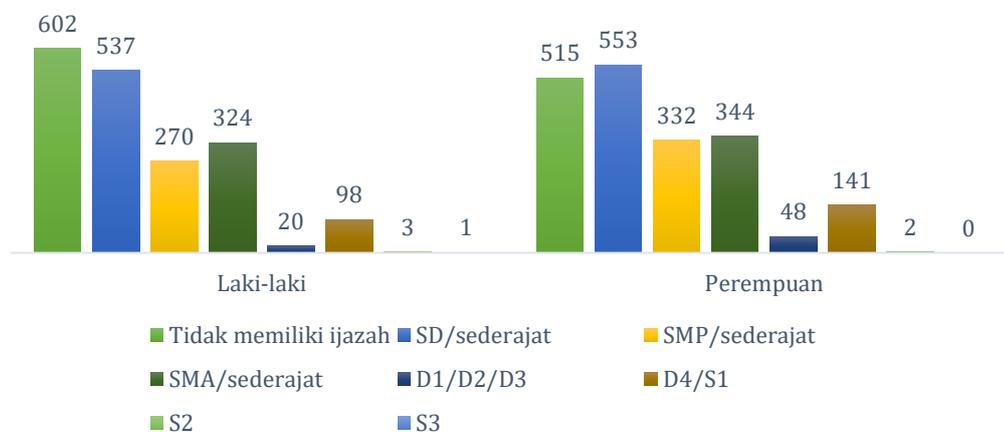
Gambar 22 Peta sebaran penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Kelurahan Mosso



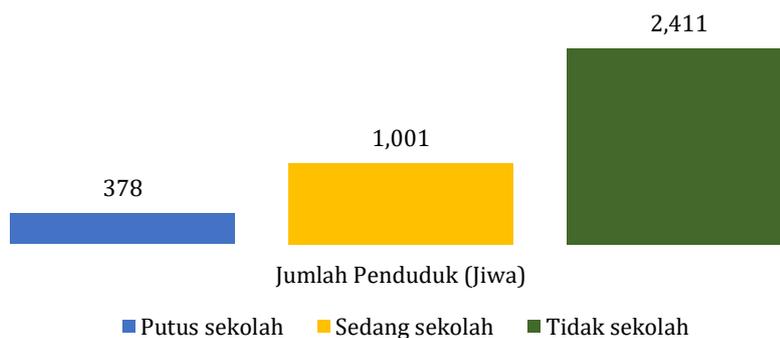
Gambar 23 Jumlah penduduk berdasarkan ijazah sekolah terakhir yang dimiliki di Kelurahan Mosso

Tabel 8 Jumlah penduduk berdasarkan ijazah sekolah terakhir yang dimiliki di Kelurahan Mosso

Dusun	Tidak memiliki ijazah	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ sederajat	D-1/ D-2/ D-3	D-4/ S-1	S-2	S-3
Somba Utara	235	228	140	201	30	81	2	0
Somba Timur	50	39	33	59	5	51	3	0
Somba Selatan	226	326	156	145	15	47	0	1
Somba Tenggara	144	228	113	135	11	36	0	0
Labuang Utara	115	77	27	24	2	4	0	0
Labuang	170	97	69	60	2	4	0	0
Labuang Selatan	177	95	64	44	3	16	0	0
TOTAL	1,117	1,090	602	668	68	239	5	1



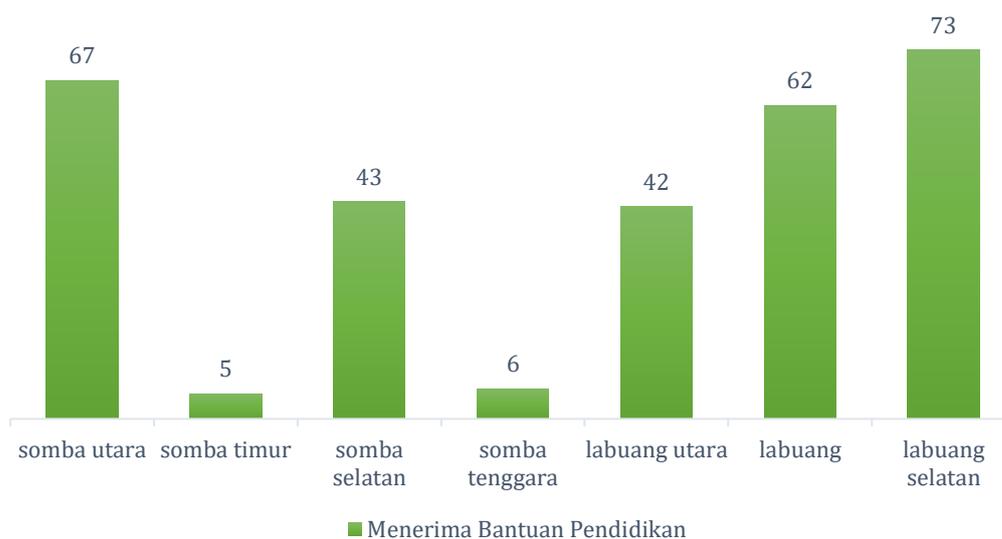
Gambar 24 Jumlah penduduk berdasarkan ijazah sekolah terakhir yang dimiliki dan jenis kelamin di Kelurahan Mosso



Gambar 25 Jumlah penduduk berdasarkan partisipasi sekolah di Kelurahan Mosso

Tabel 9 Jumlah penduduk berdasarkan partisipasi sekolah di Kelurahan Mosso

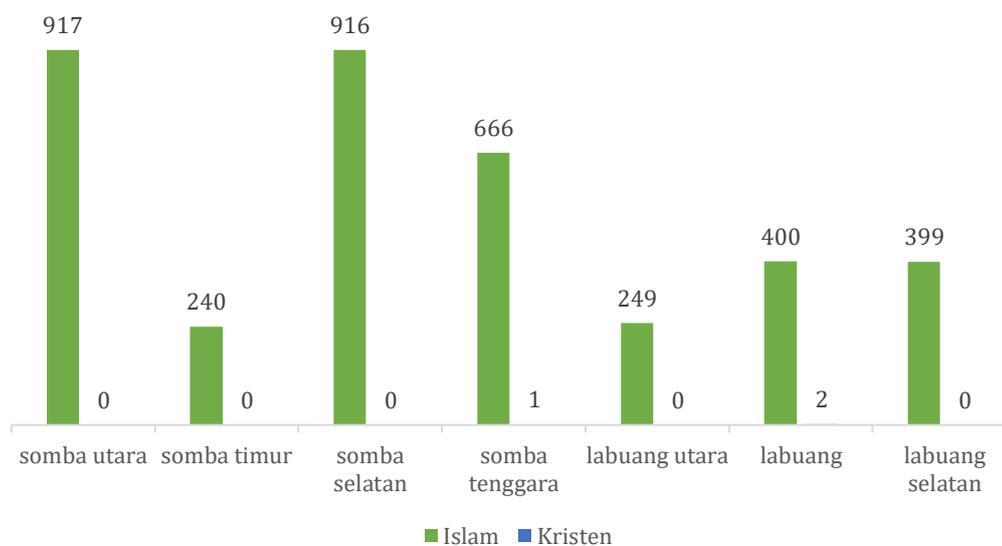
Dusun	Putus sekolah	Sedang sekolah	Tidak sekolah
Somba Utara	32	216	669
Somba Timur	11	72	157
Somba Selatan	150	286	480
Somba Tenggara	39	143	485
Labuang Utara	14	69	166
Labuang	76	100	226
Labuang Selatan	56	115	228
TOTAL	378	1,001	2,411

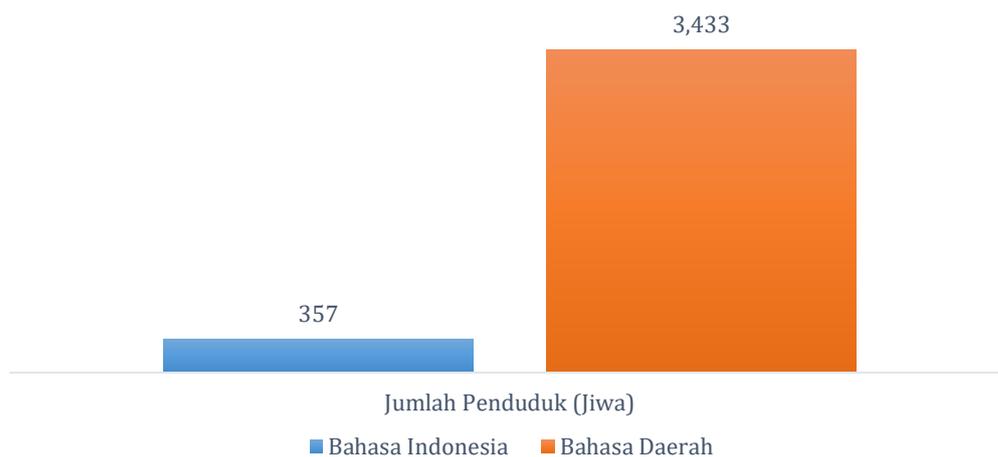


Gambar 26 Jumlah keluarga berdasarkan bantuan pendidikan yang diterima di Kelurahan Mosso

Tabel 10 Jumlah penduduk berdasarkan etnisitas di Kelurahan Mosso

Etnis	Bajo	Bugis	Jawa	Kaili	Makassar	Mandar	Papua
Somba Utara	0	1	1	0	0	915	0
Somba Timur	0	3	1	0	0	139	0
Somba Selatan	0	0	3	0	0	631	0
Somba Tenggara	0	0	3	1	0	632	0
Labuang Utara	0	0	0	0	1	248	0
Labuang	0	0	0	0	0	284	0
Labuang Selatan	1	0	0	1	0	272	1
Total	1	4	8	2	1	3,121	1

**Gambar 27** Jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut di Kelurahan Mosso



Gambar 28 Jumlah penduduk berdasarkan bahasa yang digunakan di Kelurahan Mosso

Tabel 11 Jumlah penduduk berdasarkan bahasa daerah yang digunakan di Kelurahan Mosso

Dusun	Jawa	Makassar	Mandar
Somba Utara	0	0	916
Somba Timur	0	0	239
Somba Selatan	3	0	916
Somba Tenggara	0	0	667
Labuang Utara	0	1	103
Labuang	0	0	397
Labuang Selatan	0	0	399
TOTAL	3	1	3637



An aerial photograph of a coastal village with a blue overlay. The village features numerous small buildings with colorful roofs, surrounded by greenery and palm trees. A sandy beach and a body of water are visible in the background. The text is centered over the image.

Bagian 5

INFRASTRUKTUR DAN

LINGKUNGAN HIDUP

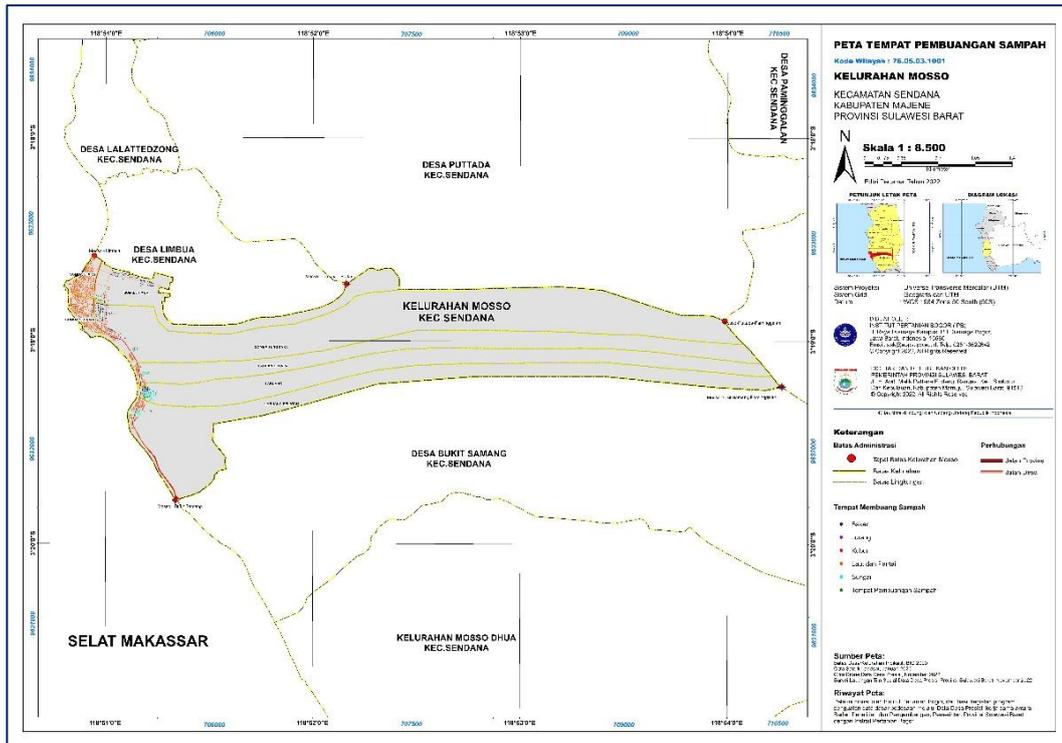
Kelurahan Mossso, Kecamatan Sendana
Kabupaten Majene
Provinsi Sulawesi Barat

INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP

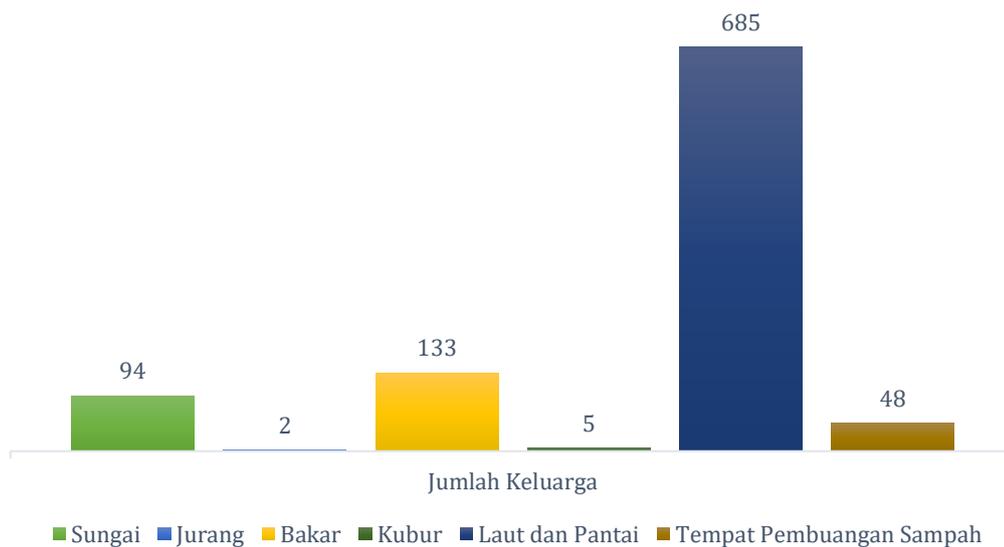
Aspek selanjutnya yang di data adalah infrastruktur dan lingkungan hidup. Pendataan pada aspek infrastruktur dan lingkungan hidup mengacu pada beberapa indikator yaitu tempat pembuangan sampah, kepemilikan ponsel, media informasi, akses terhadap pekarangan, dan lain-lain. Hasil pendataan menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Mosso membuang sampah hasil rumah tangganya ke laut dan pantai yaitu sebanyak 685 keluarga. Sedangkan hanya 48 jiwa keluarga yang membuang sampah rumah tangganya ke tempat pembuangan sampah (TPS). Hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat di Kelurahan Mosso terhadap lingkungan hidup.

Indikator selanjutnya adalah kepemilikan ponsel. Berdasarkan data sensus menunjukkan bahwa sebanyak 2.019 penduduk Mosso yang tidak memiliki ponsel. Sedangkan penduduk yang memiliki ponsel sebanyak 1.771 jiwa. Lebih dari setengah penduduk Mosso masih belum terjangkau dalam segi komunikasi. Kurangnya keterjangkauan komunikasi menunjukkan bahwa infrastruktur komunikasi di wilayah Mosso masih cenderung kurang. Sementara pada indikator kepemilikan pekarangan yang juga menjadi indikator aspek infrastruktur dan lingkungan hidup. Penduduk Mosso yang memiliki pekarangan produktif sebanyak 140 keluarga. Dengan jenis tanaman paling banyak adalah jenis buah sebanyak 79 keluarga, kemudian diikuti oleh tanaman hias sebanyak 43 keluarga, dan paling sedikit pada jenis tanaman obat yaitu sebanyak 5 keluarga. Sedangkan mayoritas keluarga di Mosso tidak memiliki pekarangan yang produktif yaitu sebanyak 827 keluarga. Data lebih rinci terkait pada aspek infrastruktur dan lingkungan hidup Kelurahan Mosso disajikan dalam gambar dan tabel di bawah ini:





Gambar 29 Peta sebaran keluarga berdasarkan tempat membuang sampah di Kelurahan Mosso



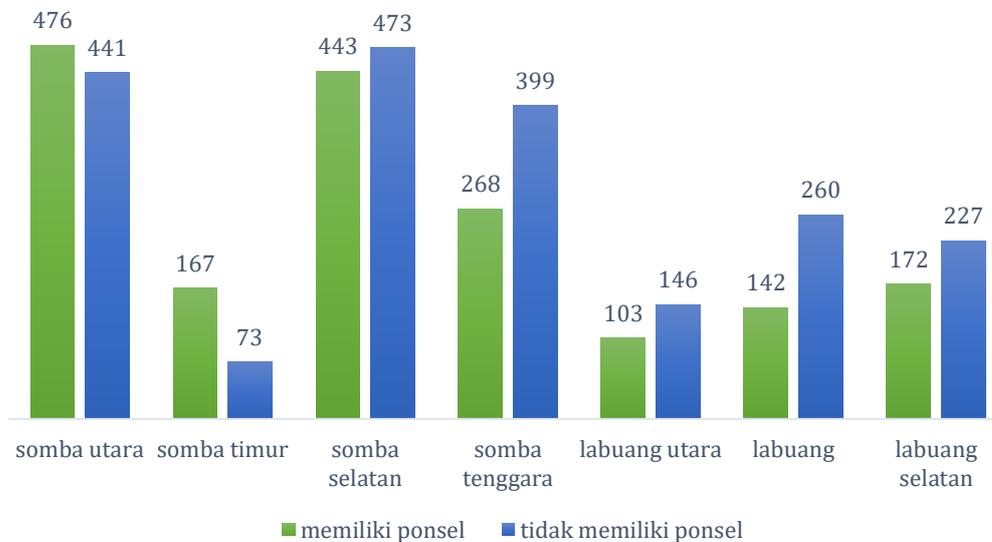
Gambar 30 Jumlah keluarga berdasarkan tempat membuang sampah di Kelurahan Mosso

Tabel 12 Jumlah keluarga berdasarkan tempat membuang sampah di Kelurahan Mosso

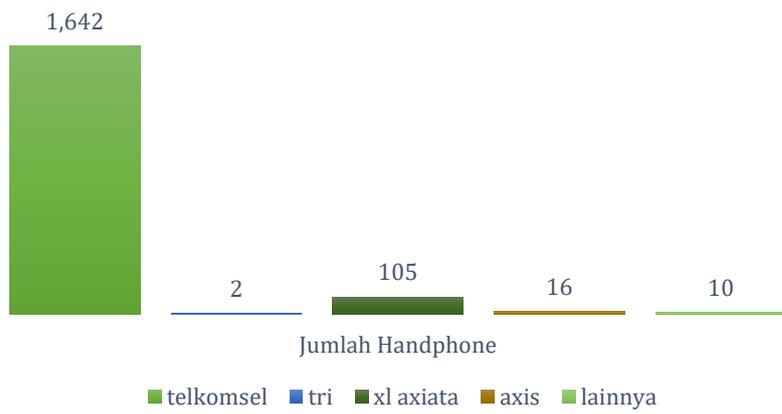
Dusun	Sungai	Jurang	Bakar	Kubur	Laut dan Pantai	Tempat Pembuangan Sampah
Somba Utara	0	0	1	0	238	1
Somba Timur	0	0	42	4	4	17
Somba Selatan	0	0	5	0	235	0
Somba Tenggara	12	0	47	1	91	21
Labuang Utara	16	0	0	0	45	1
Labuang	42	2	33	0	5	8
Labuang Selatan	24	0	5	0	67	0
Total	94	2	133	5	685	48

Tabel 13 Jumlah keluarga berdasarkan aset ekonomi yang dimiliki di Kelurahan Mosso

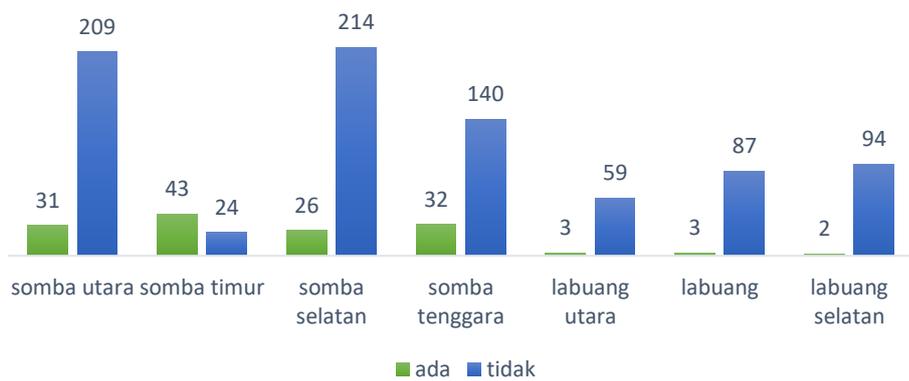
Dusun	Rumah/ Kontrakan/ Vila (Tidak Ditinggali)	Restoran/ Rumah Makan	Ruko/ Toko/ Warung	Emas/ Logam Mulia
Somba Utara	2	0	2	38
Somba Timur	11	0	0	0
Somba Selatan	1	0	0	24
Somba Tenggara	3	0	0	0
Labuang Utara	1	0	1	1
Labuang	7	4	1	6
Labuang Selatan	1	2	1	21
TOTAL	26	6	5	90



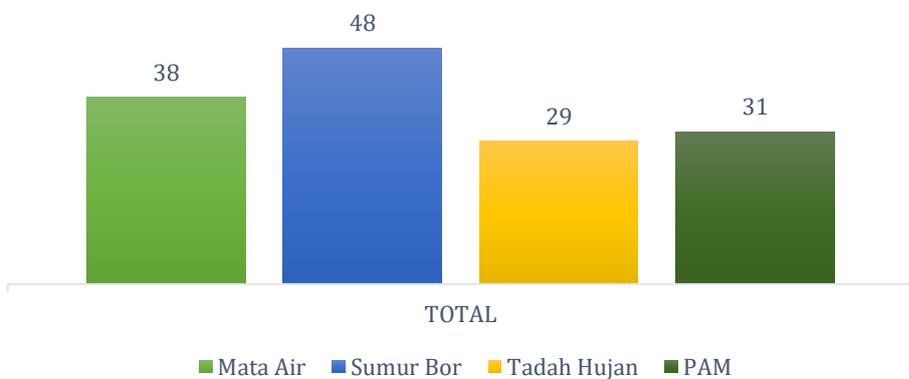
Gambar 31 Jumlah keluarga berdasarkan kepemilikan *handphone* di Kelurahan Mosso



Gambar 32 Jumlah penduduk berdasarkan merek *provider* yang digunakan di Kelurahan Mosso



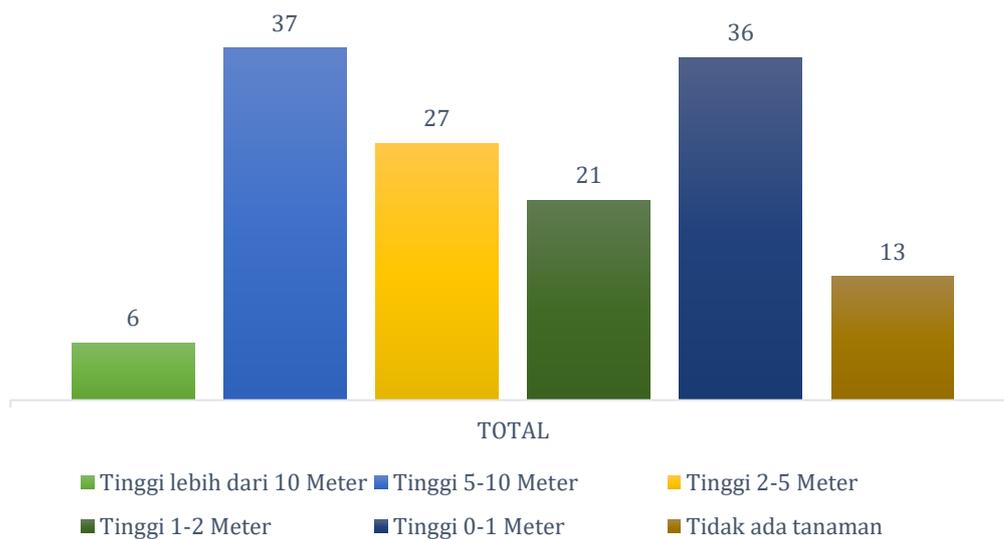
Gambar 33 Jumlah keluarga berdasarkan kepemilikan pekarangan di Kelurahan Mosso



Gambar 34 Jumlah keluarga berdasarkan sumber air pekarangan di Kelurahan Mosso

Tabel 14 Jumlah keluarga berdasarkan sumber air pekarangan di Kelurahan Mosso

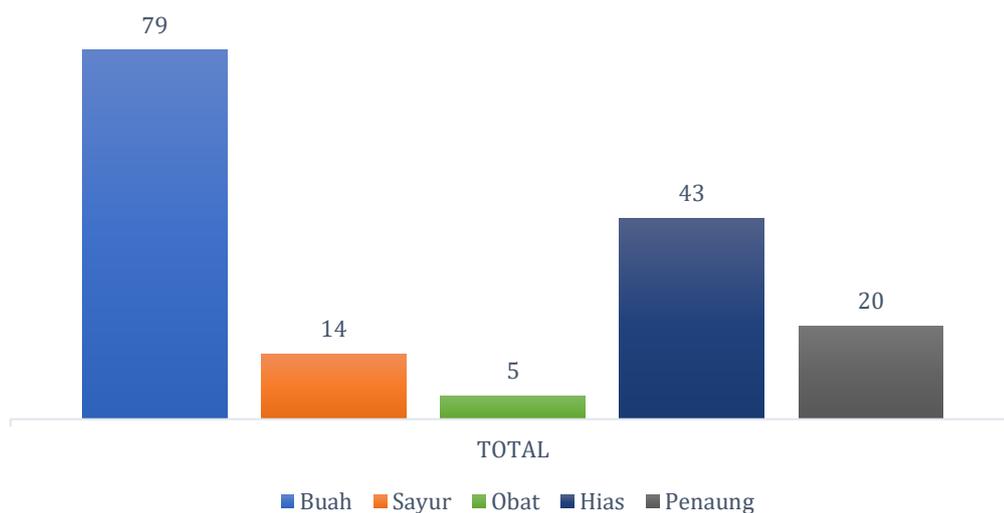
Dusun	Mata Air	Sumur Bor	Tadah Hujan	PAM
Somba Utara	12	6	13	1
Somba Timur	4	28	0	11
Somba Selatan	1	7	8	14
Somba Tenggara	21	4	3	5
Labuang Utara	0	1	2	0
Labuang	0	2	1	0
Labuang Selatan	0	0	2	0
TOTAL	38	48	29	31



Gambar 35 Jumlah keluarga berdasarkan strata tanaman pekarangan di Kelurahan Mosso

Tabel 15 Jumlah keluarga berdasarkan strata tanaman pekarangan di Kelurahan Mosso

Dusun	Tinggi lebih dari 10 Meter	Tinggi 5-10 Meter	Tinggi 2-5 Meter	Tinggi 1-2 Meter	Tinggi 0-1 Meter	Tidak ada tanaman
Somba Utara	0	0	0	5	22	4
Somba Timur	5	20	12	5	1	0
Somba Selatan	1	5	4	6	5	5
Somba Tenggara	0	12	11	3	5	1
Labuang Utara	0	0	0	1	1	1
Labuang	0	0	0	0	1	2
Labuang Selatan	0	0	0	1	1	0
TOTAL	6	37	27	21	36	13



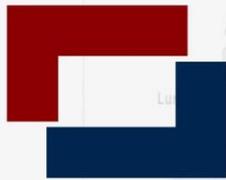
Gambar 36 Jumlah keluarga berdasarkan ragam jenis tanaman di pekarangan pada Kelurahan Mosso

Tabel 16 Jumlah keluarga berdasarkan ragam jenis tanaman di Pekarangan pada Kelurahan Mosso

Jenis Tanaman	Buah	Sayur	Obat	Hias	Penaung
Somba Utara	15	8	3	11	0
Somba Timur	28	2	1	13	4
Somba Selatan	11	2	1	9	1
Somba Tenggara	22	2	0	7	15
Labuang Utara	1	0	0	2	0
Labuang	0	0	0	1	0
Labuang Selatan	2	0	0	0	0
Total	79	14	5	43	20



S E L A T M A K A S S A R



DATA DESA PRESISI

LPPM IPB University

An aerial photograph of a coastal village with a blue overlay. The village features numerous small buildings with colorful roofs (red, blue, green) and is situated along a shoreline with a sandy beach and a body of water. The text is centered over the image.

Bagian 6

SOSIAL, HUKUM & HAM

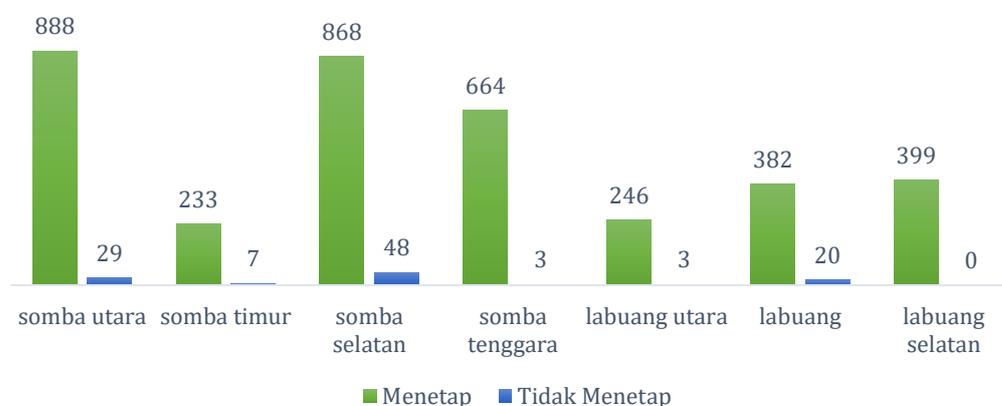
Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana
Kabupaten Majene
Provinsi Sulawesi Barat

KEHIDUPAN SOSIAL, PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAM

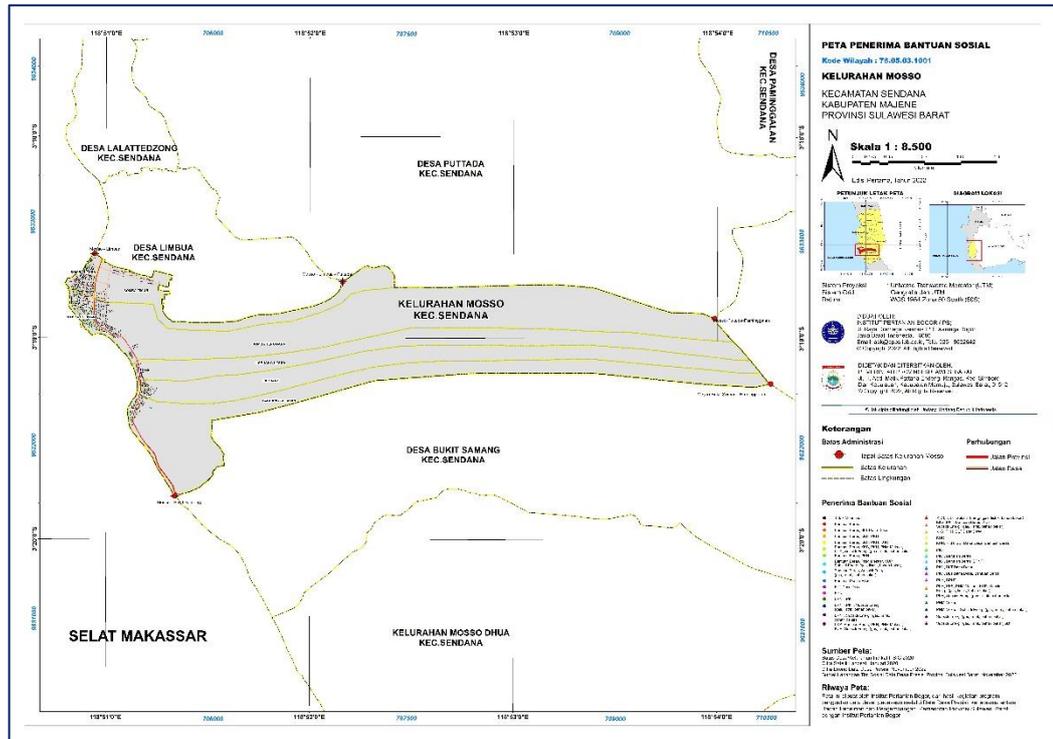
Aspek berikutnya adalah terkait kehidupan sosial, perlindungan hukum dan hak asasi manusia. Beberapa indikator yang diukur dalam aspek ini adalah partisipasi organisasi, status tinggal, kekerasan di desa, dan lain lain. Pada indikator partisipasi organisasi menunjukkan bahwa di Kelurahan Mosso terdapat beberapa organisasi seperti kelompok tani, kelompok nelayan/budidaya, kelompok buruh, ormas/ormas keagamaan, kelompok pengajian, kegiatan gotong royong. Sebanyak 85 keluarga di Kelurahan Mosso paling banyak berpartisipasi pada kelompok nelayan/budidaya. Hal ini sejalan dengan mayoritas pekerjaan mereka sebagai nelayan. Sementara sebanyak 27 keluarga berpartisipasi pada kelompok tani.

Indikator selanjutnya yang dilihat adalah pada indikator status tinggal penduduk. Dari hasil pendataan menunjukkan bahwa mayoritas penduduk yang tinggal di Kelurahan Mosso adalah yang berstatus menetap dengan berjumlah 3.680 jiwa. Sedangkan 110 penduduk berstatus tidak menetap. Selanjutnya adalah pengalaman mengalami kekerasan atau tidak kejahatan di desa yang turut dilihat terkait perlindungan hukum dan HAM. Hasil menunjukkan bahwa tidak kejahatan pernah terjadi di lima dusun Kelurahan Mosso. Paling banyak tidak kejahatan terjadi di Dusun Somba Tenggara yaitu sebanyak 10 jiwa, kemudian berturut-turut terjadi di Somba Timur (8 jiwa), Somba Selatan (3 jiwa), Somba Utara (2 jiwa), dan Labuang (1 jiwa).

Data lebih rinci terkait pada aspek kehidupan sosial, perlindungan hukum dan hak asasi manusia Kelurahan Mosso disajikan dalam gambar dan tabel di bawah ini:



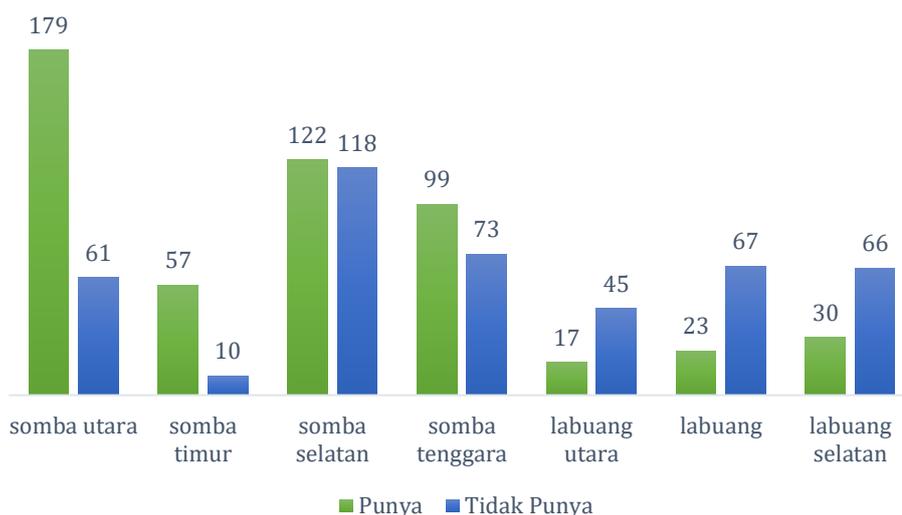
Gambar 37 Jumlah penduduk berdasarkan status tinggal di Kelurahan Mosso



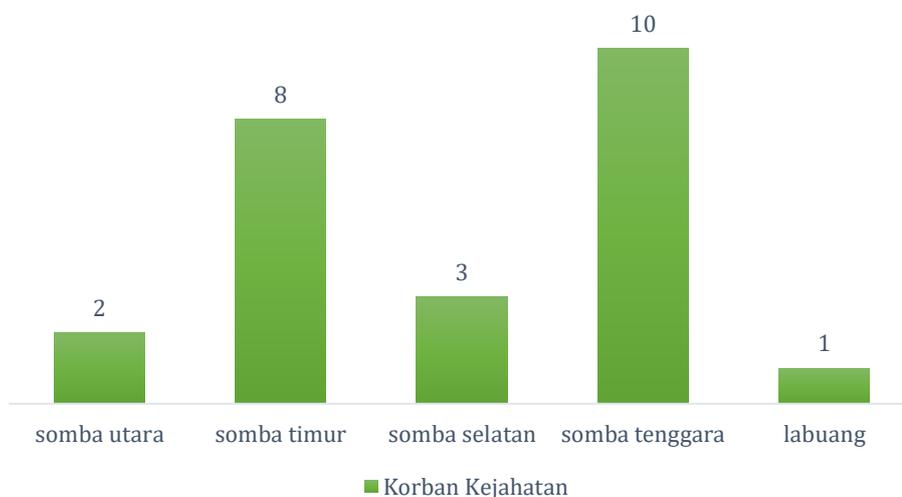
Gambar 38 Peta sebaran kepala keluarga berdasarkan penerima bantuan di Kelurahan Mosso

Tabel 17 Jumlah keluarga berdasarkan penerima program bantuan sosial di Kelurahan Mosso

Bantuan Sosial	BPNT	Bantuan Beras	KKS	PKH	PNM Mekaar	KUR	Subsidi Energi	Bantuan Usaha Mikro	BLT Dana Desa
Somba Utara	14	3	0	58	0	0	17	0	10
Somba Timur	0	1	0	1	0	0	0	1	8
Somba Selatan	0	11	0	65	0	0	0	0	2
Somba Tenggara	0	1	0	28	0	0	1	0	23
Labuang Utara	0	12	1	11	0	1	0	1	9
Labuang	13	9	0	32	0	0	7	0	6
Labuang Selatan	1	16	9	25	8	10	12	0	0
Total	28	53	10	220	8	11	37	2	58



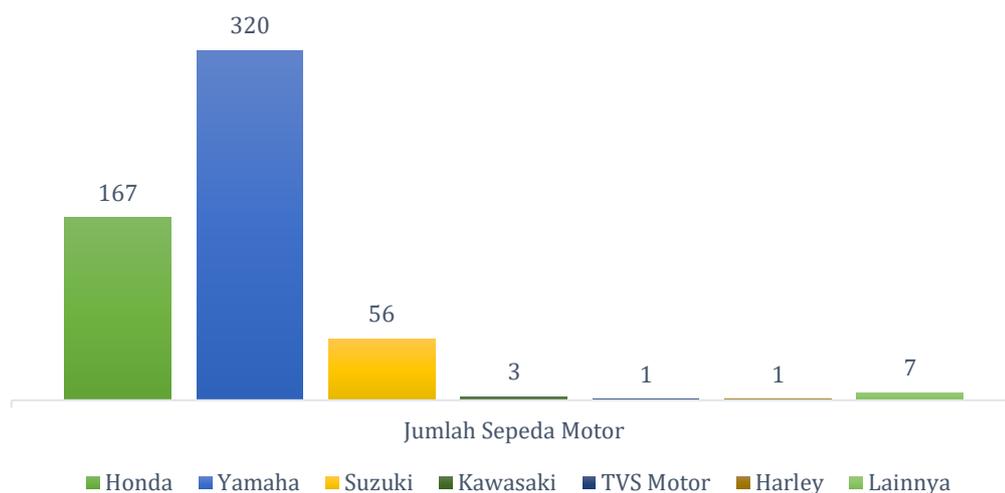
Gambar 39 Jumlah keluarga berdasarkan kepemilikan kulkas di rumah di Kelurahan Mosso



Gambar 40 Jumlah penduduk berdasarkan pengalaman menjadi korban kejahatan di Kelurahan Mosso

Tabel 18 Jumlah keluarga berdasarkan kepemilikan sarana transportasi di Kelurahan Mosso

Dusun	Sepeda		Sepeda Motor		Mobil		Perahu		Perahu Motor		Kapal	
	1	>1	1	>1	1	>1	1	>1	1	>1	1	>1
Somba Utara	18	1	107	22	19	2	22	0	28	1	4	0
Somba Timur	17	4	35	23	16	1	0	0	0	0	0	0
Somba Selatan	5	2	102	17	12	0	3	0	76	0	4	0
Somba Tenggara	17	0	84	14	19	0	3	0	5	0	2	0
Labuang Utara	3	1	24	2	2	0	4	0	16	0	0	0
Labuang	2	1	34	2	0	0	19	0	13	0	3	0
Labuang Selatan	6	2	33	9	6	1	15	0	16	0	1	0
TOTAL	68	11	419	89	74	4	66	0	154	1	14	0



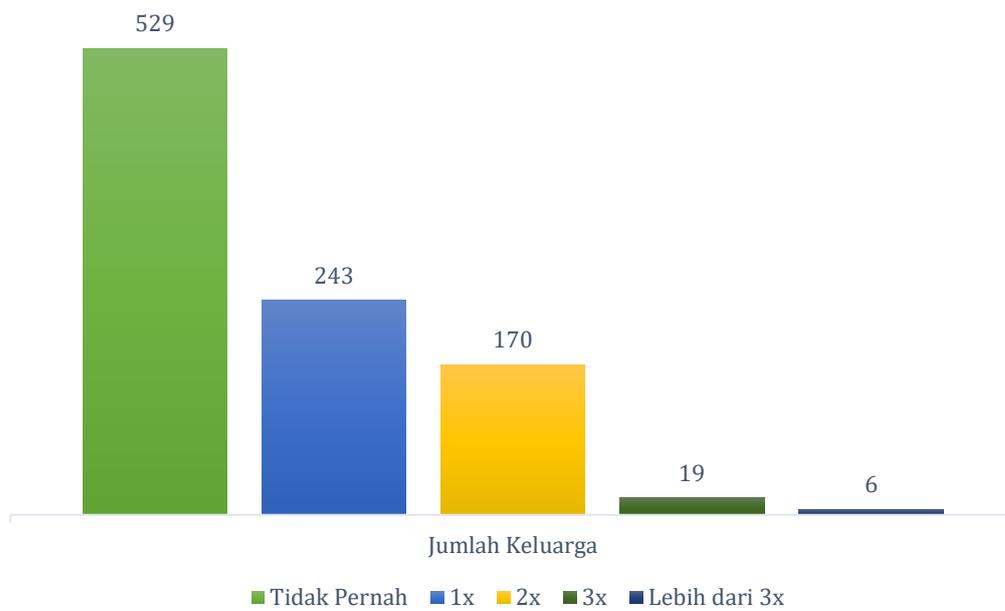
Gambar 41 Jumlah keluarga berdasarkan merek sepeda motor yang dimiliki Di Kelurahan Mosso

Tabel 19 Jumlah keluarga berdasarkan merek mobil yang dimiliki di Kelurahan Mosso

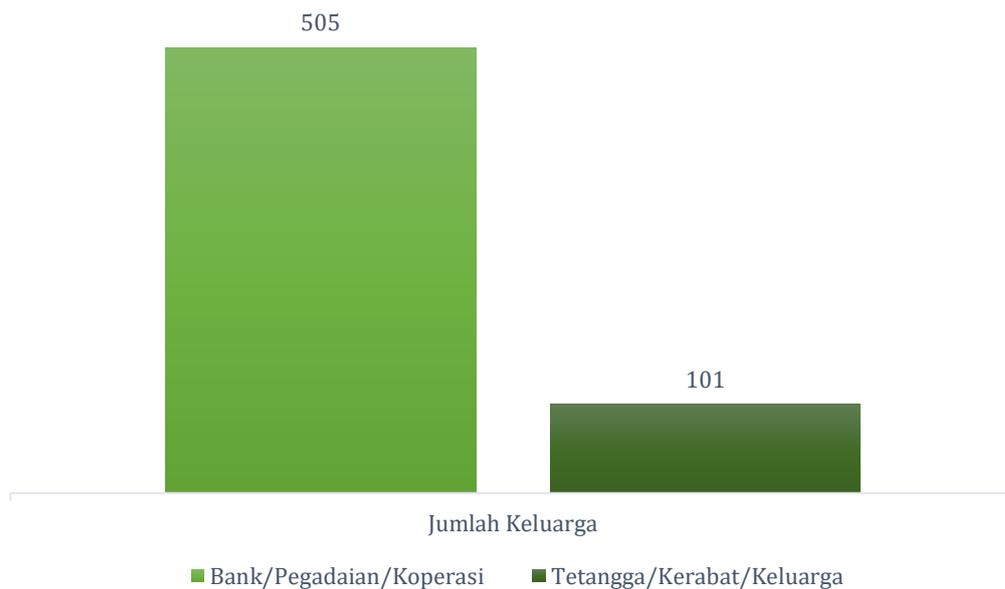
Dusun	Toyota	Honda	Daihatsu	Suzuki	Mitsubishi
Somba Utara	12	5	2	0	0
Somba Timur	6	5	3	3	1
Somba Selatan	5	1	2	1	0
Somba Tenggara	9	2	4	3	1
Labuang Utara	0	1	0	1	0
Labuang	0	0	0	0	0
Labuang Selatan	4	1	0	0	1
Total	36	15	11	8	3

Tabel 20 Jumlah keluarga berdasarkan partisipasi organisasi di Kelurahan Mosso

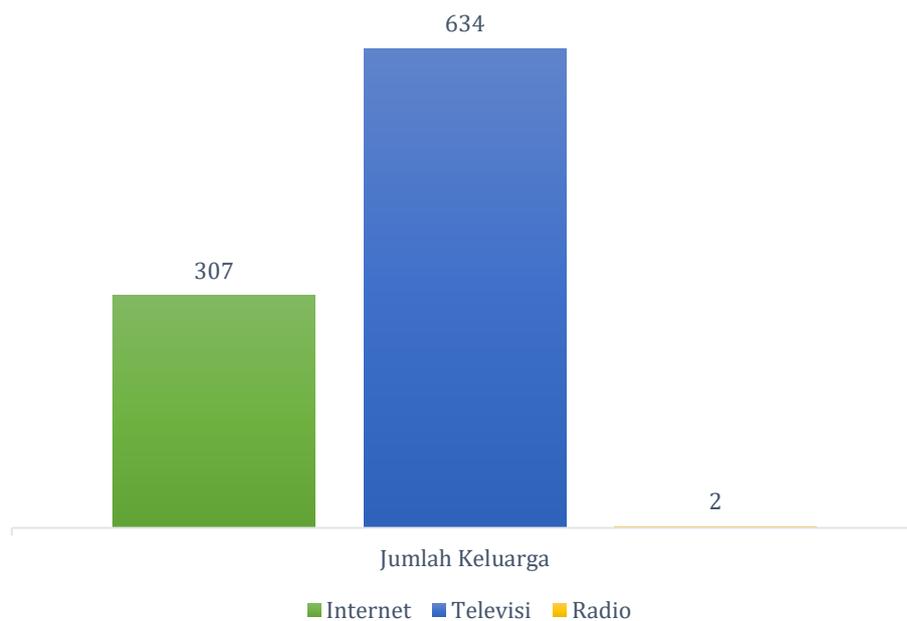
Partisipasi Organisasi	Somba Utara	Somba Timur	Somba Selatan	Somba Tenggara	Labuang Utara	Labuang	Labuang Selatan	TOTAL
Kelompok Tani	0	3	0	0	0	15	0	27
Kelompok Nelayan/ Budidaya	1	0	0	0	14	68	2	85
Kelompok Buruh	0	0	0	0	2	0	0	2
Ormas/Ormas Keagamaan	3	2	0	0	0	0	0	5
Kelompok Pengajian	0	0	1	0	0	0	0	1
Kegiatan Gotong Royong	0	0	0	0	0	0	1	1
Kelompok Seni/Budaya	0	0	0	0	0	1	0	1



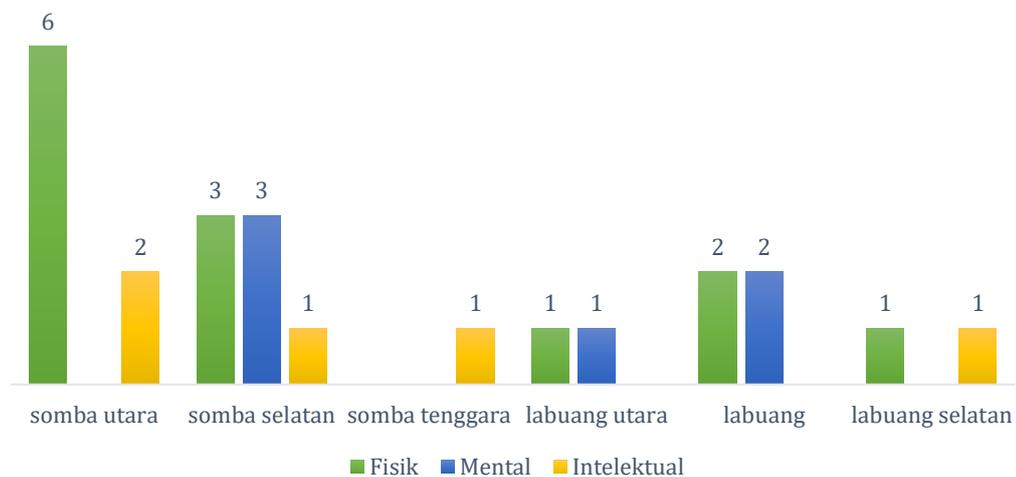
Gambar 42 Jumlah keluarga berdasarkan frekuensi *refreshing* di Kelurahan Mosso



Gambar 43 Jumlah keluarga berdasarkan sumber pinjaman di Kelurahan Mosso

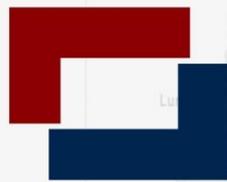


Gambar 44 Jumlah keluarga berdasarkan akses media informasi di Kelurahan Mosso



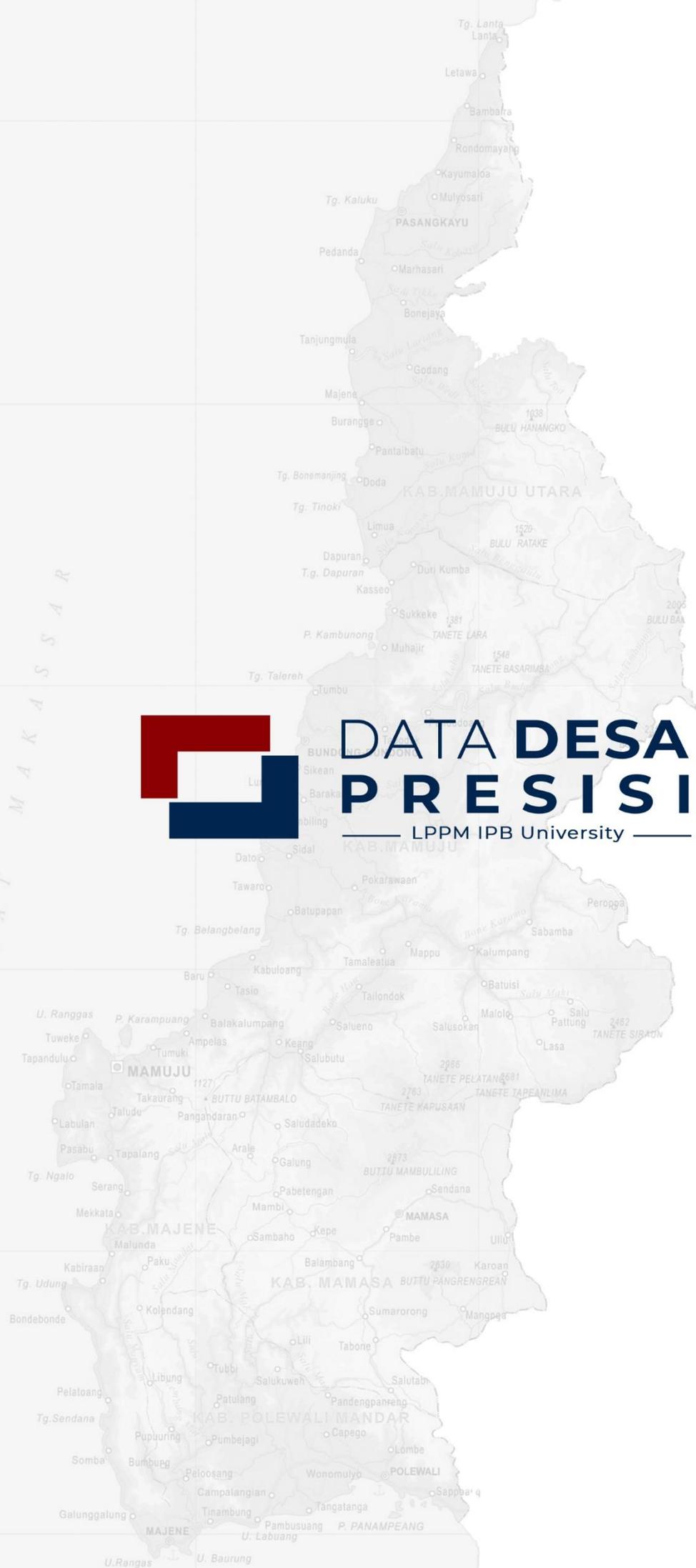
Gambar 45 Jumlah keluarga berdasarkan anggota keluarga penyandang disabilitas di Kelurahan Mosso

S E L A T
M A K A S S A R



DATA DESA PRESISI

LPPM IPB University





Bagian 7

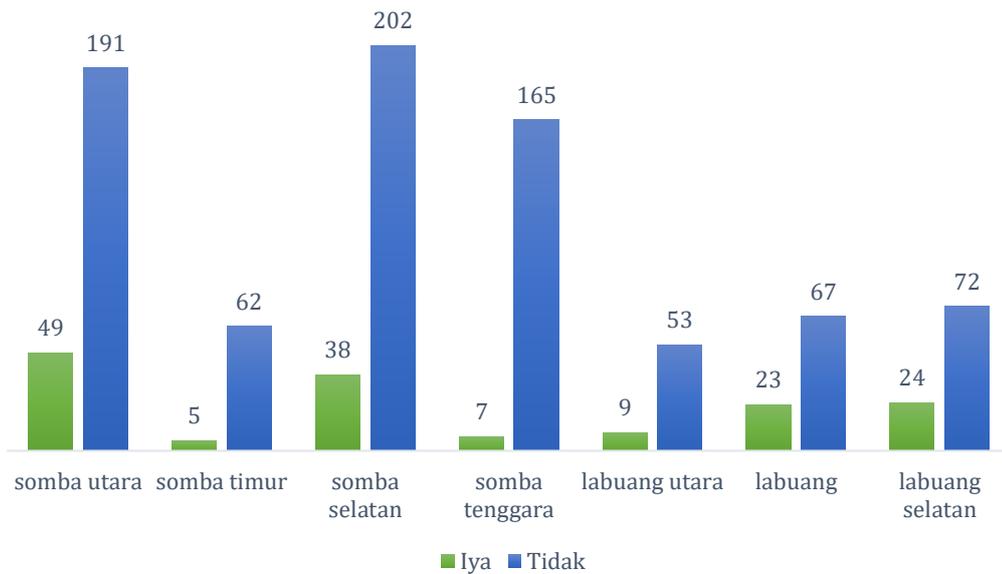
KESEHATAN, PEKERJAAN DAN JAMINAN SOSIAL

Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten
Majene
Provinsi Sulawesi Barat

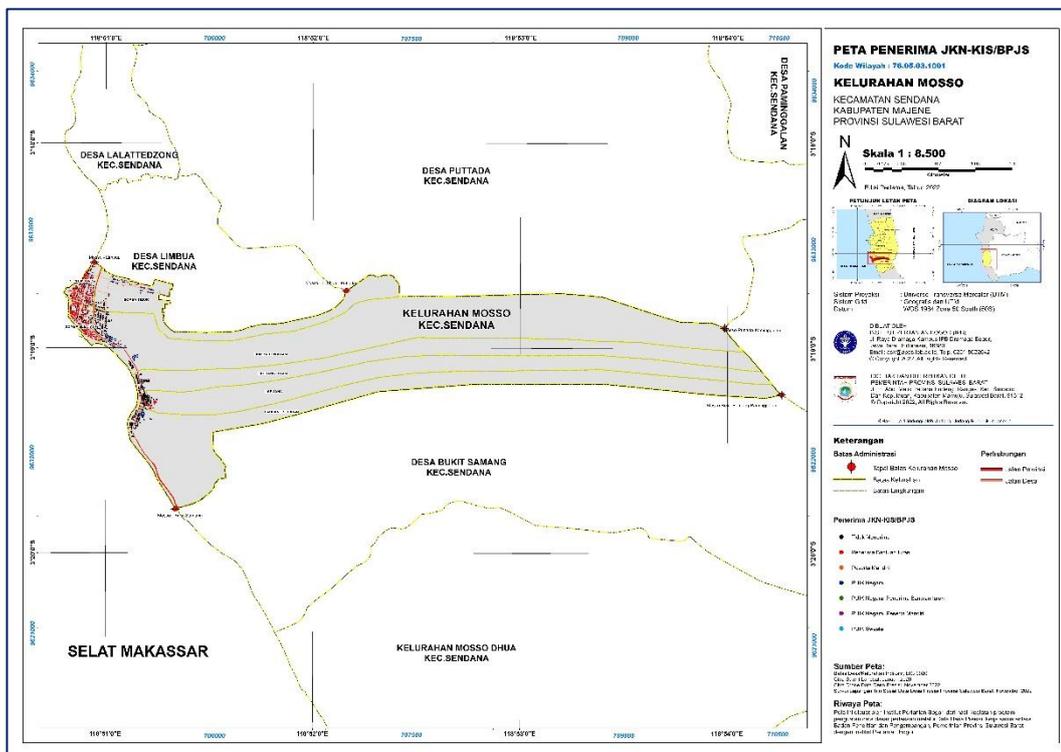
KESEHATAN, PEKERJAAN DAN JAMINAN SOSIAL

Aspek selanjutnya menggambarkan kondisi kesehatan, pekerjaan dan jaminan sosial pada penduduk di Kelurahan Mosso. Aspek ini menggambarkan kualitas hidup sekaligus penghidupan penduduk di suatu wilayah dengan sejumlah indikator diantaranya adalah pekerjaan utama, status pekerjaan utama, pekerjaan sampingan, BPJS Kesehatan, jumlah keluarga dengan penyakit berat, jumlah penyandang disabilitas, dan lain lain. Indikator pertama adalah terkait profesi pekerjaan utama dari penduduk di Mosso. Berdasarkan hasil pendataan menunjukkan bahwa sebanyak 2.737 penduduk di Mosso belum/tidak bekerja. Penting untuk digaris-bawahi, kategori tidak/belum bekerja dalam hal ini adalah jumlah agregat dari penduduk Mosso yang berstatus “ibu rumah tangga”, “pelajar/mahasiswa”, dan juga “pensiun dan lansia”. Profesi pekerjaan paling banyak pada penduduk di Mosso adalah sebagai nelayan/petambak yaitu sebanyak 380 jiwa. Kemudian diikuti guru/pendidik sebanyak 124 jiwa. Selanjutnya adalah status pekerjaan di Kelurahan Mosso. Status pekerjaan tidak bekerja di Mosso berjumlah 1.280 jiwa. Hal ini menggambarkan bahwa pengangguran yang ada di Mosso hampir setengah dari jumlah seluruh penduduk. Sedangkan untuk pekerjaan sampingan, hasil menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Mosso tidak memiliki pekerjaan sampingan, jumlahnya sebanyak 340 jiwa.

Pada aspek jaminan sosial, indikator BPJS ketenagakerjaan menunjukkan bahwa keluarga di Mosso mengikuti BPJS ketenagakerjaan jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, dan jaminan pensiun. Paling banyak penduduk Mosso mengikuti jaminan kecelakaan kerja yaitu sebanyak 101 keluarga. Selanjutnya adalah jumlah penyakit berat penduduk Mosso yaitu sebanyak 148 keluarga yang anggotanya menderita penyakit berat. Dengan kategori lainnya paling banyak diderita yaitu sebanyak 98 keluarga, kemudian selanjutnya berturut-turut adalah asam urat (57 keluarga), hipertensi (39 keluarga), lambung (37 keluarga), dan asma (29 keluarga). Data lebih rinci terkait pada aspek kesehatan, pekerjaan dan jaminan sosial Kelurahan Mosso disajikan dalam gambar dan tabel di bawah ini:



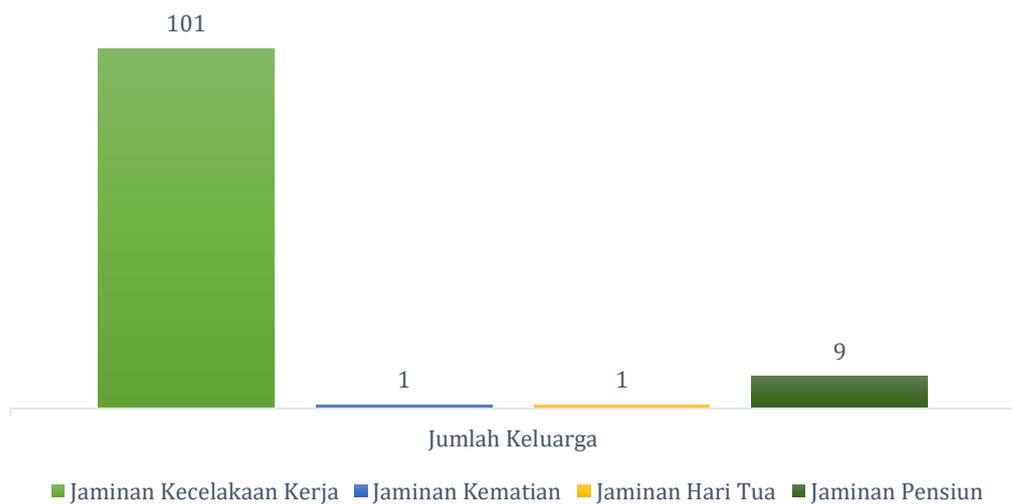
Gambar 46 Jumlah keluarga berdasarkan pengguna kb di Kelurahan Mosso



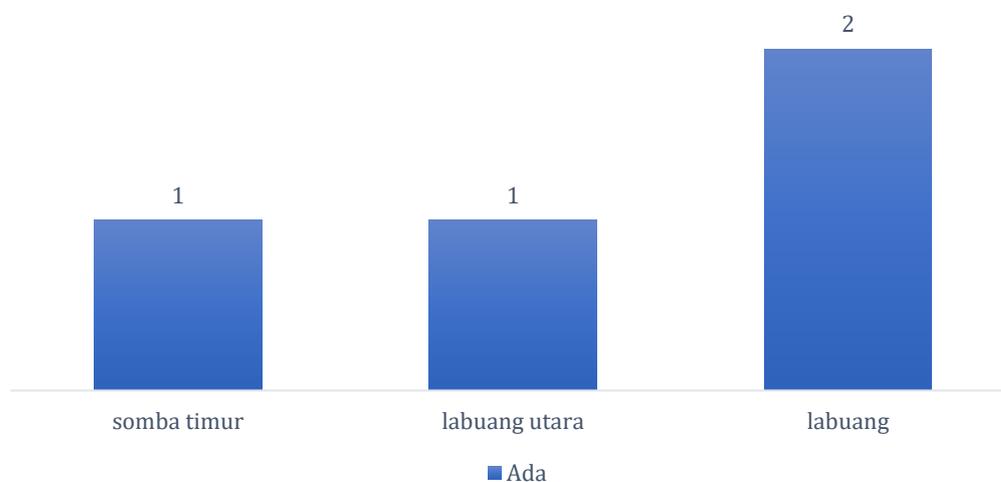
Gambar 47 Peta sebaran kepala keluarga berdasarkan penerima bantuan JKN-KIS/BPJS di Kelurahan Mosso

Tabel 21 Jumlah keluarga berdasarkan keikutsertaan JKN-KIS/BPJS di Kelurahan Mosso

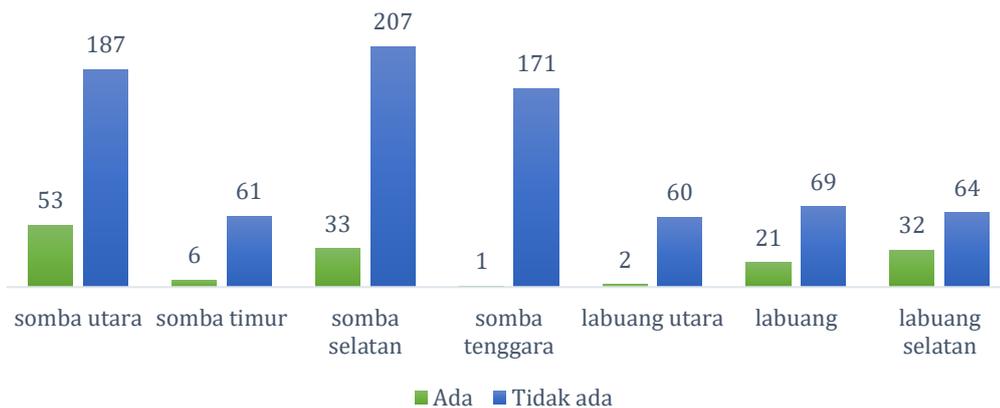
Dusun	Penerima Bantuan Iuran	Peserta Mandiri	PUIK Negara	PUIK Swasta
Somba Utara	613	37	175	2
Somba Timur	21	38	86	0
Somba Selatan	673	30	13	0
Somba Tenggara	1	3	170	3
Labuang Utara	8	0	0	0
Labuang	101	2	0	0
Labuang Selatan	3	7	97	0
TOTAL	1420	117	541	5



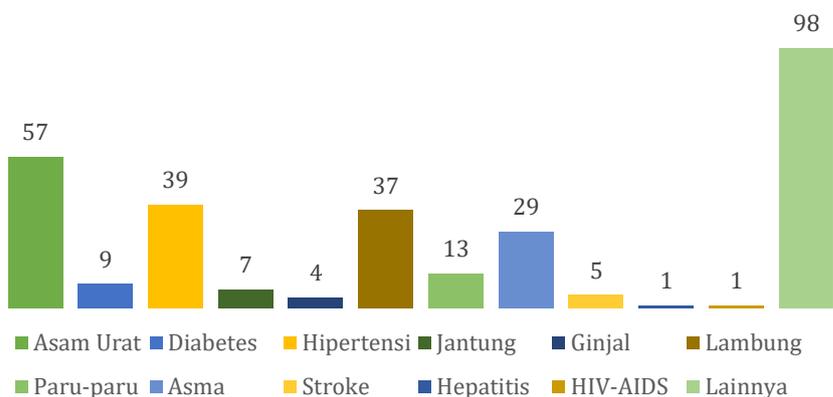
Gambar 48 Jumlah keluarga berdasarkan keikutsertaan BPJS ketenagakerjaan di Kelurahan Mosso



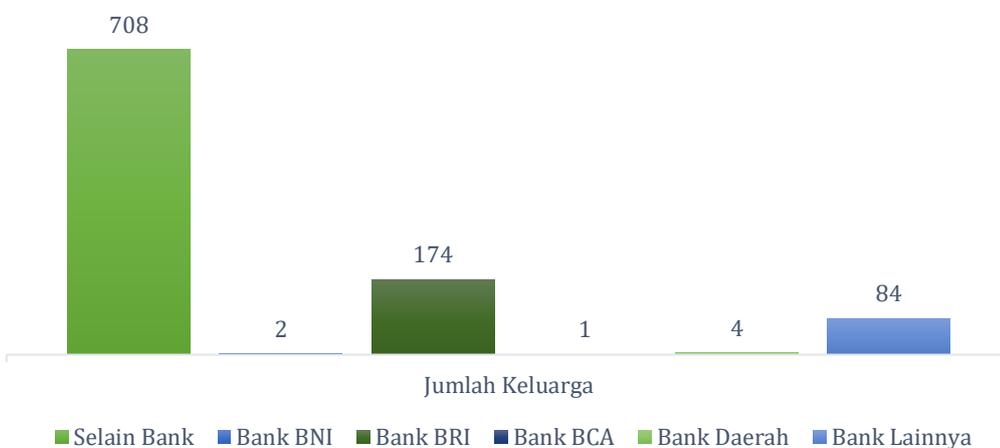
Gambar 49 Jumlah keluarga berdasarkan anggota keluarga menjadi TKI di Kelurahan Mosso



Gambar 50 Jumlah keluarga berdasarkan penyakit berat yang diderita di Kelurahan Mosso



Gambar 51 Jumlah keluarga berdasarkan jumlah penyakit berat di Kelurahan Mosso



Gambar 52 Jumlah keluarga berdasarkan tempat menabung di Kelurahan Mosso

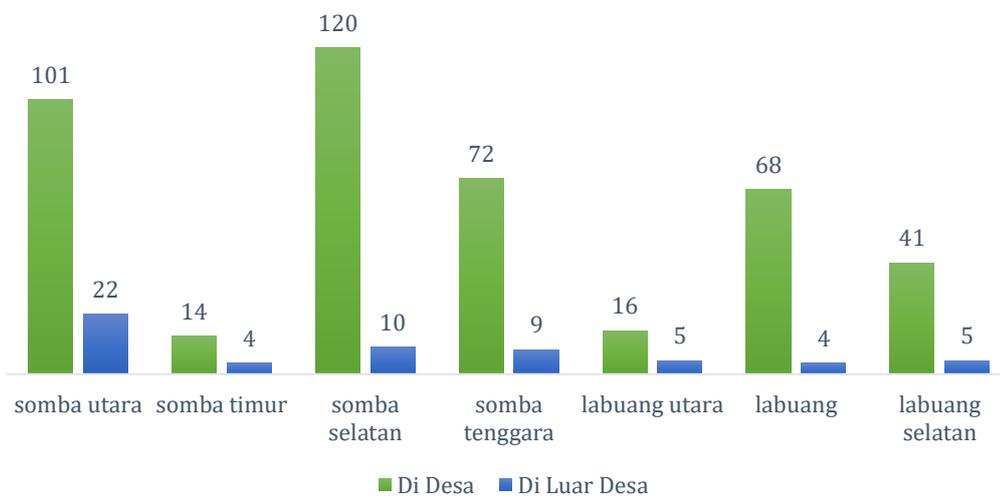
Tabel 22 Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan

Pekerjaan	Somba Utara	Somba Timur	Somba Selatan	Somba Tenggara	Labuang Utara	Labuang	Labuang Selatan	Total
Belum/Tidak Bekerja	634	149	674	469	199	280	332	2737
Asisten Rumah Tangga	12	11	2	45	3	17	0	90
Arsitek	0	0	1	0	0	0	0	1
Buruh Pabrik	4	4	4	3	8	9	1	33
Bidan	0	0	3	2	0	0	1	6
Dokter	0	0	0	1	0	0	0	1
Apoteker	0	1	0	0	0	0	0	1
Guru/Pendidik	53	29	16	19	2	1	4	124
Pekerja Serabutan	8	1	14	21	4	1	6	55
Montir	2	0	2	6	0	1	0	11
Nelayan/Petambak	101	0	123	12	22	80	42	380
Petani/Peternak	9	14	9	37	1	7	2	79
Pedagang	17	3	16	27	5	0	4	72
Pengemudi	4	0	3	6	0	0	1	14
Pekerja/Karyawan Swasta	32	11	36	8	1	5	3	96
Pegawai Lembaga Negara	21	9	9	6	1	0	1	47
Perawat	6	5	1	0	0	0	2	14
Taksi/Ojek/Ojol	1	0	0	2	0	0	0	3
Polisi	1	1	0	0	0	0	0	2
Security	0	0	1	0	1	0	0	2
Pelaut	0	0	0	0	2	1	0	3
Desainer Grafis/Fotografer /Videografer	0	0	2	0	0	0	0	2
Penjahit	0	1	0	2	0	0	0	3
Pengrajin	11	0	0	1	0	0	0	12

Tabel 23 Jumlah penduduk berdasarkan status pekerjaan di Kelurahan Mosso

Status Pekerjaan	Somba Utara	Somba Timur	Somba Selatan	Somba Tenggara	Labuang Utara	Labuang	Labuang Selatan	TOTAL
Tidak Bekerja	279	60	236	310	99	147	149	1280
Pelajar/Mahasiswa	193	63	257	100	53	74	109	849
Mengurus Rumah Tangga	151	23	176	54	47	59	74	584
Pensiun	9	3	2	5	0	0	0	19
Pegawai Tetap Lembaga Swasta/BUMN/BUMS	5	2	4	1	0	0	3	15
Pegawai Lembaga Negara dengan Kontrak Pekerjaan dan Waktu Tertentu	5	7	2	2	0	0	0	16
Outsourcing di Swasta/BUMN/BUMS	3	1	3	0	0	1	0	8
Pekerja Harian Lepas	72	17	69	84	27	48	7	324
Berusaha Sendiri	122	18	144	81	20	71	48	504

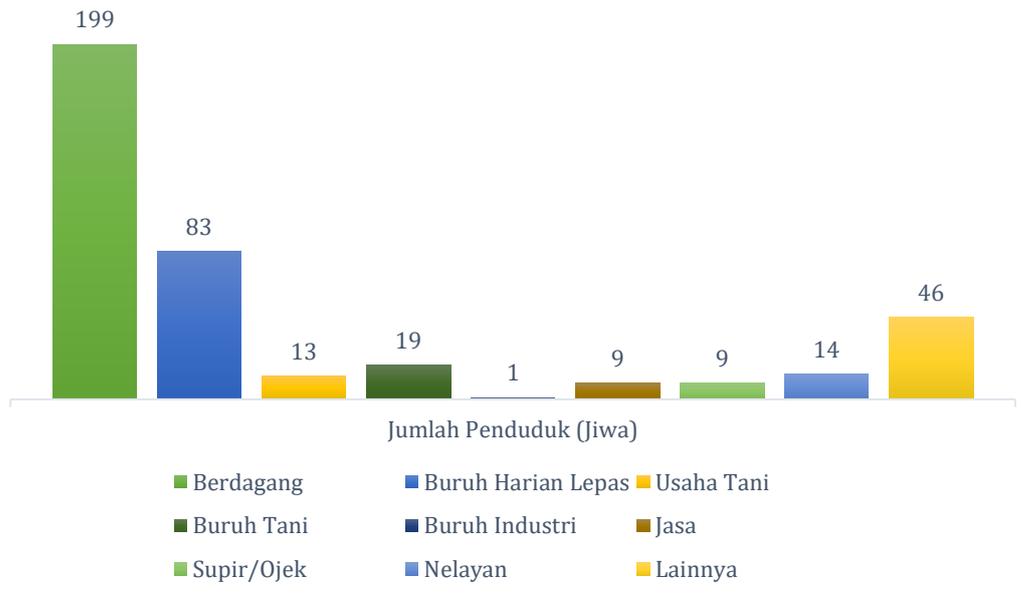
Status Pekerjaan	Somba Utara	Somba Timur	Somba Selatan	Somba Tenggara	Labuang Utara	Labuang	Labuang Selatan	TOTAL
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	41	31	8	14	2	0	4	100
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	7	1	2	1	0	0	2	13
Pegawai Lembaga Negara dengan Kontrak Pekerjaan	0	0	0	0	0	0	0	0
Pegawai Lembaga Negara Tanpa Perjanjian Kerja/Honoror	26	9	13	11	1	1	2	63
Pegawai Lembaga Swasta/BUMN/BUMS Tanpa Perjanjian Kerja/Honoror	3	4	0	4	0	1	1	13



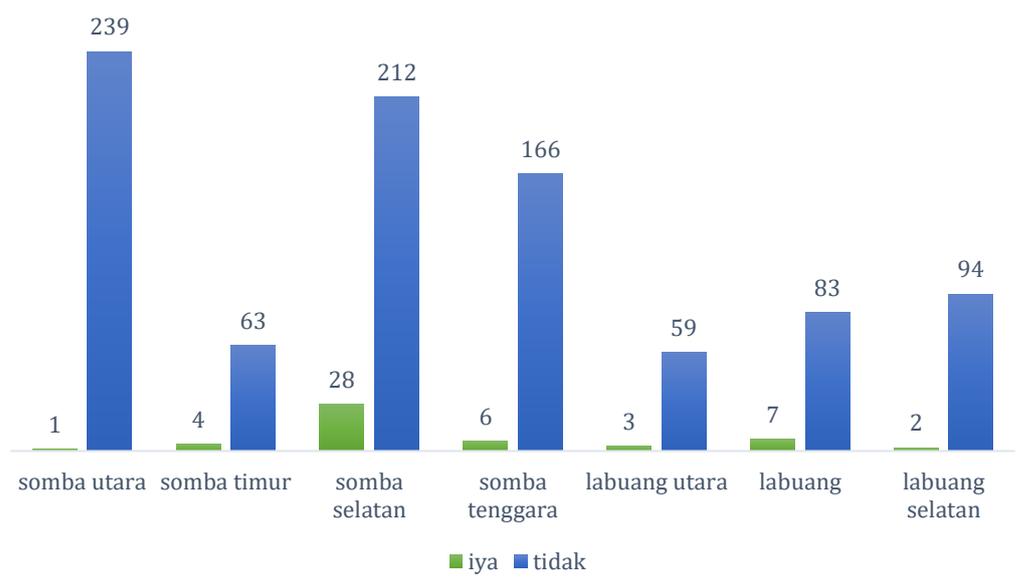
Gambar 53 Jumlah penduduk berdasarkan lokasi usaha di Kelurahan Mosso

Tabel 24 Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan sampingan di Kelurahan Mosso

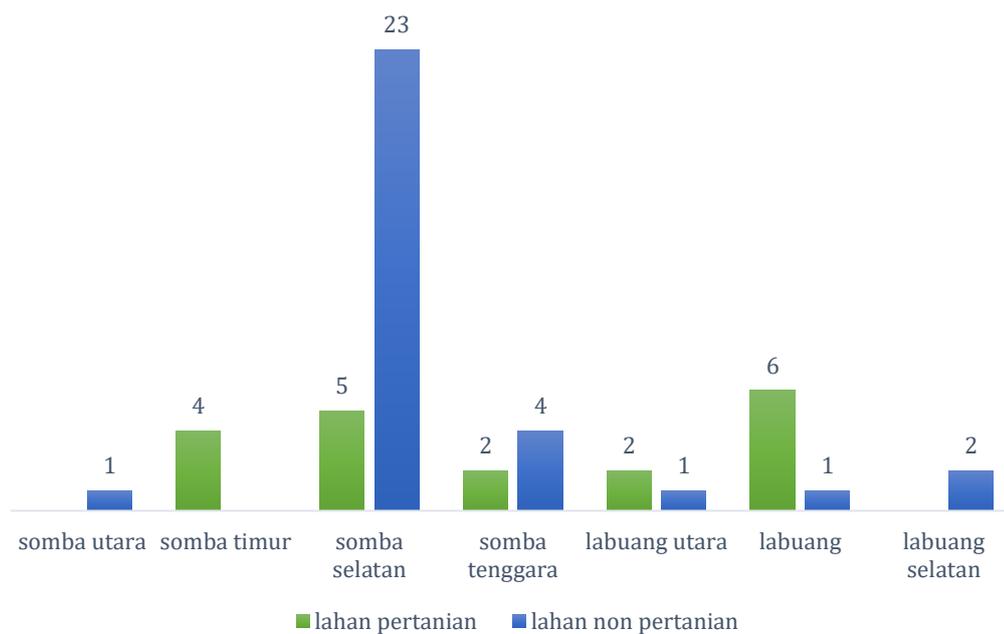
Pekerjaan	Somba Utara	Somba Timur	Somba Selatan	Somba Tenggara	Labuang Utara	Labuang	Labuang Selatan
Tidak Ada	812	197	868	592	234	354	340
Berdagang	61	21	28	41	6	11	31
Buruh Harian Lepas	9	3	4	23	7	20	17
Usaha Tani	3	4	0	2	0	2	2
Buruh Tani	2	3	3	0	1	5	5
Buruh Industri	0	0	1	0	0	0	0
Jasa	6	0	1	2	0	0	0
Sopir/ Ojek	1	1	2	3	1	1	0
Nelayan	7	0	2	1	0	3	1
Lainnya	16	11	7	3	0	6	3



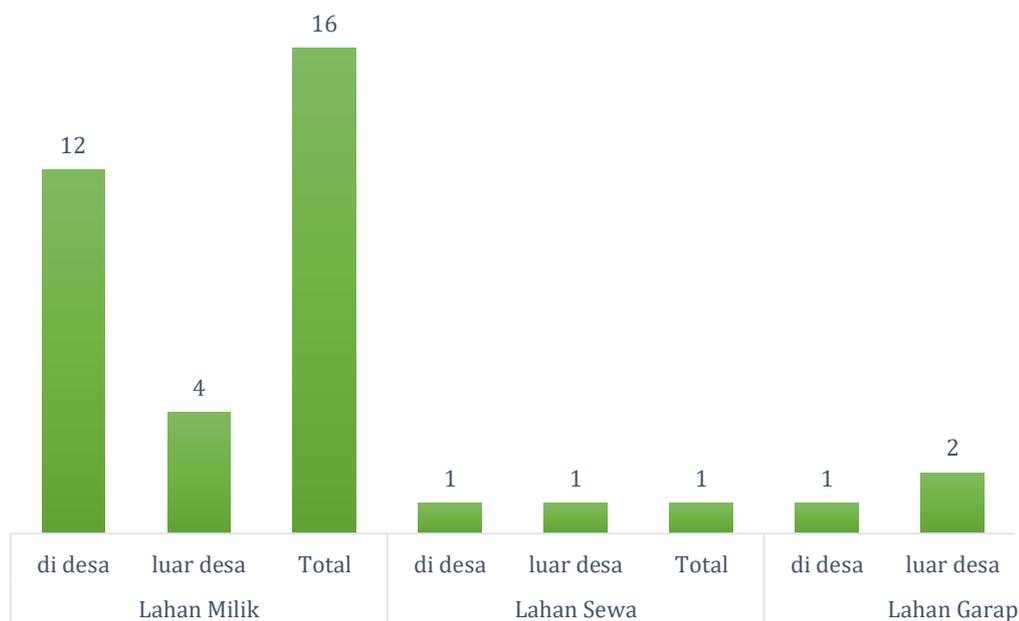
Gambar 54 Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan sampingan di Kelurahan Mosso



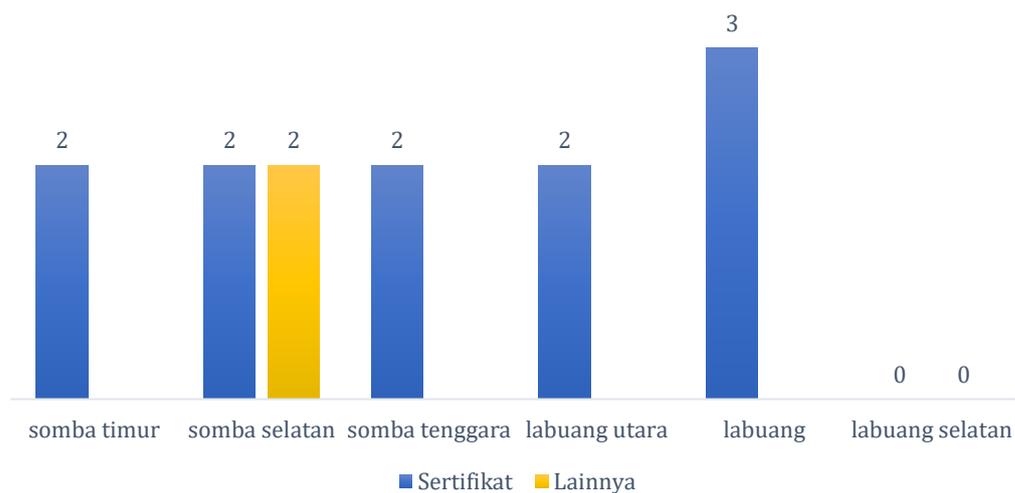
Gambar 55 Jumlah keluarga berdasarkan akses lahan pertanian di Kelurahan Mosso



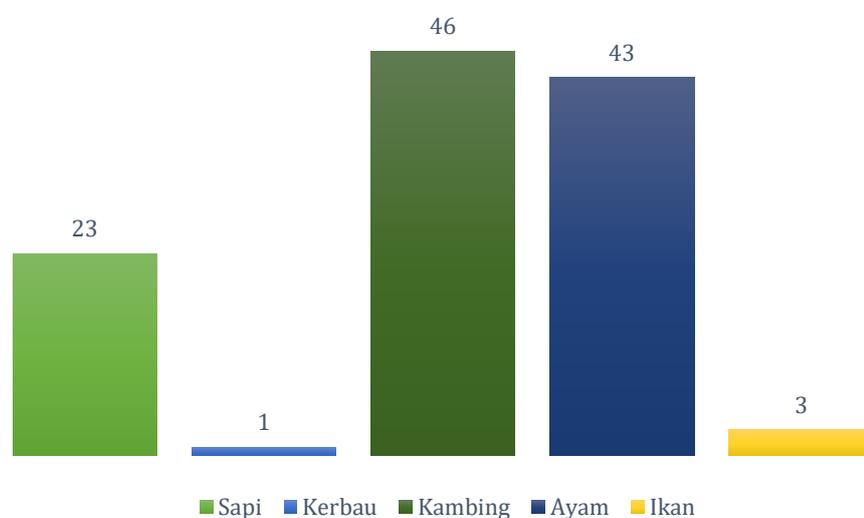
Gambar 56 Jumlah keluarga berdasarkan pemanfaatan lahan pertanian di Kelurahan Mosso



Gambar 57 Jumlah keluarga berdasarkan status dan lokasi lahan pertanian di Kelurahan Mosso



Gambar 58 Jumlah keluarga berdasarkan bukti kepemilikan lahan yang di Kelurahan Mosso



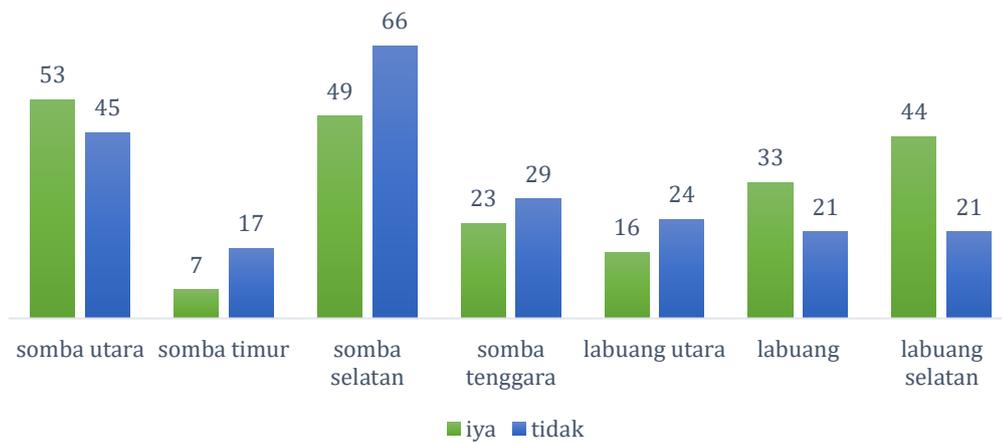
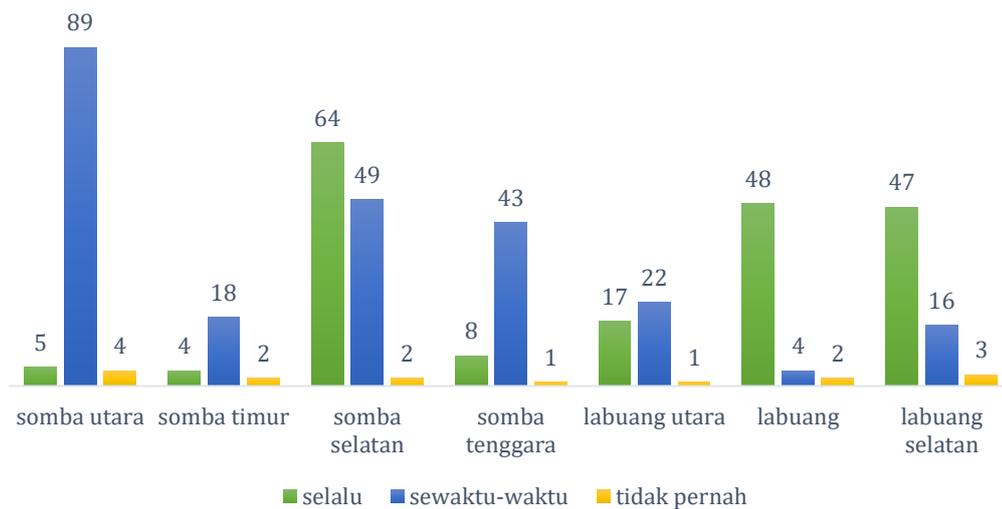
Gambar 59 Jumlah keluarga berdasarkan ternak yang dimiliki di Kelurahan Mosso

Tabel 25 Jumlah keluarga berdasarkan ternak yang dimiliki di Kelurahan Mosso

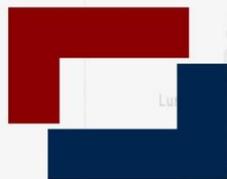
Dusun	Sapi	Kerbau	Kambing	Ayam	Ikan
Somba Utara	2	0	6	0	0
Somba Timur	8	0	11	5	0
Somba Selatan	2	0	2	0	0
Somba Tenggara	9	0	21	2	0
Labuang Utara	0	0	0	4	3
Labuang	0	0	4	20	0
Labuang Selatan	2	1	2	12	0

Tabel 26 Jumlah ternak yang dimiliki penduduk di Kelurahan Mosso

Dusun	Sapi (Ekor)	Kerbau (Ekor)	Kambing (Ekor)	Ayam (Ekor)	Ikan (kg)
Somba Utara	3	0	11	0	0
Somba Timur	27	0	67	36	0
Somba Selatan	3	0	4	0	0
Somba Tenggara	16	0	66	13	0
Labuang Utara	0	0	0	27	6
Labuang	0	0	9	54	0
Labuang Selatan	4	2	11	46	0

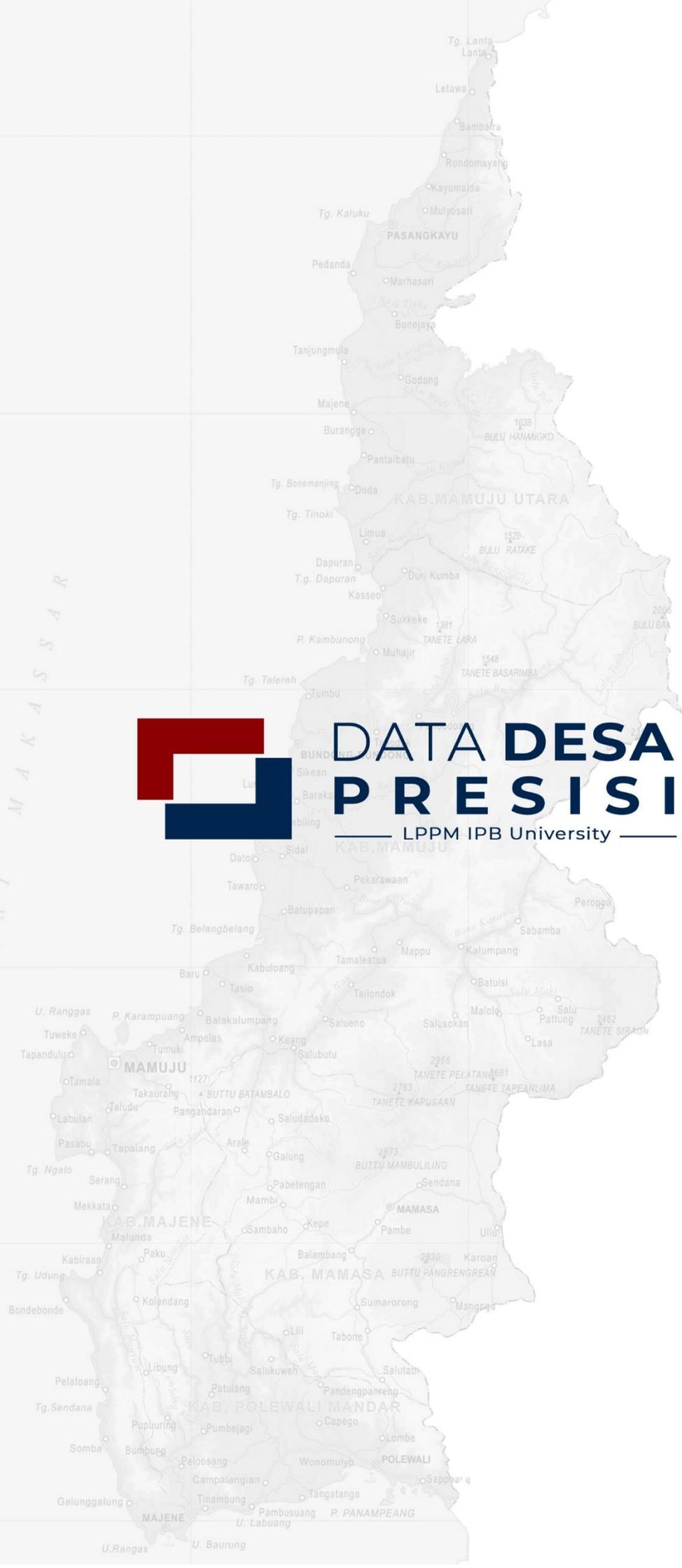
**Gambar 60** Jumlah balita penerima asi eksklusif di Kelurahan Mosso**Gambar 61** Jumlah keluarga berdasarkan frekuensi pemeriksaan kesehatan balita di Kelurahan Mosso

S E L A T M A K A S A R



DATA DESA P R E S I S I

LPPM IPB University



An aerial photograph of a coastal village with a blue overlay. The village features numerous small buildings with colorful roofs (red, blue, green) and is situated along a shoreline. The water is a deep blue, and the sky is a lighter blue. The text is centered over the image.

Bagian 8

SANDANG, PANGAN & PAPAN

Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten
Majene
Provinsi Sulawesi Barat

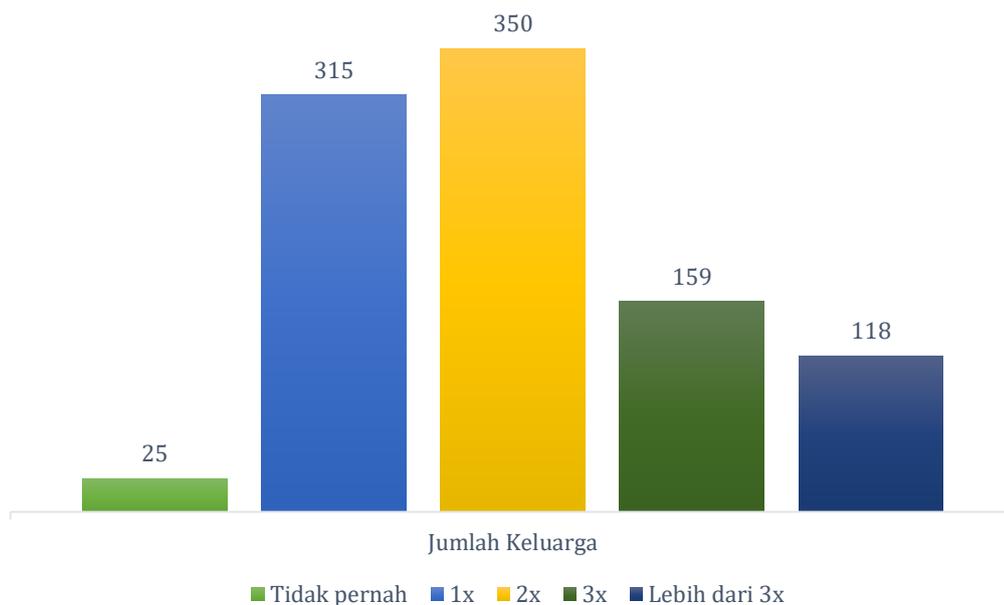
SANDANG, PANGAN DAN PAPAN

Aspek selanjutnya adalah gambaran sandang, pangan, dan papan pada penduduk di Kelurahan Mosso. Aspek ini menggambarkan kehidupan sehari-hari di wilayah Mosso dengan menggunakan indikator frekuensi pembelian baju keluarga, sumber air minum, bahan bakar masak, menu makan, daya PLN, kepemilikan jamban, status kepemilikan rumah dan lain lain. Secara umum, dari aspek sandang, mayoritas keluarga di Mosso membeli baju dengan frekuensi sebanyak 2 kali dalam setahun yaitu sebanyak 350 keluarga. Pada indikator sumber air minum dapat diketahui bahwa sumber air penduduk Mosso, antara lain mata air tak terlindungi, mata air terlindungi, sumur tak terlindungi, sumur terlindungi, sumur bor/pompa, ledeng eceran, ledeng meteran, air isi ulang, dan air kemasan bermerek. Paling banyak yaitu 547 keluarga yang menggunakan air isi ulang sebagai sumber air minum sehari-hari.

Selanjutnya, dari indikator penggunaan bahan bakar untuk masak dapat diketahui, penduduk Mosso menggunakan beberapa bahan bakar antara lain kayu bakar, arang, gas kota/biogas, gas 3 kg, dan gas lebih dari 3 kg. Mayoritas (850 keluarga) penduduk Mosso menggunakan gas 3 kg sebagai bahan bakar untuk memasak. Sedangkan sebanyak 6 keluarga tidak memasak di rumah. Dengan bahan bakar masak tersebut, diketahui frekuensi makan mayoritas penduduk Mosso adalah tiga kali sehari dengan 787 keluarga. Selanjutnya, berturut-turut adalah frekuensi makan sebanyak dua kali sehari berjumlah 108 keluarga, makan lebih dari tiga kali sehari sebanyak 68 keluarga, dan makan satu kali sehari sebanyak 4 keluarga.

Pada indikator kepemilikan jamban, hasil pendataan di Mosso menunjukkan bahwa masih terdapat 143 keluarga yang belum memiliki jamban di rumahnya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan 143 keluarga ini masih rendah. Sedangkan ada 824 keluarga lainnya yang sudah memiliki jamban pribadi di rumahnya. Kemudian indikator penggunaan daya listrik PLN di Mosso menunjukkan bahwa paling banyak penduduknya menggunakan daya sebesar 450 VA yaitu sebanyak 435 keluarga. Selanjutnya terbanyak kedua dengan daya 900 VA adalah sebanyak 407 keluarga. Sedangkan masih ada 46 keluarga yang masih/tidak menggunakan PLN.

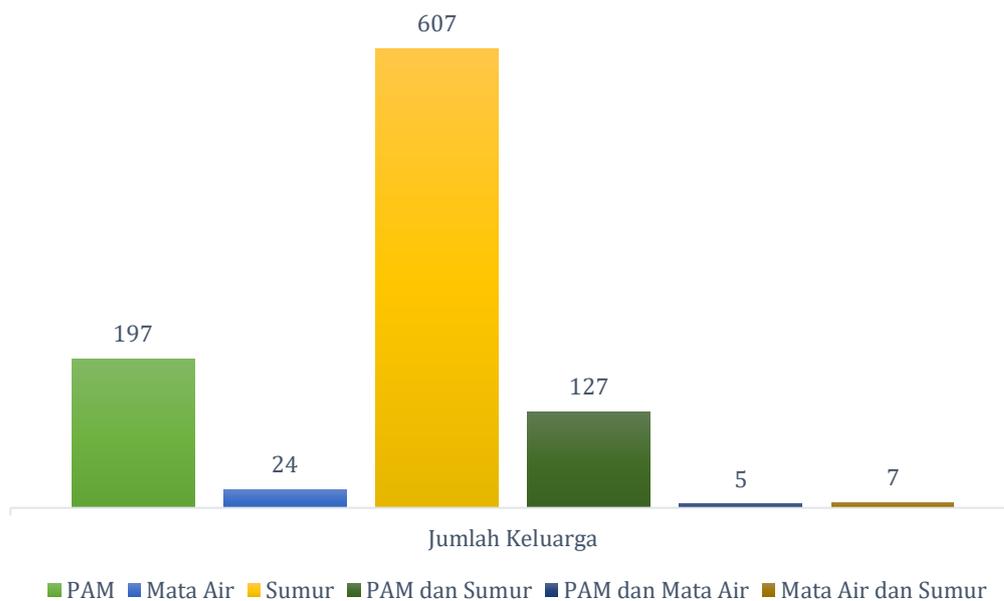
Data lebih rinci terkait pada aspek sandang, pangan, dan papan Kelurahan Mosso disajikan dalam gambar dan tabel di bawah ini:



Gambar 62 Jumlah keluarga berdasarkan frekuensi beli pakaian per tahun di Kelurahan Mosso

Tabel 27 Jumlah Keluarga Berdasarkan Frekuensi Beli Pakaian Per Tahun di Kelurahan Mosso

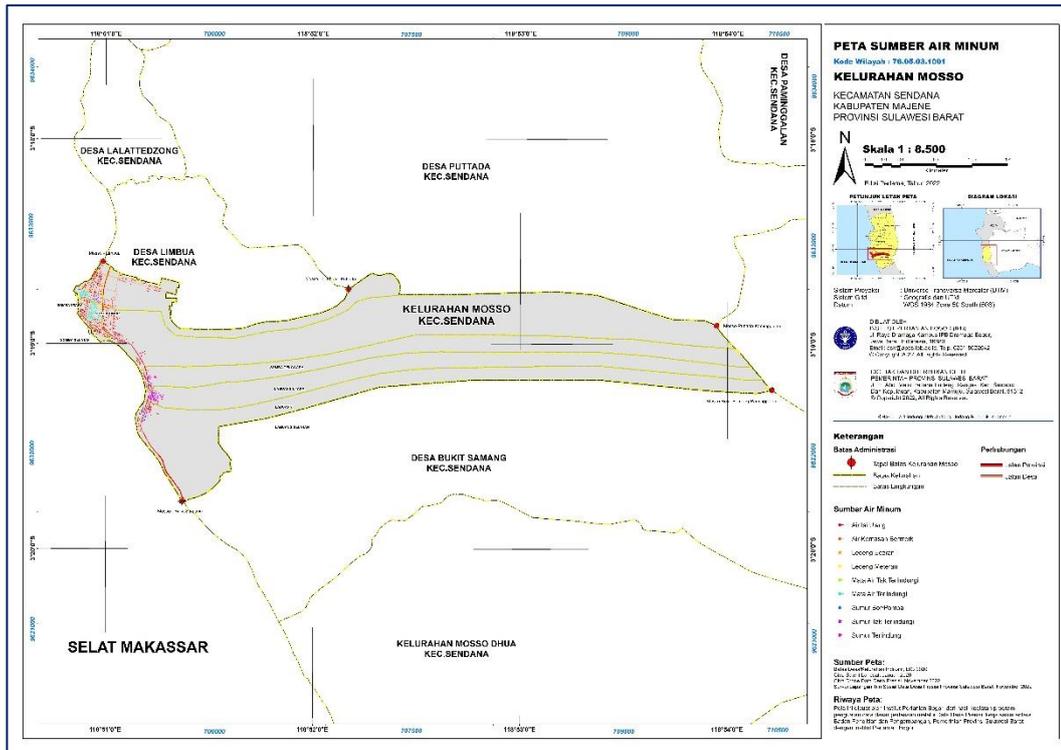
Dusun	beli baju per tahun				
	Tidak pernah	1 kali	2 kali	3 kali	Lebih dari 3 kali
Somba Utara	2	55	117	52	14
Somba Timur	0	12	40	11	4
Somba Selatan	10	80	74	55	21
Somba Tenggara	7	99	56	4	6
Labuang Utara	2	12	20	8	20
Labuang	0	18	28	22	22
Labuang Selatan	4	39	15	7	31
TOTAL	25	315	350	159	118



Gambar 63 Jumlah keluarga berdasarkan sumber air keluarga di Kelurahan Mosso

Tabel 28 Jumlah Keluarga Berdasarkan Sumber Air Keluarga di Kelurahan Mosso

Dusun	Sumber Air Keluarga					
	PA M	Mata Air	Sumur	PAM dan Sumur	PAM dan Mata Air	Mata Air dan Sumur
Somba Utara	29	1	153	57	0	0
Somba Timur	19	0	40	8	0	0
Somba Selatan	106	12	108	14	0	0
Somba Tenggara	30	11	72	48	5	6
Labuang Utara	11	0	51	0	0	0
Labuang	1	0	89	0	0	0
Labuang Selatan	1	0	94	0	0	1
TOTAL	197	24	607	127	5	7



Gambar 64 Peta sebaran kepala keluarga berdasarkan sumber air minum

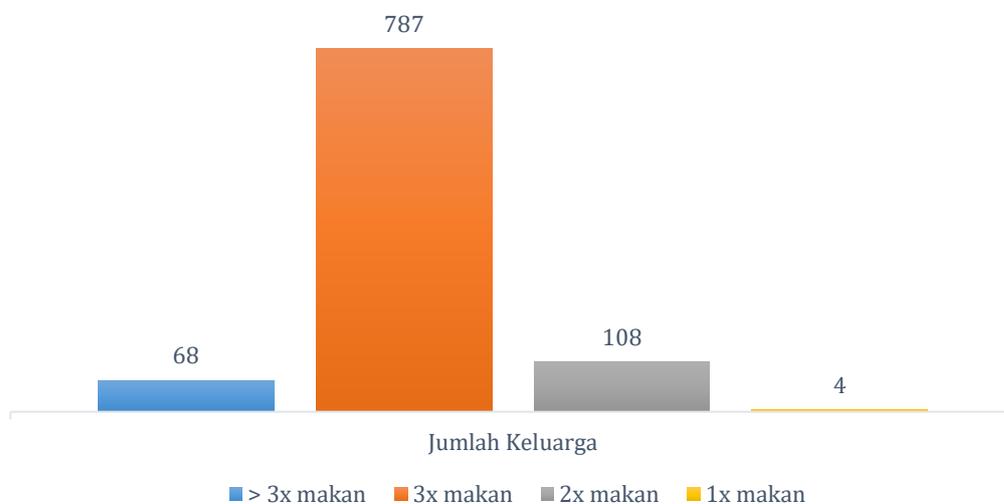
Gambar 64 mendeskripsikan bahwa sebagian besar keluarga di Kelurahan Mosso menggunakan sumber air dari air isi ulang. Terdapat 547 KK yang menggunakan sumber air dari air isi ulang, 181 KK menggunakan sumur terlindungi, 128 KK menggunakan mata air terlindungi, kemudian selebihnya tersebar dengan jumlah sedikit seperti terdapat pada **Tabel 29**.

Tabel 29 Jumlah Keluarga Berdasarkan Sumber Air Minum Keluarga Di Kelurahan Mosso

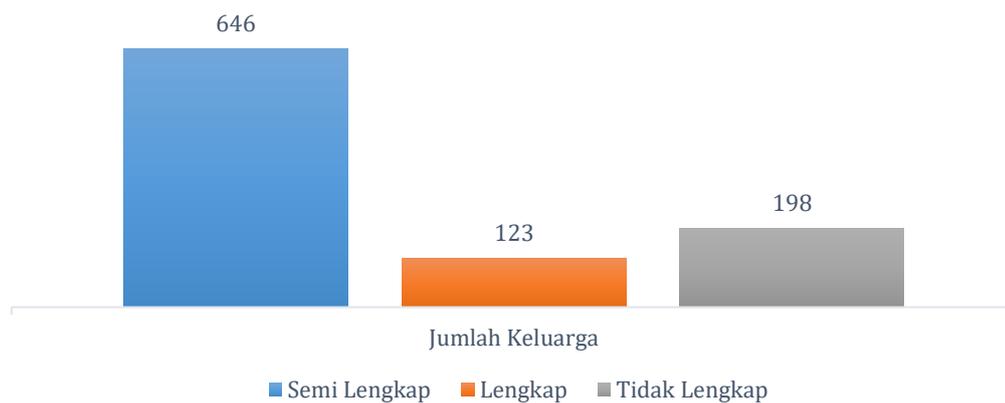
Sumber Air Minum	Dusun							TOTAL
	Somba Utara	Somba Timur	Somba Selatan	Somba Tenggara	Labuang Utara	Labuang	Labuang Selatan	
Mata air tak terlindungi	0	0	0	0	0	0	1	1
Mata air terlindungi	53	1	69	2	1	1	1	128
Sumur tak terlindungi	1	0	1	0	0	14	8	24
Sumur terlindungi	33	1	1	8	44	74	20	181
Sumur Bor/Pompa	6	0	2	1	3	1	21	34
Ledeng eceran	0	0	2	0	0	0	0	2
Ledeng meteran	21	0	18	0	0	0	0	39
Air isi ulang	120	63	147	159	14	0	44	547
Air kemasan bermerek	6	2	0	2	0	0	1	11

Tabel 30 Jumlah keluarga berdasarkan bahan bakar masak di Kelurahan Mosso

Dusun	Bahan Bakar Masak					
	Tidak Memasak Di Rumah	Kayu Bakar	Arang	Gas Kota/ Biogas	Gas 3 Kg	Gas Lebih Dari 3 Kg
Somba Utara	0	0	0	0	218	22
Somba Timur	0	0	0	0	46	21
Somba Selatan	1	0	0	0	186	52
Somba Tenggara	2	1	0	0	167	2
Labuang Utara	3	1	0	0	57	1
Labuang	0	2	1	1	86	0
Labuang Selatan	0	3	0	0	90	3
TOTAL	6	7	1	1	850	101

**Gambar 65** Jumlah keluarga berdasarkan frekuensi makan per hari di Kelurahan Mosso**Tabel 31** Jumlah keluarga berdasarkan frekuensi makan per hari di Kelurahan Mosso

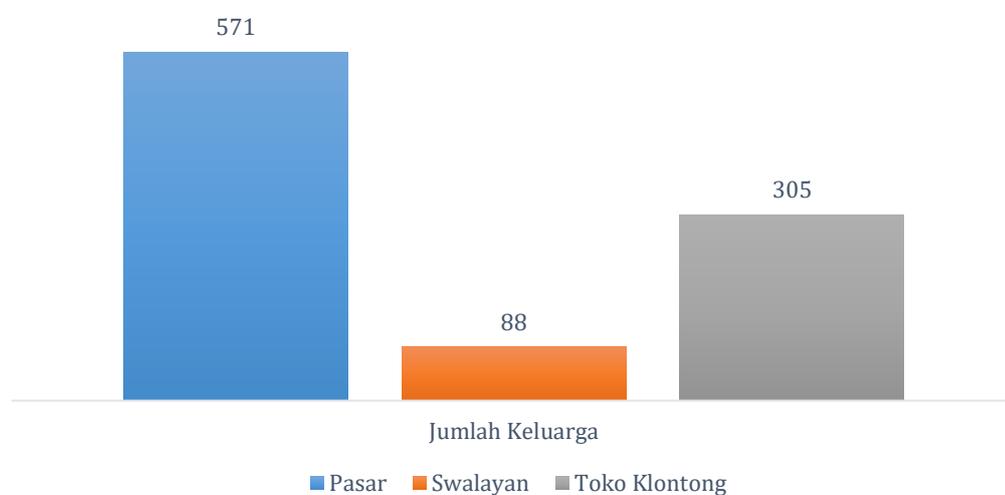
Dusun	Frekuensi Makan (Kali)			
	Lebih dari 3	3	2	1
Somba Utara	3	178	58	1
Somba Timur	0	65	2	0
Somba Selatan	25	214	0	1
Somba Tenggara	31	131	8	2
Labuang Utara	2	52	8	0
Labuang	3	57	30	0
Labuang Selatan	4	90	2	0
TOTAL	68	787	108	4



Gambar 66 Jumlah keluarga berdasarkan kelengkapan menu makanan Di Kelurahan Mosso

Tabel 32 Jumlah keluarga berdasarkan kelengkapan menu makanan di Kelurahan Mosso

Dusun	Menu Makan		
	Semi Lengkap	Lengkap	Tidak Lengkap
Somba Utara	215	22	3
Somba Timur	60	3	4
Somba Selatan	72	91	77
Somba Tenggara	128	4	40
Labuang Utara	36	0	26
Labuang	46	0	44
Labuang Selatan	89	3	4
TOTAL	646	123	198



Gambar 67 Jumlah keluarga berdasarkan tempat belanja kebutuhan pokok di Kelurahan Mosso

Tabel 33 Jumlah keluarga berdasarkan kelengkapan menu makanan di Kelurahan Mosso

Dusun	Lokasi Belanja Kebutuhan Pokok		
	Pasar	Swalayan	Toko Kelontong
Somba Utara	103	1	134
Somba Timur	57	10	0
Somba Selatan	98	0	141
Somba Tenggara	95	77	0
Labuang Utara	47	0	15
Labuang	90	0	0
Labuang Selatan	81	0	15
TOTAL	571	88	305

Tabel 34 konsumsi karbohidrat per bulan di Kelurahan Mosso

Sumber Karbohidrat	Somba Utara	Somba Timur	Somba Selatan	Somba Tenggara	Labuang Utara	Labuang	Labuang Selatan	TOTAL
Beras (liter)	8637	2429	9355	5172	2191	3361	3539.5	34684.5
Biskuit (Bungkus)	377940	39860	15822	46650	18200	14705	33443	546620
Jagung (Kg)	200.5	65.5	100.7	82.5	77.25	44	52	622.45
Kentang (Kg)	87.5	38.5	1.15	28	6	1	11.4	173.55
Mie (bungkus)	3182	1463	1044	2144	917	658	1618	11026
Roti Tawar (Bungkus)	196.5	104	27	103	12	22	93	557.5
Singkong (Kg)	67	38	17.5	96	23	24	20.2	285.7
Sukun (Kg)	18.5	21	9	52	16.75	0	2	119.25
Beras ketan (Kg)	117.5	37	36.5	75	9	37	34	346

Tabel 35 Jumlah konsumsi lauk hewani per bulan di Kelurahan Mosso

Lauk Hewani	Somba Utara	Somba Timur	Somba Selatan	Somba Tenggara	Labuang Utara	Labuang	Labuang Selatan	TOTAL
Daging Sapi	15.5	3	8	14	1	0	2	43.5
Daging Ayam	127.62	89.5	132.5	70	4	1	108.76	533.38
Ikan Segar	1958	588	2183	829	643	803	1614	8618
Ikan Kering Asin	509	34	430	59	115	106	112.2	1365.2
Telur Ayam	345.9	195	257.5	351.5	79.75	108	202	1539.65

Tabel 36 Jumlah konsumsi lauk nabati per bulan di Kelurahan Mosso

Laik Nabati	Somba Utara	Somba Timur	Somba Selatan	Somba Tenggara	Labuang Utara	Labuang	Labuang Selatan	TOTAL
Kacang Hijau	100	3.5	16	11	13.5	0	12	156
Kacang Kedelai	42	2.5	16	7	5	2	0	74.5
Kacang Merah	0.5	8	8	0	5	0	0	21.5
Kacang Mete	9.5	0	0	9	5	0	0	23.5
Tahu	1256	495	57	902	329	111	464	3614
Tempe	1456	430	261.5	800	379	116	658	4100.5

Tabel 37 Jumlah konsumsi sayuran per bulan di Kelurahan Mosso

Sayuran	Somba Utara	Somba Timur	Somba Selatan	Somba Tenggara	Labuang Utara	Labuang	Labuang Selatan	TOTAL
Bayam	387	166	121	301	156.25	102	216	1449.25
Kangkung	335.6	34	81.6	277	82	84	236	1130.2
Sawi	210	58	96	194	40	40	235	873
Terong	86	58	144	25.5	34	28	65	440.5
Oyong	9.5	0	0	0	2	0	0	11.5
Daun Singkong	25.5	3	0	17	2	0	1	48.5
Daun Ubi	14.5	3	1	15	2	0	7.25	42.75

Tabel 38 Jumlah konsumsi buah-buahan per bulan di Kelurahan Mosso

Buah-buahan	Somba Utara	Somba Timur	Somba Selatan	Somba Tenggara	Labuang Utara	Labuang	Labuang Selatan	TOTAL
Jeruk	186.1	46	102.2	75.5	161.5	43	36.53	650.83
Mangga	138	57	17.5	148	4	16	42.5	423
Pepaya	223	182	11	155.5	11	7	71	660.5
Pisang	526	190	299	142	290.25	269	529	2245.25
Alpukat	5.5	11	8	1	2	0	0	27.5
Semangka	60.5	87	24	79.5	16	10	56	333
Melon	15	1	8	1	2	0	1	28

Tabel 39 Jumlah konsumsi bumbu per bulan di Kelurahan Mosso

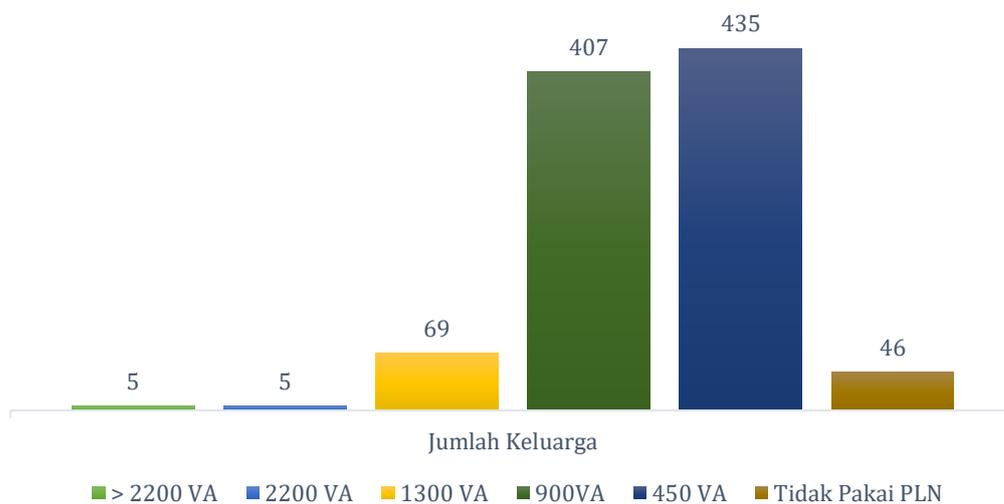
Bumbu	Somba Utara	Somba Timur	Somba Selatan	Somba Tenggara	Labuang Utara	Labuang	Labuang Selatan	TOTAL
Cabai	301	68.5	250.2	177	198.25	176	135.3	1306.25
Bawang Merah	221.7	72	181.9	169	178.1	161	90.7	1074.4
Bawang Putih	189.2	57.5	141	158.5	101.4	141	53.75	842.35

Tabel 40 Jumlah konsumsi bahan masak per bulan di Kelurahan Mosso

Bahan Masak	Somba Utara	Somba Timur	Somba Selatan	Somba Tenggara	Labuang Utara	Labuang	Labuang Selatan	TOTAL
Minyak Goreng	836	282	570.8	826	327.2	567	657.25	4066.25
Gas	1687.5	535.5	1064	1000	436	409	679	5811
Garam	128150	24038	62300	72500	21700	67450	30650	406788
Gula	599.5	151	372.7	386	311.5	294.5	390	2505.2

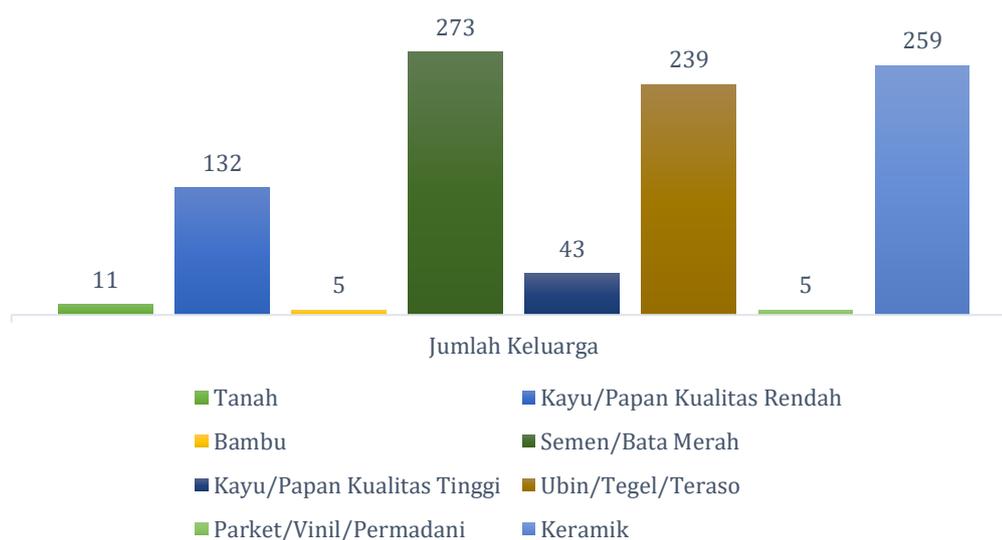
Tabel 41 Jumlah konsumsi bahan pelengkap per bulan di Kelurahan Mosso

Dusun	Somba Utara	Somba Timur	Somba Selatan	Somba Tenggara	Labuang Utara	Labuang	Labuang Selatan	TOTAL
Susu	1059	1275	374	616	162	150	595	4231
Teh	4004	2085	1660	4566	1783	1828	2408	18334
Kopi	3292	1830	1963	3887	2010	2117	3515	18614
Rokok	3748	642	2544	1347	484	1651	1628	12044

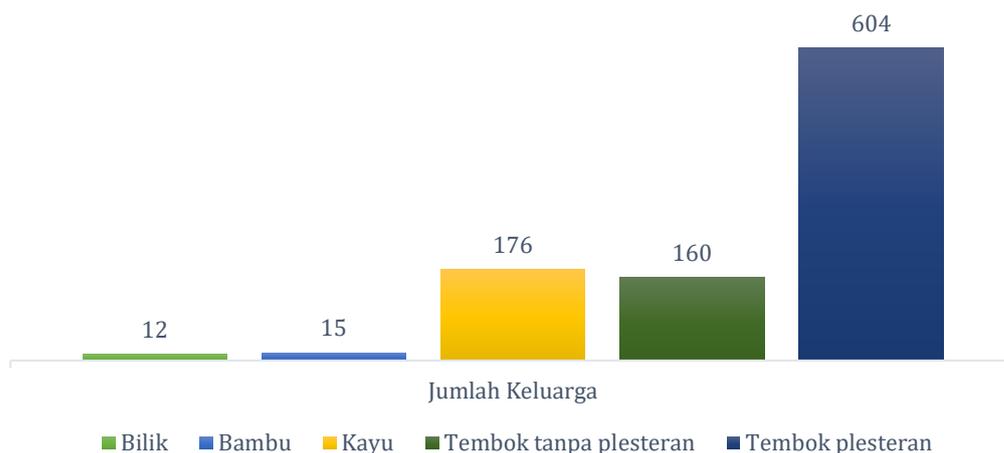
**Gambar 68** Jumlah keluarga berdasarkan penggunaan daya listrik (PLN) di Kelurahan Mosso

Tabel 42 Jumlah keluarga berdasarkan penggunaan daya listrik (PLN) di Kelurahan Mosso

Dusun	Daya Listrik					
	> 2200 VA	2200 VA	1300 VA	900 VA	450 VA	Tidak Pakai PLN
Somba Utara	1	1	23	109	99	7
Somba Timur	2	1	19	27	16	2
Somba Selatan	0	1	5	91	135	8
Somba Tenggara	2	2	13	70	85	0
Labuang Utara	0	0	2	31	20	9
Labuang	0	0	3	39	38	10
Labuang Selatan	0	0	4	40	42	10
TOTAL	5	5	69	407	435	46

**Gambar 69** Jumlah keluarga berdasarkan jenis lantai rumah yang ditinggali di Kelurahan Mosso**Tabel 43** Jumlah keluarga berdasarkan jenis lantai rumah yang ditinggali di Kelurahan Mosso

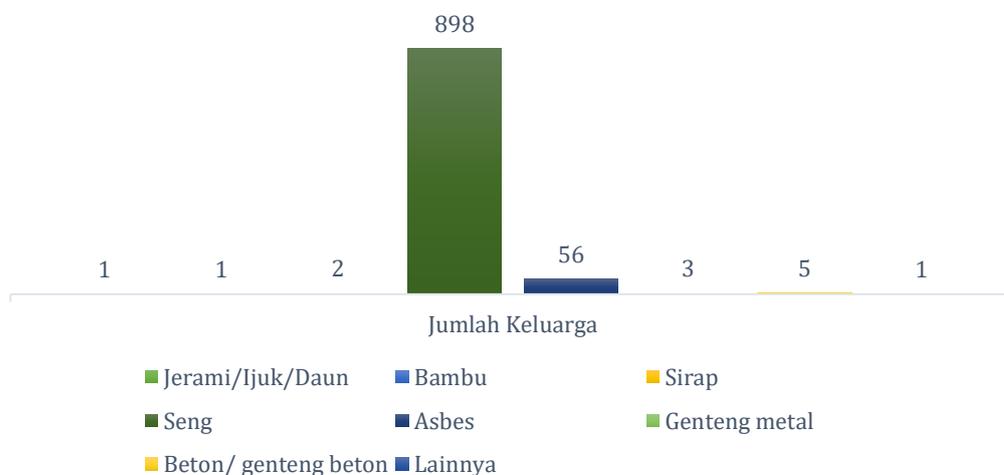
Jenis Lantai	Somba Utara	Somba Timur	Somba Selatan	Somba Tenggara	Labuang Utara	Labuang	Labuang Selatan	TOTAL
Tanah	2	0	1	1	5	2	0	11
Kayu/Papan Kualitas Rendah	10	4	31	35	8	24	20	132
Bambu	2	0	0	2	0	1	0	5
Semen/Bata Merah	62	17	72	38	26	33	25	273
Kayu/Papan Kualitas Tinggi	21	3	5	4	1	5	4	43
Ubin/Tegel/Teraso	140	13	3	33	12	17	21	239
Parket/Vinil/Permadani	3	0	1	0	1	0	0	5
Keramik	0	30	127	59	9	8	26	259
Marmar/Granit	0	0	0	0	0	0	0	0



Gambar 70 Jumlah Keluarga Berdasarkan Jenis Dinding Rumah Yang Ditinggali Di Kelurahan Mosso

Tabel 44 Jumlah keluarga berdasarkan jenis dinding rumah yang ditinggali di Kelurahan Mosso

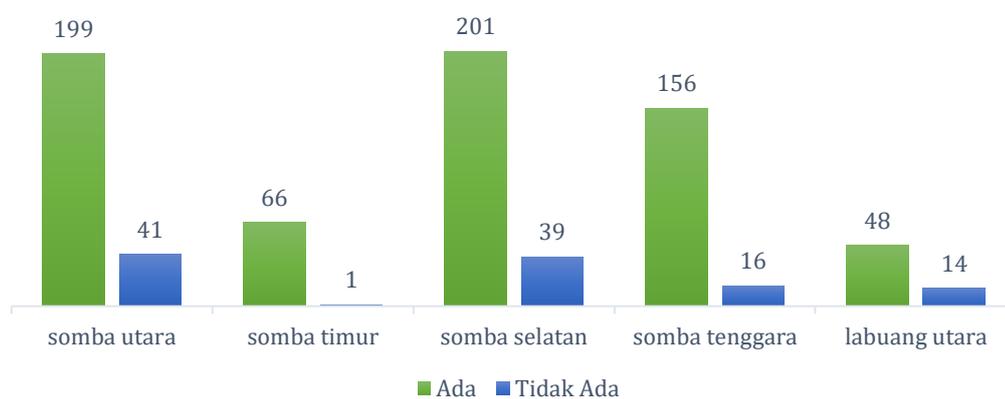
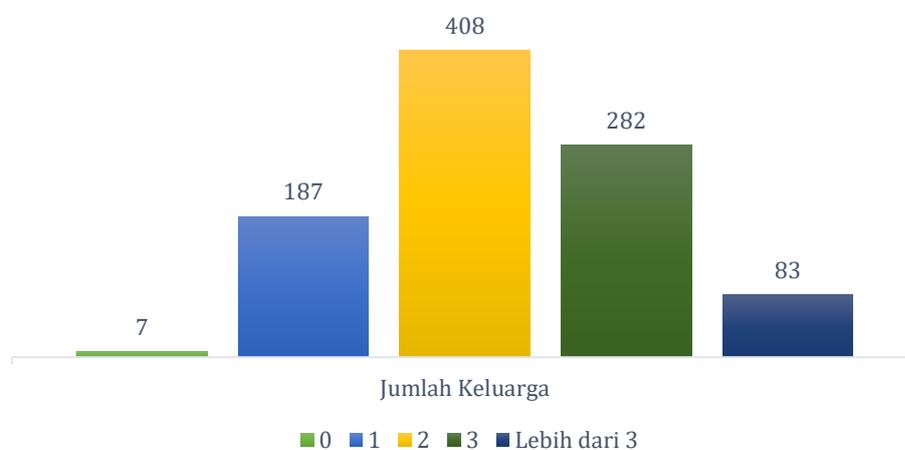
Jenis Dinding	Somba Utara	Somba Timur	Somba Selatan	Somba Tenggara	Labuang Utara	Labuang	Labuang Selatan	TOTAL
Bilik	2	0	4	3	2	0	1	6
Bambu	6	0	5	3	0	0	1	1
Kayu	29	8	32	42	13	31	21	399
Tembok tanpa plesteran	47	7	27	25	12	23	19	221
Tembok plesteran	156	52	172	99	35	36	54	322



Gambar 71 Jumlah keluarga berdasarkan jenis atap rumah yang ditinggali di Kelurahan Mosso

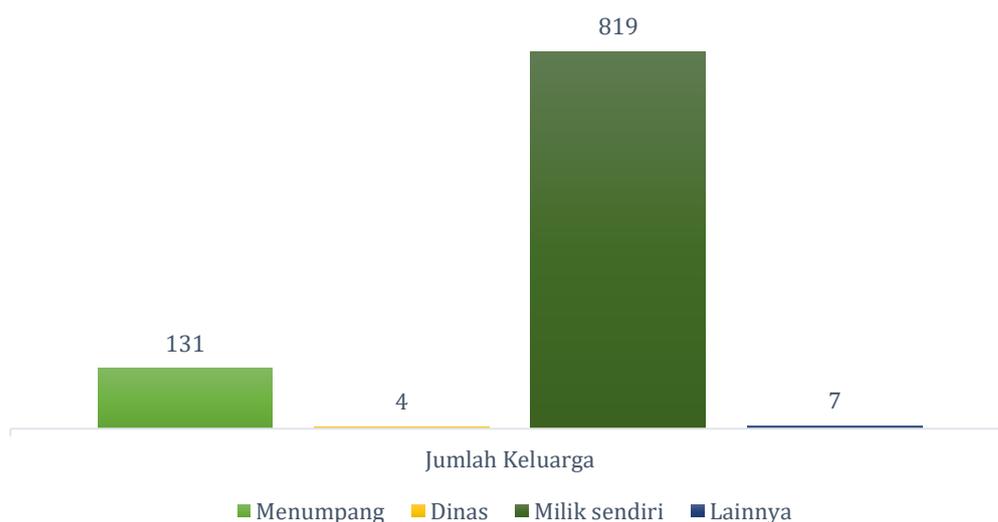
Tabel 45 Jumlah keluarga berdasarkan jenis atap rumah yang ditinggali di Kelurahan Mosso

Jenis Atap	Somba Utara	Somba Timur	Somba Selatan	Somba Tenggara	Labuang Utara	Labuang	Labuang Selatan	TOTAL
Jerami/ Ijuk/ Daun	1	0	0	0	0	0	0	1
Bambu	0	0	1	0	0	0	0	1
Sirap	0	0	0	1	0	0	1	2
Seng	193	67	238	167	59	90	84	898
Asbes	43	0	1	1	2	0	9	56
Genteng Metal	0	0	0	3	0	0	0	3
Beton/Genteng Beton	3	0	0	0	0	0	2	5
Lainnya	0	0	0	0	1	0	0	1

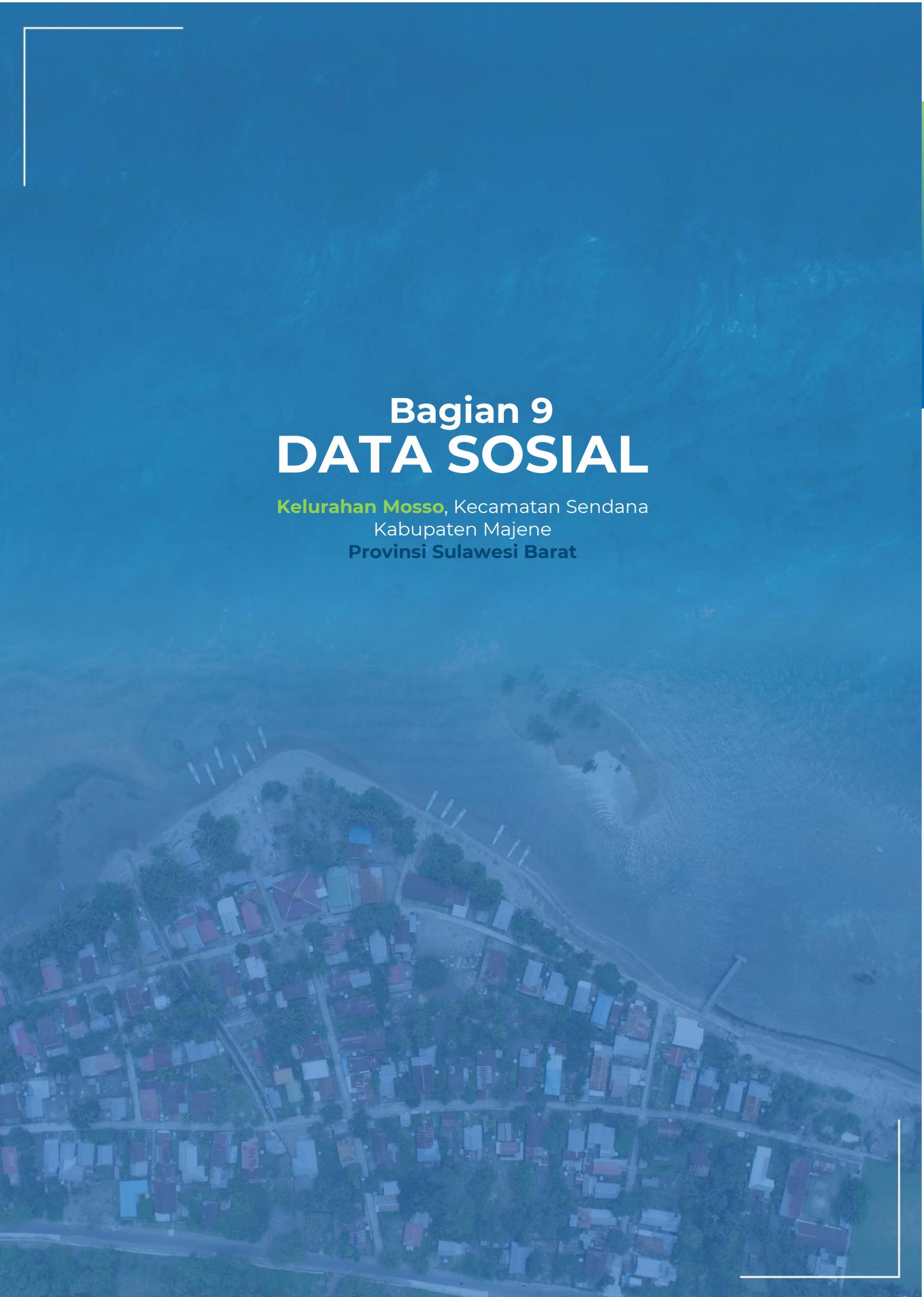
**Gambar 72** Jumlah keluarga berdasarkan kepemilikan jamban di dalam rumah di Kelurahan Mosso**Gambar 73** Jumlah keluarga berdasarkan jumlah kamar tidur di rumah di Kelurahan Mosso

Tabel 46 Jumlah keluarga berdasarkan jumlah kamar tidur di rumah di Kelurahan Mosso

Jumlah Kamar Tidur	Somba Utara	Somba Timur	Somba Selatan	Somba Tenggara	Labuang Utara	Labuang	Labuang Selatan	TOTAL
0	1	0	2	1	2	0	1	7
1	29	8	55	15	16	40	24	187
2	86	14	123	65	34	46	40	408
3	85	35	46	74	9	4	29	282
Lebih dari 3	39	10	14	17	1	0	2	83

**Gambar 74** Jumlah keluarga berdasarkan status kepemilikan rumah yang ditinggali di Kelurahan Mosso**Tabel 47** Jumlah keluarga berdasarkan status kepemilikan rumah yang ditinggali di Kelurahan Mosso

Status Kepemilikan	Somba Utara	Somba Timur	Somba Selatan	Somba Tenggara	Labuang Utara	Labuang	Labuang Selatan	TOTAL
Menumpang	38	14	29	18	5	12	15	131
Dinas	2	1	1	2	0	0	0	6
Milik sendiri	1	3	0	0	0	0	0	4
Lainnya	198	48	208	151	57	78	79	819

An aerial photograph of a coastal village with a blue overlay. The village features numerous small buildings with colorful roofs, interspersed with green trees. A road network is visible, and the village is situated near a body of water. The overall image has a monochromatic blue tint.

Bagian 9 DATA SOSIAL

Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana
Kabupaten Majene
Provinsi Sulawesi Barat

DATA SOSIAL

A. Kelembagaan Desa (Diagram Venn)

Diagram *venn* menggambarkan hubungan kelembagaan yang ada dengan masyarakat Kelurahan Mosso. Semakin besar ukuran dan semakin dekat jarak lembaga tersebut dengan masyarakat Kelurahan Mosso maka lembaga tersebut dianggap sangat berpengaruh dan penting bagi masyarakat Kelurahan Mosso.



Gambar 75 Diagram *venn* kelembagaan Kelurahan Mosso

Berdasarkan Gambar 75 yang merupakan hasil FGD, dapat diketahui bahwa terdapat 9 lembaga lokal yang terdapat di Kelurahan Mosso yaitu kelompok tani, kelompok nelayan, KWT, HMSS, karang taruna, Asassomba, PKK, majelis taklim/TPA, dan KUBE. Secara kelembagaan kelompok tani, kelompok nelayan, karang taruna, HMSS, dan Assasomba memiliki pengaruh sangat besar dan sangat dekat dengan masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena partisipasi masyarakat yang besar pada setiap kelembagaan yang ada di Kelurahan Mosso.

Kelompok tani yang mewadahi petani-petani di Kelurahan Mosso memiliki pengaruh yang besar dan sangat dekat dengan masyarakat dikarenakan sebagian besar masyarakat berprofesi utama maupun sampingan sebagai petani. Begitu juga dengan kelompok nelayan, dikarenakan mayoritas masyarakat kelurahan Mosso berprofesi sebagai nelayan maka kelompok ini sangat dekat dan berpengaruh dengan masyarakat, sebagai wadah bagi para nelayan. Adapun Himpunan Mahasiswa Satu Sendana atau HMSS yang

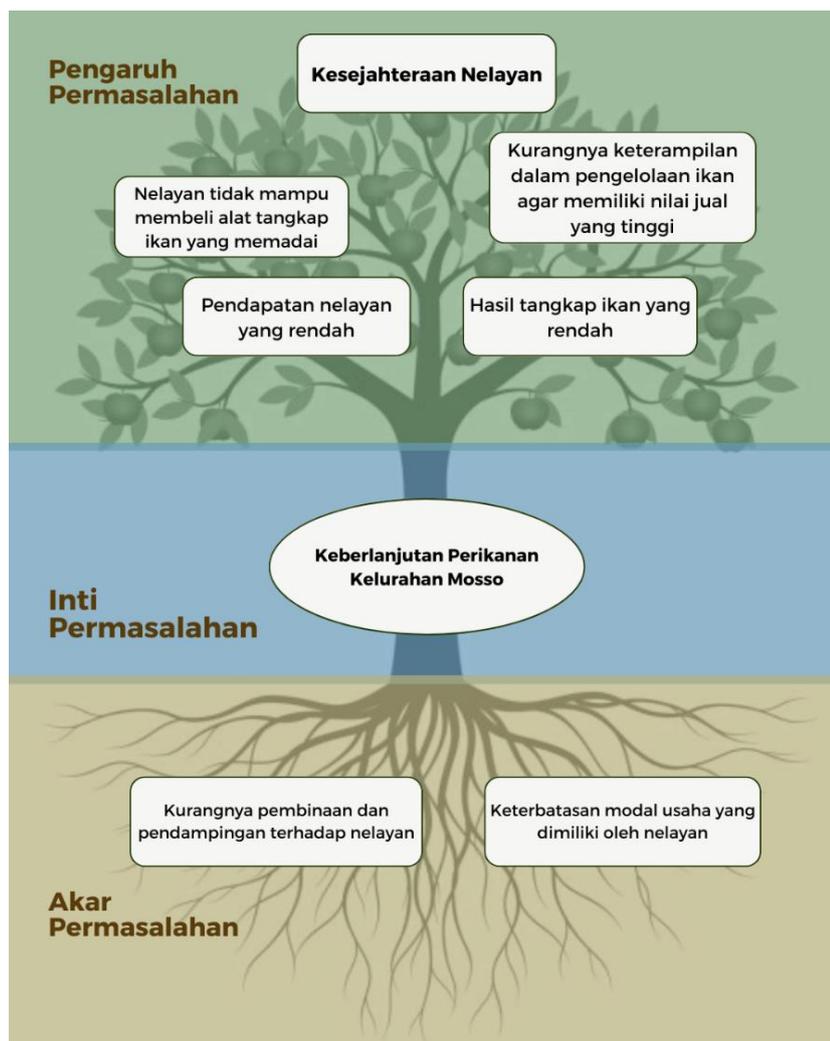
memiliki pengaruh yang besar dan interaksi yang dekat dengan masyarakat Kelurahan Mosso. Hal ini dikarenakan HMSS sering turun aksi membantu masyarakat terutama dalam menyelesaikan konflik masyarakat terutama masalah sertifikat rumah. Kelembagaan Asassomba sebagai kelompok yang bergerak di bidang olahraga memberikan pengaruh besar dan dekat dengan masyarakat terutama pada golongan pemuda Kelurahan Mosso. Hal tersebut disebabkan karena kegiatan olahraga yang cukup aktif dan diminati oleh masyarakat di Kelurahan Mosso.

Adapun majelis taklim atau TPA yaitu kelompok pengajian yang terdapat di Kelurahan Mosso, memiliki interaksi yang cukup dekat dengan masyarakat dan pengaruh yang besar. Hal ini dikarenakan masyarakat di Kelurahan Mosso mayoritas beragama Islam. TPA yang berfokus pada pendidikan agama Islam untuk anak-anak memiliki pengaruh yang besar dan sangat dekat dengan masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh karena kebanyakan anak-anak di Kelurahan Mosso mengakses TPA sebagai tempat belajar Al-Quran sehingga orang tua santri juga ikut terlibat dalam proses yang dilakukan oleh TPA.

Karang taruna yang mewadahi kegiatan kepemudaan di Kelurahan Mosso memiliki pengaruh yang besar, tetapi tidak terlalu dekat dengan masyarakat. Hal ini karena jarang ada kegiatan yang dilakukan oleh karang taruna, tetapi memberikan pengaruh dana untuk kegiatan lainnya di Kelurahan Mosso. Lembaga KWT atau kelompok wanita tani tidak memiliki pengaruh yang besar dan tidak terlalu dekat dengan masyarakat, hal ini dipengaruhi oleh kegiatan KWT yang belum merata pada seluruh rumah tangga. Begitu juga lembaga PKK yang memiliki pengaruh cukup kecil dan kurang dekat dengan masyarakat. KUBE adalah kelompok usaha bersama, merupakan lembaga untuk memberikan pinjaman buka usaha di masyarakat Kelurahan Mosso. KUBE memiliki tingkat pengaruh yang kecil dan interaksi yang tidak terlalu dekat dengan masyarakat di Kelurahan Mosso. Hal ini dikarenakan KUBE hanya memberikan manfaat bagi anggota KUBE itu sendiri.

B. Pohon Masalah

Analisis pohon masalah merupakan langkah pemecahan masalah dengan mencari sebab dari suatu akibat yang terjadi di Kelurahan Mosso. Adapun pohon masalah Kelurahan Mosso tersaji pada **Gambar 76**.

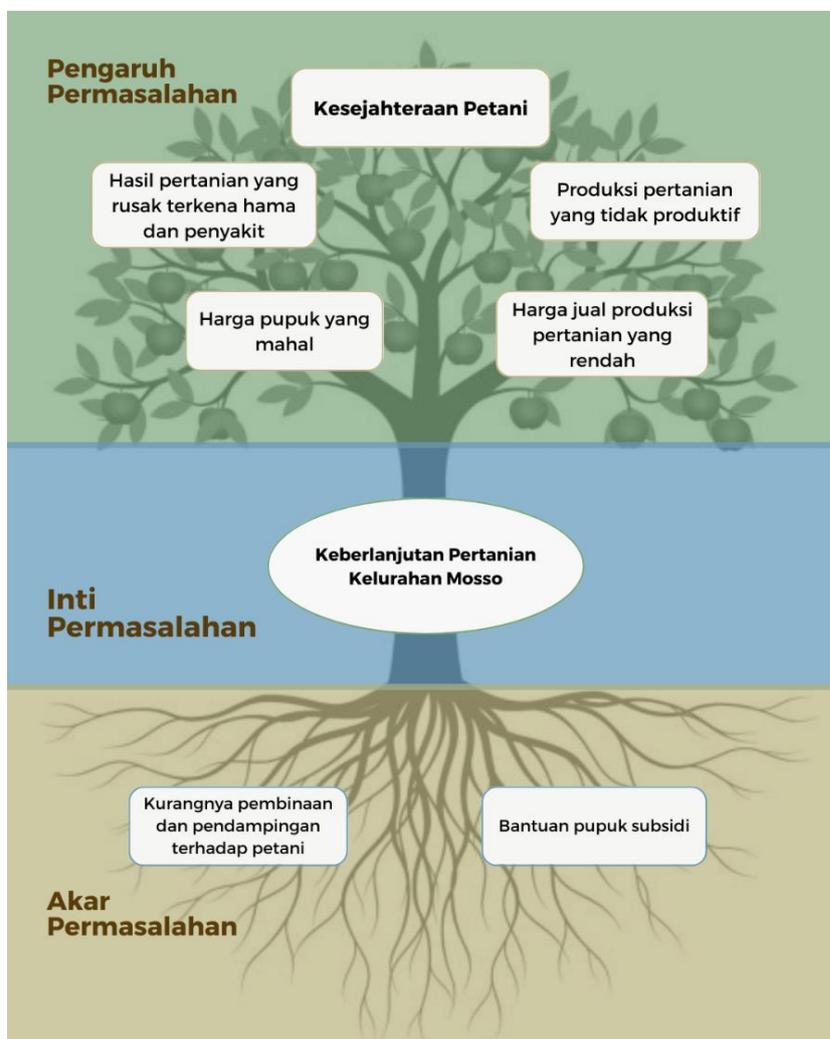


Gambar 76 Pohon Masalah Perikanan Kelurahan Mosso

Berdasarkan hasil FGD, dapat diketahui bahwa masalah utama yang terjadi di Kelurahan Mosso adalah masalah keberlanjutan perikanan. Mengacu dari pohon masalah dalam gambar 72 dapat dilihat bahwa akar masalah dari keberlanjutan perikanan adalah kurangnya pembinaan dan pendampingan terhadap nelayan serta keterbatasan modal usaha yang dimiliki oleh nelayan. Dua akar masalah utama ini yang menyebabkan beberapa permasalahan yang terjadi di Kelurahan Mosso. Pendapatan nelayan di Kelurahan Mosso dikatakan rendah jika dibandingkan dari modal dan biaya operasional yang mereka keluarkan. Hal ini juga dikarenakan nilai jual produksi ikan yang rendah dikarenakan para nelayan tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan ikan.

Kurangnya aktivitas pembinaan dan pendampingan dari pihak-pihak terkait kepada nelayan terkait pengolahan hasil tangkap untuk mendapatkan nilai jual yang tinggi adalah akar dari permasalahan ini. Permasalahan terkait perikanan lainnya juga mengenai hasil tangkap ikan

yang rendah. Hal ini dikarenakan terbatasnya alat tangkap ikan yang memadai. Nelayan di Kelurahan Mosso masih belum mampu membeli alat tangkap ikan seperti jala atau pukat. Hal ini menyebabkan hasil tangkap mereka yang tidak maksimal. Keterbatasan modal usaha yang dimiliki oleh nelayan serta tidak ada kelompok atau lembaga yang mewadahi para nelayan untuk pinjam modal. Hal inilah yang menjadi akar permasalahan dari keberlanjutan perikanan dari Kelurahan Mosso.



Gambar 77 Pohon Masalah Pertanian Kelurahan Mosso

c. Kalender Musim

Kalender musim digunakan untuk mengetahui kegiatan apa saja yang terjadi dan dilakukan masyarakat selama satu tahun di Kelurahan Mosso. Kalender musim ini berisikan kegiatan yang dimulai dari aspek perikanan, pertanian, perkebunan, peternakan, dan sosial budaya. Kalender musim Kelurahan Mosso disajikan pada Tabel 44 yang berdasarkan hasil FGD bersama masyarakat. Masyarakat di Kelurahan

Mosso paling banyak berprofesi sebagai nelayan sehingga komoditas paling banyak diusahakan oleh masyarakat adalah ikan terbang.

Berdasarkan waktu, kegiatan panen ikan terbang berlangsung dari Oktober, November, Desember, Januari, dan Februari. Kemudian terdapat juga panen ikan teri yang menjadi kegiatan usaha kedua dari masyarakat. Panen ikan teri dilakukan pada awal tahun, yaitu Januari dan Februari. Kemudian penangkapan cumi-cumi dan tuna dilakukan pada pertengahan tahun, yaitu pada Mei, Juni, Juli, dan Agustus. Dilanjutkan dengan musim ikan tongkol pada September dan Oktober.

Aspek berikutnya adalah pertanian, selain mayoritas masyarakat di Kelurahan Mosso bekerja sebagai nelayan, mereka juga banyak yang bermata pencaharian pada aspek pertanian. Komoditas paling banyak diusahakan oleh masyarakat adalah padi. Berdasarkan waktu, kegiatan usaha tani padi dalam satu tahun dilaksanakan satu periode. Kegiatan tanam padi dilakukan selama tiga bulan yaitu November, Desember, dan Januari, kemudian panen pada Februari. Selain padi, komoditas yang lain yang diusahakan yakni jagung, kacang tanah, dan ubi kayu yang pemanenannya dilakukan serentak pada April, Mei, dan Juni.

Selain tanaman semusim, Kelurahan Mosso juga menghasilkan komoditas tanaman perkebunan. Tanaman kelapa menjadi salah satu komoditas perkebunan utama di Kelurahan Mosso yang memiliki masa panen sepanjang tahun. Adapun tanaman lain seperti cokelat yang dipanen paling banyak pada bulan Juni. Kemudian mayoritas Masyarakat di Kelurahan Mosso juga menanam mangga yang dipanen paling banyak pada bulan Juli. Aspek selanjutnya yang menjadi usaha dari masyarakat di Kelurahan Mosso adalah aspek peternakan. Mayoritas masyarakat banyak yang memelihara sapi dan kambing. Biasanya mereka akan menjual hewan ternaknya pada pertengahan tahun yaitu bulan Juni.

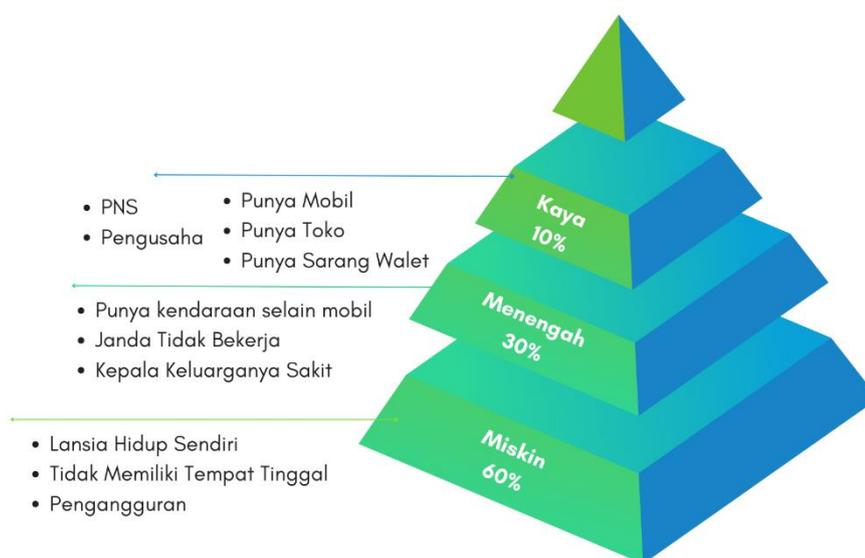
Pada aspek sosial-budaya, kegiatan yang paling banyak diikuti oleh seluruh masyarakat adalah pernikahan warga. Jika ada warga yang menikah, maka seluruh masyarakat akan turut serta meramaikan. Pengeluaran untuk biaya pernikahan biasanya ditanggung pihak laki-laki sebesar Rp65.000.000. Waktu-waktu yang lazim atau dianggap sebagai 'bulan baik' dijadikan sebagai momentum pernikahan di Kelurahan Mosso biasanya terjadi setelah bulan Ramadan yang tahun ini bertepatan pada April 2023. Masa-masa terpilih untuk kegiatan walimahan atau seluruh rangkaian proses pernikahan tersebut terlaksana sejak Mei sampai akhir tahun.

Selain itu, karena masyarakat Kelurahan Mosso mayoritas bermata pencaharian nelayan maka kegiatan tahunan mereka adalah pesta nelayan. Pesta nelayan dilakukan di beberapa lingkungan dengan acara makan bersama hasil tangkapan mereka. Pesta tersebut dilaksanakan dalam rentang waktu tiga bulan pada Juli, Agustus, dan September. Kemudian ada juga pesta rakyat yang dilaksanakan pada bulan Juli dan Agustus. Pesta rakyat dilakukan dalam satu kecamatan, kegiatan ini biasanya berlangsung beriringan dengan perayaan kemerdekaan Indonesia yang biasanya diisi oleh lomba-lomba.

Tabel 4.8 Kalender Musim Kelurahan Mosso

Aspek	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
Perikanan												
Ikan Terbang	Panen	Panen								Panen	Panen	Panen
Ikan Teri	Panen	Panen										
Cumi-Cumi					Panen	Panen	Panen	Panen				
Tuna					Panen	Panen	Panen	Panen				
Tongkol									Panen	Panen		
Pertanian												
Padi	Tanam	Panen									Tanam	Tanam
Jagung				Panen	Panen	Panen						
Kacang Tanah				Panen	Panen	Panen						
Ubi Kayu				Panen	Panen	Panen						
Perkebunan												
Coklat						Panen						
Kelapa	Panen											
Mangga							Panen					
Peternakan												
Sapi						Jual						
Kambing						Jual						
Sos-Budaya												
Kawin					Kawin							
Pesta Nelayan							Pesta	Pesta	Pesta			
Pesta Rakyat							Pesta	Pesta				

D. Stratifikasi Sosial



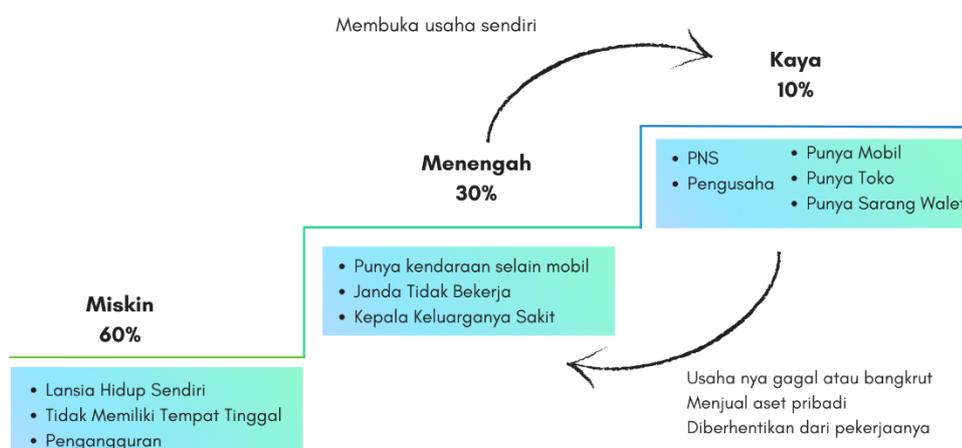
Gambar 78 Stratifikasi Sosial Kelurahan Mosso

Berdasarkan hasil FGD dapat diketahui stratifikasi sosial yang terdapat di Kelurahan Mosso. Stratifikasi sosial digunakan untuk melihat kelas sosial yang terdapat di suatu wilayah atau kelompok tertentu. Mengacu dari gambar 74 dapat diketahui bahwa terdapat tiga golongan kelas sosial yang ada di Kelurahan Mosso. Golongan pertama adalah golongan kaya yang paling sedikit yaitu sebanyak 10% dari populasi. Golongan kaya di Kelurahan Mosso biasanya dapat dicirikan berdasarkan profesinya seperti pegawai negeri sipil (PNS) dan pengusaha atau wiraswasta. Kemudian dapat dicirikan dari aset pribadi yang mereka miliki, seperti kepemilikan mobil, toko, dan sarang walet.

Untuk golongan kedua dikategorikan sebagai golongan menengah. Sebanyak 30% golongan menengah dari populasi yang terdapat di Kelurahan Mosso. Golongan menengah dapat dicirikan melalui aset pribadinya, yaitu kepemilikan kendaraan selain mobil, seperti sepeda motor, sepeda, dan bentor (becak motor). Kemudian juga dapat ditandai dari kemampuan kepala rumah tangga dalam mencari nafkah. Memang tampak tidak lazim atau janggal karena keberadaan golongan menengah adalah keluarga dengan kepala keluarga yang tidak mampu mencari nafkah atau sakit. Janda yang tidak bekerja juga masuk ke dalam golongan kelas menengah.

Kemudian yang terakhir adalah golongan miskin yang termasuk entitas yang paling banyak terdapat di Kelurahan Mosso yaitu sebanyak 60% dari populasi. Golongan miskin dapat dicirikan dari aset pribadi, status pekerjaannya, dan kerentanannya. Biasanya golongan miskin tidak memiliki

rumah, selain itu juga kepala keluarga beserta anggota keluarganya tidak ada yang memiliki pekerjaan. Lansia yang sudah tidak mampu bekerja dan juga tidak memiliki anggota keluarga lainnya juga termasuk ke dalam golongan miskin.



Gambar 79 Stratifikasi Sosial Kelurahan Mosso

Stratifikasi sosial juga bisa mengalami kenaikan dan juga penurunan tergantung pada kondisi dan usaha dari masing-masing rumah tangga Di Kelurahan Mosso, golongan menengah bisa naik menjadi golongan kaya jika seorang individu atau keluarga meningkatkan perekonomiannya melalui usaha sendiri dengan pinjam modal untuk membuka usaha toko atau sarang walet. Namun, upaya *social climbing* untuk mencapai golongan kaya akan membutuhkan waktu yang sangat lama sehingga jarang sekali ada keluarga yang bisa meningkatkan kelas sosialnya. Biasanya aset yang dimiliki oleh golongan kaya adalah hasil warisan dari orang tua mereka sebelumnya.

Kemudian selain bisa mengalami peningkatan, rumah tangga juga bisa mengalami penurunan kelas sosial. Seperti dari golongan kaya menjadi golongan menengah. Hal ini terjadi jika usaha yang dimiliki gagal atau mengalami kebangkrutan, atau menjual aset mereka untuk keperluan sekolah anak atau menikahkan anaknya. Bisa juga dalam situasi krisis sekarang, ada juga kepala keluarganya kehilangan pekerjaan utamanya, bisa karena dipaksa berhenti atau jatuh sakit. Stratifikasi sosial di Kelurahan Mosso hampir tidak mungkin jika kelas miskin meloncat ke kelas kaya, ataupun sebaliknya. Namun hal itu mungkin saja terjadi jika rumah tangga mengalami kemalangan atau bencana.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pendataan dan kajian DDP di Kelurahan Mosso, dihasilkan beberapa kesimpulan:

- Kondisi Geografis Kelurahan Mosso secara luasan mencapai 610.103018 hektare, yang terdiri dari 7 dusun. Wilayah kebun campuran, hutan, dan kebun kelapa merupakan area yang paling banyak dan luas, yaitu sekitar 25.175,75 hektare untuk hutan rimba, 23.017,65 hektare hutan rakyat, dan 5.007,50 hektare wilayah perkebunan kebun kelapa.
- Secara demografi di Kelurahan Mosso terdiri dari 967 keluarga dengan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 1.855 jiwa dan perempuan sebanyak 1.935 jiwa. Piramida penduduk Kelurahan Mosso menggambarkan bahwa terdapat 1.235 jiwa usia produktif. Sedangkan usia nonproduktif sebanyak 804 jiwa.
- Kondisi sandang, pangan dan papan Kelurahan Mosso bisa terlihat diantaranya dari dengan mayoritas makan masyarakatnya yang sudah frekuensi tiga kali sehari.
- Jumlah penduduk berdasarkan ijazah sekolah terakhir yang dimiliki di Kelurahan Mosso terbagi dalam 8 (delapan) kategori, yakni tidak punya ijazah, SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ sederajat, D-1/D-2/D-3, D-4/S-1, dan S-2. Berdasarkan dari total jumlah penduduk di Kelurahan Mosso sebanyak 3.790 jiwa, mayoritas penduduk Mosso ini sebanyak 1.117 jiwa (29,47 persen) tidak memiliki ijazah, sedangkan paling sedikit hanya sebanyak 1 jiwa (0,03 persen) untuk kategori penduduk memiliki ijazah S-3. Sementara itu, untuk penduduk yang memiliki ijazah SD/ sederajat di Kelurahan Mosso terdapat 1.090 jiwa (28,76 persen), diikuti penduduk yang memiliki ijazah SMA/ sederajat sebanyak 668 jiwa (17,63 persen), ijazah SMP/ sederajat 602 jiwa (15,88 persen), ijazah D-4/S-1 sebanyak 239 jiwa (6,31 persen) dan D-1/D-2/D-3 sebanyak 68 jiwa (1,82 persen), dan S-2 sebanyak 5 jiwa (0,13 persen).
- Dari jumlah penduduk berdasarkan keikutsertaan JKN-KIS/BPJS Kesehatan, terdapat 1.707 jiwa yang tidak mengikuti keikutsertaan. 1.420 jiwa merupakan Penerima Bantuan Iuran yang tersebar proporsional di setiap dusun. Sebanyak 117 jiwa tercatat sebagai peserta mandiri, 541 jiwa sebagai PUIK Negara dan 5 jiwa sebagai PUIK Swasta.
- Jumlah keluarga berdasarkan partisipasi organisasi di Kelurahan Mosso terbagi dalam 7 kategori keikutsertaan, yakni kelompok tani, kelompok nelayan/budidaya, kelompok buruh, ORMAS/ORMAS keagamaan, kelompok pengajian, kegiatan gotong royong, dan kelompok seni budaya. Berdasarkan dari total jumlah keluarga di Kelurahan Mosso yakni sebanyak 122 keluarga, di dalamnya terdapat keluarga yang memang

mengikuti satu atau lebih organisasi sekaligus. Meskipun begitu, kategori kelompok nelayan/budidaya masih menjadi kategori terbanyak di antara kategori keikutsertaan organisasi lainnya. Adapun untuk jumlah keluarga yang termasuk anggota kelompok nelayan/budidaya di Kelurahan Mosso sebanyak 85 keluarga. Kemudian diikuti pada kelompok tani sebanyak 27 keluarga, kelompok ormas/ormas keagamaan sebanyak 5 keluarga. Pada kategori keikutsertaan kelompok buruh, Dusun Labuang Utara menjadi satu satunya dusun yang penduduknya menjadi anggota kelompok buruh yakni sebanyak 2 keluarga. Sementara itu, pada kategori keikutsertaan kelompok pengajian, Dusun Somba Selatan menjadi satu-satunya dusun yang penduduknya menjadi anggota kelompok buruh yakni sebanyak 1 keluarga. Selanjutnya, pada kategori keikutsertaan kegiatan gotong royong, Dusun Labuang Selatan menjadi satu satunya dusun yang penduduknya mengikuti kegiatan gotong royong yakni sebanyak 1 keluarga. Berikutnya, pada kategori keikutsertaan kelompok seni/budaya, Dusun Labuang juga menjadi satu satunya dusun yang penduduknya menjadi anggota kelompok seni/budaya yakni sebanyak 1 keluarga.

- Jumlah keluarga berdasarkan tempat membuang sampah di Kelurahan Moss dibagi menjadi 6 (enam) kategori, yakni sungai, jurang, bakar, kubur, laut dan pantai, dan tempat pembuangan sampah (TPS). Terdapat 685 keluarga yang membuang sampah di Laut dan Pantai, 133 keluarga yang membuang sampah dibakar, 94 keluarga yang membuang sampah di sungai, 48 keluarga yang membuang sampah di tempat pembuangan sampah (TPS), 5 keluarga yang mengubur sampah, dan 2 keluarga yang mengubur sampahnya.sampah di tempat pembuangan sampah (TPS).
- Dari hasil pendataan kualitatif, sejak Kelurahan Mosso terbentuk di tahun 1991 diketahui bagaimana Kelurahan Mosso mengalami dinamika pembangunan yang mempengaruhi kondisi sosial, politik, ekonomi dan infrastrukturnya. Saat ini, secara kelembagaan menunjukkan bahwa untuk kelompok tani, Asassomba, HMSS, dan kelompok nelayan memiliki dampak dan kedekatan yang tinggi dengan masyarakat. Adapun permasalahan utama yang dihadapi masyarakat Kelurahan Mosso adalah soal keberlanjutan perikanan dan pertanian. Pola aktivitas masyarakat Kelurahan Mosso selama setahun juga sarat basis aktivitas perikanan, hal ini berkenaan dengan pekerjaan utama yang dominan dimasyarakat adalah nelayan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arham I, Sjaf S, Darusman D. 2019. Strategi Pembangunan Pertanian Berkelanjutan di Pedesaan Berbasis Citra Drone . *Jurnal Ilmu Lingkungan*. 17(2):245–255.
- Barlan ZA, Hakim L, Sjaf S. 2020. *Instrumen Memahami Desa*. Bogor: IPB Press.
- BPS. 2021b. Village Potential Statistics of Indonesia 2021. Jakarta.
- Chambers R. 1995. Poverty and livelihoods: whose reality counts? Volume ke-7.
- Chambers R. 2006. What is Poverty? Who asks? Who Answers. Di dalam: Ehrenpreis D, editor. *What is Poverty? Concepts and Measures*. Brasilia: United Nations Development Programme. www.undp-povertycentre.org.
- Chambers R. 2008. *Revolutions in development inquiry*. London: Earthscan Dunstan House.
- Chambers R. 2013. Participation, Pluralism and Perceptions of Poverty. Di dalam: Kakwani N, Silber J, editor. *Many Dimensions of Poverty*. London: Palgrave Macmillan. hlm 140–164.
- Couldry N. 2004. Theorising media as practice. *Social Semiotics*. 14(2):115–132. doi:10.1080/1035033042000238295.
- Couldry N. 2020. Recovering critique in an age of datafication. *New Media Soc*. 22(7):1135–1151. doi:10.1177/1461444820912536.
- Couldry N, Powell A. 2014. Big Data from the bottom up. *Big Data Soc*. 1(2):1–5. doi:10.1177/2053951714539277.
- Creswell JW. 2016. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell JW, Clark VLP. 2017. *Designing and Conducting Mixed Methods Research*. London: Sage publications.
- Denzin NK, Lincoln YS. 2009. Pendahuluan Memasuki Bidang Penelitian Kualitatif. Di dalam: Denzin NK, Lincoln YS, editor. *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hakim L. 2022 Sep 27. Menata Ulang Demokrasi Indonesia dari Indonesia. *Kompas.id*. [diakses 2022 Okt 6]. <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/09/25/menata-ulang-demokrasi-indonesia-dari-desa>.

- Haq M ul H. 1976. *the Poverty Curtain: Choices for the Third World*. New York: Columbia University Press.
- Hudson P, Ishizu M. 2017. *History of Number: An Introduction to Quantitative Approaches*. London: Bloomsbury Academic.
- Kemendagri. 2012. *Buku Panduan Sistem Informasi Profil Desa dan Kelurahan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri, Republik Indonesia.
- Kolopaking LM, Tonny F, Hakim L. 2020. Relevansi dan Jejak Pemikiran Prof. Dr. S.M.P. Tjondronegoro dalam Pendidikan Sosiologi Pedesaan. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*. 09(1):42–54.
- Mehta AK. 2021. Estimates of Women’s Labour Force Participation: Rectifying Persisting Inaccuracies.
- Pitaloka RD. 2022. Kebijakan Rekolonialisasi: Kekerasan Simbolik Negara Melalui Pendataan Pedesaan [Disertasi]. Depok: Universitas Indonesia.
- Pitaloka RD, Hendriyani H, Eriyanto E, Haryatmoko H. 2022. Communication practice in village data collection. *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)*. 6(1):179–198. doi:10.25139/jsk.v6i1.4314.
- Ruslan K. 2019. Memperbaiki Data Pangan Indonesia Lewat Metode Kerangka Sampel Area. Jakarta. <https://www.researchgate.net/publication/335620893>.
- Sampean, Sjaf S. 2020. The Reconstruction of Ethnodevelopment in Indonesia: A New Paradigm of Village Development in the Ammatoa Kajang Indigenous Community, Bulukumba Regency, South Sulawesi. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*. 25(2):159–192. doi:10.7454/MJS.v25i2.
- Sampean, Wahyuni ES, Sjaf S. 2019. The Paradox of Recognition Principles in Village Law in Ammatoa Kajang Indigenous Community. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*. 7(2):195–211. doi:10.22500/sodality.v7i3.28630.
- Sjaf S. 2017 Des 15. Merebut Masa Depan Pertanian. *Kompas*.
- Sjaf S. 2019. *Involusi Republik Merdeka*. Bogor: IPB Press.
- Sjaf S. 2021 Agu 2. Covid 19, Ketimpangan, Kemiskinan, dan Pengangguran Di Pedesaan. *Kompas*.
- Sjaf S, Elson L, Hakim L, Godya IM. 2020. *Data Desa Presisi*. Bogor: IPB Press.
- Sjaf S, Kaswanto K, Hidayat NK, Barlan ZA, Elson L, Sampean S, Gunadi HFF. 2021. Measuring achievement of sustainable development goals in rural Area: A case study of Sukamantri Village in Bogor District, West Java,

Indonesia. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*. 9(2). doi:10.22500/9202133896.

Sjaf S, Sampean, Arsyad AA, Elson L, Mahardika AR, Hakim L, Amongjati SA, Gandi R, Barlan ZA, Aditya IMG, *et al.* 2022 Sep. Data Desa Presisi: A New Method of Rural Data Collection. *MethodsX*.

Talawanich S, Jianvittayakit L, Wattanacharoensil W. 2019. Following a wonderful overseas experience: What happens when Thai youths return home? *Tour Manag Perspect*. 31:269–286. doi:10.1016/j.tmp.2019.05.013.

Tjondronegoro S. 1984. *Social Organization and Planned Development in Rural Java*. Oxford: Oxford University Press.

Wijoyono E. 2021. The utilization of village-information system for integrated social welfare data management: actor-network theory approach in Gunungkidul regency. *Jurnal Teknosains*. 11(1):13. doi:10.22146/teknosains.60798.

“Ikhtiar Data Desa Presisi merupakan bentuk awal untuk mempercepat transformasi Indonesia mulai dari desa”

Dr. Sofyan Sjaf





- PEMERINTAH PROVINSI -
SULAWESI BARAT



IPB University
— Bogor Indonesia —

**Kerja sama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
dengan IPB University Tahun 2022**